YANDRI SUSANTO: TRAGEDI KANJURUHAN HURUS JADI YANG TERAKHIR

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

EDISI NO.12/TH.XVI/DESEMBER 2022

SETELAH DUA DASAWARSA AMANDEMEN UUD 1945

MUNCUL WACANA MENGEMBALIKAN UTUSAN GOLONGAN DALAM KEANGGOTAAN DI MPR

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 **Refleksi** Mendorong Daerah Wujudkan Kemandirian Energi Bersih

19 **Nasional** TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku

39 **Selingan** Membangun Kota Ramah Sepeda

48 **Sosialisasi** Ada Panduan Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

MAJELIS
EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA
Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA

Wacana Mengembalikan Utusan Golongan

Kehadiran Utusan Golongan akan menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif karena secara prinsipil mengakomodir karakteristik rakyat Indonesia yang sangat plural dan heterogen dalam segala aspeknya. Keberadaan Utusan Golongan dapat menjadi penyeimbang peran dari keterwakilan politik yang dipegang DPR dan keterwakilan daerah yang berada di tangan DPD.

16 Nasional

Perempuan Punya Legitimasi Kuat Wujudkan Indonesia Jadi Bangsa Besar

48 Sosialisasi

Ada Panduan Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

39 SELINGAN

Membangun Kota Ramah Sepeda

78 Profil

H. Santoso, SH., MH.

Pengantar Redaksi 04

Perspektif 06

Kolom 32

Gema Pancasila 36

Aspirasi Masyarakat 47

Varia MPR 68

Wawancara 72

Figur 74

Ragam 76

Dari Rumah Kebangsaan 82

Rehal 84

COVER

Edisi No.12/TH.XVI/Desember 2022

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Wacana Mengembalikan Utusan Golongan

PERUBAHAN atau amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sekali dalam empat tahap pada tahun 1999-2002 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk perubahan sistem dan lembaga perwakilan politik di parlemen, khususnya di lembaga MPR RI. Sebelum amandemen UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Setelah amandemen, keanggotaan MPR RI hanya terdiri dari anggota DPR RI sebagai representasi partai politik, dan anggota DPD sebagai representasi kepentingan daerah. Tidak ada lagi Utusan Golongan.

Perubahan itu tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sejak amandemen UUD berlaku pada 2002, kemudian dari hasil Pemilu 2004, keanggotaan MPR RI hanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

Setelah berlaku lebih dari dua dasa warsa, kini muncul suara-suara untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR RI. Dalam silaturahim kebangsaan pada akhir 2019, Pimpinan MPR RI menangkap dan menampung aspirasi dari Ormas keagamaan dan berbagai organisasi lainnya terkait Utusan Golongan. Aspirasi untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR RI datang dari Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, serta Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Ormas lainnya. Ormas dan tokoh bangsa itu melihat bahwa unsur Utusan Golongan patut dipertimbangkan untuk hadir kembali dalam keanggotaan MPR RI.

Tentu, mengembalikan unsur Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR RI menjadi wacana yang menarik, sehingga perlu dielaborasi lebih jauh. Memang, kehadiran Utusan Golongan di MPR RI akan mengubah wajah lembaga tinggi negara ini. Kehadiran Utusan Golongan akan menjadikan MPR RI sebagai lembaga perwakilan yang inklusif. Sebab, MPR RI mengikutsertakan seluruh unsur dalam masyarakat Indonesia yang plural. Kehadiran Utusan Golongan di parlemen juga membuat kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik dan daerah bisa terakomodir.

Secara teoritis, dalam sistem perwakilan ada tiga jenis perwakilan, yakni perwakilan politik melalui partai politik, perwakilan teritorial melalui negara bagian atau daerah, dan perwakilan fungsional melalui utusan golongan-golongan. Dalam sistem perwakilan di Indonesia, seperti pernah disebutkan Presiden Soekarno atau Bung Karno, jangan sampai ada golongan atau kelompok yang ditinggalkan. Dalam konstruksi ini, MPR sebagai penjelmaan dari rakyat harus mencakup ketiga unsur itu.

Namun, patut juga disadari, bahwa memasukkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR RI akan memunculkan pro kontra dan kontroversi. Belum lagi sejumlah pertanyaan bakal menyertai wacana memasukkan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR ini. Misalnya, bagaimana merealisasikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR RI, siapa yang disebut Utusan Golongan, siapa yang menentukan Utusan Golongan, bagaimana kedudukan Utusan Golongan di MPR RI, apakah Utusan Golongan menjadi bagian DPD, atau berdiri sendiri.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan bahwa MPR akan melakukan pengkajian terhadap wacana mengembalikan Utusan Golongan. Yang jelas, mengembalikan Utusan Golongan tidak bisa dilakukan pada MPR periode saat ini. Pasalnya, pintu amandemen UUD NRI Tahun 1945 sudah tertutup. Bersamaan dengan itu, MPR bersama Forum Aspirasi Konstisusi (FAK) yang dipimpin anggota MPR Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie tetap menyerap aspirasi terhadap wacana menghidupkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR. ❑

Redaksi

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Ma'ruf Cahyono
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Yana Indrawan, Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Budi Muliawan
KOORDINATOR REPORTASE
Ario Setiawan
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta , Alfonso DK Tahapary
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Anggun Permana, Achmad Farobi, Widya Permataningrum
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

Selamat
HARI NATAL 2022 &
TAHUN BARU 2023

EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

Buku Digital MPR RI
MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT
MUDAH DI AKSES
EFEKTIF & EFISIEN
MAJALAH MAJELIS, JURNAL,
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN
MPR RI DALAM GADGET ANDA
MPR.GO.ID
@MPRGOID
Segera
Unduh
Aplikasinya !
DI PLAY STORE
http://bit.ly/bukudigitalmpri

Mendorong Daerah Wujudkan Kemandirian Energi Bersih

POTENSI atau sumber-sumber energi bersih tersebar di berbagai pelosok daerah. Semua potensi itu menjadi peluang bagi banyak daerah mewujudkan kemandirian menyediakan energi bersih. Tantangannya adalah membangkitkan kepedulian dan minat daerah untuk segera mengolah dan memanfaatkan semua potensi itu.

Sepanjang periode transisi energi sekarang ini, semua daerah dan komunitas hendaknya didorong untuk segera bergerak bersama-sama mengidentifikasi dan memahami sumber-sumber energi bersih dalam lingkungan kehidupan masyarakat setempat, baik potensi dalam wujud sungai, air terjun, sinar matahari hingga angin. Kebutuhan akan gerakan dan langkah bersama itu bertujuan membangkitkan kepedulian dan minat semua komunitas mewujudkan kemandirian menyediakan energi bersih.

Pemerintah dan sejumlah pakar energi dalam beberapa kesempatan terdahulu berulangkali memaparkan keberagaman sumber energi bersih di dalam negeri. Potensi pembangkit listrik tenaga hidro terbilang sangat besar, karena Indonesia memiliki 4.400 sungai. Lokasi ribuan sungai itu tersebar di berbagai daerah.

Tak kalah melimpahnya adalah potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Potensi yang terkandung dari pembangkit geothermal sangat besar, mencapai 29 ribu megawatt. Sayangnya, sejauh ini, baru bisa direalisasikan sekitar 2.000 Megawatt.

Hasil kajian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mencatat bahwa potensi teoritis energi surya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 66 giga watt (GW). Dari potensi 66 GW itu, potensi teknis energi surya mencapai hampir 10 GW atau sekitar 9,9 GW. Karena itu, Kementerian ESDM memastikan pengembangan PLTS akan jadi tumpuan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) beberapa tahun ke depan.

Pemerintah dan sejumlah komunitas sudah berinisiatif. Kesungguhan pemerintah merealisasikan proyek PLTS berskala besar patut diapresiasi. Misalnya, proyek PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat. PLTS Cirata diproyeksi menghasilkan kapasitas listrik hingga 145 MW.Sudah barang tentu penggunaan area perairan sebagai sumber energi dapat direplikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Vena Energy sejak 2019 telah membangun PLTS. Di atas lahan seluas 29 hektar yang berlimpah sinar matahari, terbentang 64.640 panel surya. Dirancang dengan kapasitas terpasang 21 megawatt (MW), PLTS Likupang sudah menyalurkan listrik sampai 15 MW per hari.

PLTS dalam skala yang lebih kecil pun sudah direalisasikan di beberapa tempat. Misalnya, masyarakat di pulau-pulau kecil di sekitar Labuan Bajo kini telah menikmati listrik yang bersumber dari tenaga surya. PLN membangun PLTS untuk memenuhi kebutuhan daya listrik bagi warga Pulau Messah, Papagarang, Seraya Marannu, dan Batu Tiga Boleng. Atau, warga di Dusun Yarweser, Kampung Arefi Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua, kini sudah dapat menikmati daya listrik berkat bantuan 30 unit mikro PLTS dan energy storage dari PT PLN.

Komunitas pelaku bisnis juga peduli energi bersih. Inisiatif PT Astra Honda Motor (AHM) menggunakan EBT layak menjadi contoh. Sejak 2014, sebanyak 18.270 modul panel surya terpasang di atap gedung pabrik AHM Karawang dan Cikarang. Selain kedua pabrik tersebut, solar panel juga terpasang di AHM Safety Riding &

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Training Center Deltamas, Jawa Barat. Sumber listrik itu digunakan untuk mendukung kegiatan produksi sepeda motor.

Bali dicatat sebagai provinsi paling progresif dalam memanfaatkan potensi EBT. Demikian seriusnya sehingga pemerintah daerah setempat menerbitkan beberapa kebijakan sebagai peta jalan mewujudkan Bali Energi Bersih. Program EBT yang secara masif akan diimplementasikan di Bali adalah pemasangan PLTS Atap. Selain itu, dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Pesanggaran, Denpasar, berkapasitas 2 X 100 MW. Pemda Bali juga memberlakukan ketentuan tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Contoh-contoh kasus tentang daerah atau komunitas yang berhasil memanfaatkan potensi sumber energi bersih ini layak dikedepankan untuk membangkitkan kepedulian dan minat komunitas di daerah lain. Semua potensi atau sumber-sumber energi bersih itu tersebar di berbagai pelosok daerah. Dengan begitu, semua potensi itu menjadi peluang bagi banyak daerah mewujudkan kemandirian menyediakan energi bersih.

Agar semakin banyak daerah dan komunitas yang peduli dan berminat, aktivitas promosi transisi energi hendaknya lebih ditingkatkan. Boleh jadi, ungkapan dan makna tentang 'transisi energi' baru didengar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Karena itu, Kementerian ESDM, Pertamina dan PLN perlu mengambil inisiatif mempromosikan kepada masyarakat makna transisi energi dengan segala agenda, program dan target.

Apalagi, pemerintah telah mematok target penambahan PLTS sampai 5,3 GW yang tersebar di sejumlah wilayah hingga tahun 2030, baik PLTS Terapung maupun PLTS Atap. Selain itu, Pemerintah pun telah berketetapan menjadikan sumber energi surya sebagai faktor pendorong percepatan pencapaian bauran EBT 23 persen pada 2025.

Boleh jadi, dengan memperbesar skala promosi dan penyebaran informasi yang intensif, akan semakin banyak daerah dan komunitas yang peduli dan berminat merealisasikan PLTS Atap. Apalagi tersedia insentif PLTS Atap berupa dana hibah yang disediakan pemerintah bekerja sama dengan UNDP (United Nations Development Programme). Insentif PLTS Atap menggunakan alokasi dana Hibah SEF (Sustainable Energy Fund) yang didistribusikan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sebagai hal yang relatif baru bagi kebanyakan komunitas, melakoni transisi energi tentu bukan aktivitas yang mudah. Maka, peran pendampingan para ahli dan teknisi dari Kementerian ESDM, Pertamina dan PLN jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat. ❑

Setelah Dua Dasawarsa Amandemen UUD 1945

Muncul Wacana Megembalikan Utusan Golongan dalam Keanggotaan di MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kehadiran Utusan Golongan akan menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif karena secara prinsipil mengakomodir karakteristik rakyat Indonesia yang sangat plural dan heterogen dalam segala aspeknya. Keberadaan Utusan Golongan dapat menjadi penyeimbang peran dari keterwakilan politik yang dipegang DPR dan keterwakilan daerah yang berada di tangan DPD.

DUA KURSI di depan sudah disediakan untuk Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua Forum Aspirasi Konstitusi (FAK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Di sebelah kanan, duduk beberapa pakar yang diundang. di antaranya Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., (Ketua Komisi Konstitusi periode 2013-2015), Jacob Tobing (Ketua PAH I MPR 2001-2004), Prof. Dr. Sofian Effendy (Wakil Ketua Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono (Sekjen Forum Purnawirawan TNI-Polri). Sedangkan di sebelah kiri duduk Sekretaris FAK Dr. Abdul Kholik, SH., MSi., dan anggota FAK lainnya.

Pada Rabu siang itu, 30 November 2022, MPR dan FAK menggelar diskusi bertajuk Temu Pakar dengan mengundang beberapa pakar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Tema yang dibicarakan adalah "Evaluasi Konstitusi Guna Menjamin Efektivitas Penyelenggaraan Negara dan Pencapaian Tujuan Bernegara". Evaluasi terhadap pelaksanaan konstitusi perlu dilakukan karena UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen sudah berlaku lebih dari dua dasawarsa. Untuk itu, perlu pengkajian sejauh mana efektivitas konstitusi dalam penyelenggaraan bernegara.

Dalam temu pakar dibahas beragam hal, termasuk situasi dan kondisi masyarakat serta sistem ketatanegaraan saat ini dikaitkan dengan konstitusi. Salah satu hal yang disebut-sebut dalam

pertemuan itu adalah perihal Utusan Golongan agar kembali diakomodir dalam keanggotaan MPR RI. Adalah Jimly Asshiddiqie dan anggota FAK lainnya yang menekankan pentingnya kehadiran Utusan Golongan. Selama 23 tahun perjalanan reformasi ini, Utusan Golongan hilang dari keanggotaan MPR RI.

Temu Pakar ini merupakan rangkaian pertemuan dan diskusi dengan tema mengembalikan Utusan Golongan ke dalam keanggotaan MPR. Sebelumnya, pada Kamis, 27 Oktober 2022, Institut Ekonomi Politik

Soekarno-Hatta menggelar diskusi dengan tema: “Urgensi Utusan Golongan di MPR RI”. Turut berbicara dalam diskusi ini Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.

Setelah itu, MPR kembali menggelar diskusi Empat Pilar MPR bertajuk: “Urgensi Kehadiran Utusan Golongan di MPR RI” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 November 2022 dan 23 November 2022. Dalam dua diskusi ini turut berbicara Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Jimly Asshiddiqie, serta Pakar Hukum Ketatanegaraan John Pieris, dan Margarito Kamis.

Dalam beberapa pertemuan dan diskusi itu, Jimly Asshiddiqie menilai, perlu kajian untuk kembali mengakomodasi Utusan Golongan di lembaga MPR. Menurut Jimly, pentingnya kehadiran Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang majemuk dan beraneka ragam. Kemajemukan itu tidak mungkin hanya diwakili oleh DPR sebagai perwakilan politik dan DPD sebagai perwakilan daerah.

Menurut Jimly, ada tiga jenis perwakilan rakyat, yakni: perwakilan politik melalui partai politik, perwakilan territorial melalui negara bagian atau daerah, dan perwakilan fungsional melalui utusan-utusan golongan. “Selama ini hanya dikembangkan dua sistem perwakilan atau dua kamar (bicameral). Padahal negara Indonesia cukup besar dan majemuk sehingga tidak hanya diwakili perwakilan politik dan daerah saja, perlu perwakilan golongan-golongan. Para pendiri bangsa sebenarnya sudah memikirkan secara matang keberadaan Utusan Golongan dalam perwakilan di Indonesia ,” kata anggota DPD dari DKI Jakarta ini.

Ketua MPR Bambang Soesatyo sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie. Bahkan, Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan, wacana untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR pernah disuarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Bamsoet mengatakan, sebelum UUD diamandemen, keanggotaan MPR RI terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Setelah UUD diamandemen (1999-2002), keanggotaan MPR RI hanya terdiri dari anggota DPR sebagai representasi partai politik, dan anggota DPD sebagai representasi kepentingan daerah. Sedangkan Utusan Golongan dihapuskan. Pada saat Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan silaturahim kebangsaan pada akhir tahun 2019, MPR menerima aspirasi agar Utusan Golongan dipertimbangkan kembali masuk dalam keanggotaan MPR RI.

“Aspirasi itu disampaikan PP. Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Konghucu Indonesia, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Para tokoh bangsa ini melihat bahwa unsur Utusan Golongan patut dipertimbangkan untuk hadir kembali dalam keanggotaan MPR RI,” ujar Bamsoet dalam berbagai kesempatan.

Memang, tak lama setelah dilantik pada Oktober 2019, Pimpinan MPR beranjangsana ke beberapa Ormas dan tokoh bangsa.

Berturut-turut Pimpinan MPR berkunjung ke Nahdlatul Ulama, Matakin, Muhammadiyah, PGI. Pada Rabu malam, 27 November 2019, Pimpinan MPR berkunjung ke Kantor PBNU di Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, PBNU mengusulkan agar Utusan Golongan dikembalikan ke parlemen. Selain mengusulkan Utusan Golongan, PBNU juga meminta agar presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, mendukung kembalinya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kemudian, pada Desember 2019, Pimpinan MPR berkunjung ke PP. Muhammadiyah. Dalam pertemuan itu, PP. Muhammadiyah juga mengusulkan agar MPR menghidupkan kembali Utusan Golongan di Parlemen. Alasannya, banyak aspirasi dari kelompok dan golongan yang tidak bisa disalurkan dan diperjuangkan secara baik oleh partai-partai. Pasalnya, masing-masing partai lebih mengedepankan aspirasi dan kepentingannya sendiri-sendiri sehingga kepentingan golongan lain tidak diperhatikan dengan baik.

Pada awal Januari 2020, Pimpinan MPR kembali melanjutkan silaturahim kebangsaan dengan mengunjungi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI). Kedua organisasi keagamaan itu pun meminta MPR mengembalikan Utusan Golongan di parlemen. Argumentasinya, dengan adanya Utusan Golongan maka bisa mewakili golongan-golongan seperti dulu, terutama golongan minoritas.

Dukungan Pimpinan MPR

Bamsoet menuturkan, kehadiran Utusan Golongan akan menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif, karena secara prinsipil mengakomodir karakteristik rakyat Indonesia yang sangat plural dan heterogen dalam segala aspeknya. "Dalam konteks kekinian, keberadaan Utusan Golongan dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar untuk memenuhi keadilan peran politik secara menyeluruh, sekaligus dapat menjadi penyeimbang peran dari keterwakilan politik yang dipegang DPR dan keterwakilan daerah yang berada di tangan DPD," katanya.

Bamsoet menambahkan, untuk mengembalikan Utusan Golongan ke dalam tubuh MPR pada periode berikutnya, MPR akan melakukan kajian. Namun, MPR periode ini sudah sepakat tidak akan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pengembalian Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR memerlukan perubahan UUD. Pasal yang diubah adalah Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Bambang Soesatyo

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah juga menilai, sudah saatnya posisi Utusan Golongan dan Utusan Daerah dikembalikan sebagai bagian dari keanggotaan MPR RI. Alasannya, MPR seharusnya bersifat terbuka, mengayomi, dan diisi oleh elemen masyarakat yang menjadi miniatur multikulturalisme Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membuka acara 'Temu Tokoh Nasional/Kepemudaan/Keagamaan/Sivitas Akademik MPR RI Kerjasama dengan Dewan Pakar Nasional PA GMNI' dengan tema: 'Quo Vadis Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia'', pertengahan September 2022.

Ahmad Basarah

"Saya sadar, ide memasukkan kembali Utusan Golongan dan Utusan Daerah ini mungkin akan memunculkan perdebatan terkait bagaimana perubahan ketatanegaraan, atau apa beda antara DPD dan Utusan Gologan, kemudian siapa yang pantas masuk dalam kriteria Utusan Golongan. Tapi, demi menjaga multikulturalisme Indonesia, di situlah pentingnya ide ini saya sampaikan agar muncul diskusi-diskusi kebangsaan yang menarik, yang memunculkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan,'' kata Basarah.

Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid juga berpendapat, bila keanggotaan MPR ditentukan dengan pemilihan melalui pemilihan umum maka golongan-golongan minoritas tidak pernah bisa menjadi anggota parlemen. Kelompok atau golongan minoritas yang tidak memiliki kekuatan finansial cenderung tidak bisa masuk menjadi anggota dewan. "Golongan-golongan yang tidak pernah ikut model pemilihan seperti itu tidak akan pernah duduk di lembaga legislatif. Padahal Indonesia sangat beragam, baik budaya, etnis, bahasa, tetapi tidak bisa diakomodir lewat pemilihan," katanya dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema: "Urgensi Utusan Golongan" di Media Center MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 16 November 2022.

Karena itu, Jazilul sepakat bahwa Utusan Golongan penting untuk dihidupkan kembali dan masuk dalam keanggotaan di parlemen. "Namun, modelnya seperti apa masih perlu kajian. Apalagi jumlah anggota parlemen terus bertambah. Apakah unsur Utusan Golongan ada di DPR atau DPD, bagaimana menentukan Utusan Golongan itu, masih perlu kajian. Tapi, yang jelas pintu amandemen UUD pada periode ini sudah ditutup," tutur politisi PKB ini.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyebutkan, wacana memasukkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR sudah sering dibahas. MPR pun menangkap aspirasi dan

keinginan yang berkembang di masyarakat. "Kami di MPR berpikir boleh juga dimunculkan kembali Utusan Golongan, karena memang baik dan sesuai dengan implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau memang wacana mengembalikan Utusan Golongan bisa bermanfaat maka hanya mencari prosedur yang sesuai dengan konstitusi," katanya kepada *Majelis*.

Fadel Muhammad menambahkan, untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR, maka MPR pula yang harus menjalankan langkah-langkah untuk merealisasikan Utusan Golongan itu. Namun, MPR pada periode ini sudah sepakat untuk tidak melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, sedangkan untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR perlu melakukan perubahan UUD. "Ini perlu kajian mendalam dan pembahasan yang lebih serius," ujar mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Fadel melihat, Tata Tertib MPR bisa menjadi pintu masuk untuk Utusan Golongan. Sebab, tata cara penetapan anggota MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Dengan kata lain, untuk memasukkan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR semestinya tidak melalui Pemilu. "Apakah mekanisme ini bisa dipakai atau ada mekanisme lain, ini masih menjadi pembahasan dan kajian. Lalu, bagaimana penunjukan Utusan Golongan, siapa yang mempunyai kewenangan menunjuk Utusan Golongan? Seharusnya Utusan Golongan tidak melalui Pemilu, tapi kita lihat bagaimana perkembangannya nanti," jelasnya.

Jalan untuk memasukkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR masih panjang. "Masih banyak hal yang harus dibahas dan disepakati. Misalnya, Utusan Golongan ini akan diletakkan dimana, apakah digabung bersama DPD atau berdiri sendiri? Jadi, jalan memang masih panjang. Saya berharap, wacana Utusan Golongan ini harus dipertajam dan dimatangkan," katanya.

Jalan untuk merealisasikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR memang masih panjang, dan bakal menimbulkan pro kontra dan kontroversi. Seperti disebutkan, banyak pertanyaan yang masih perlu dikaji, seperti apa mekanisme untuk mengembalikan Utusan Golongan? Siapa yang disebut Utusan Golongan dan bagaimana kriterianya? Di mana letak Utusan

Jazilul Fawaid

Golongan di MPR, apakah berdiri sendiri atau berada di DPD?

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Dr. Abdul Kholik, SH., M.Si., menyebut, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat sehingga seharusnya semua terwakili di MPR, yaitu perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan golongan. "Bila pengambilan keputusan didominasi keterwakilan politik maka hasilnya akan bersifat politis dan mengabaikan aspirasi golongan-golongan. Secara substansial, keterwakilan Utusan Golongan di parlemen memang diperlukan," katanya kepada *Majelis*.

"Tetapi, yang akan menjadi dilema dan kontroversi adalah bagaimana memasukkan Utusan Golongan dalam keanggotaan

Fadel Muhammad

di MPR, dan bagaimana mengklasifikasi atau mengkategorikan siapa yang disebut sebagai Utusan Golongan," sambungnya.

Abdul Kholik berpendapat, untuk merealisasikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR tidak harus melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945. Untuk memenuhi unsur perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan golongan, semua sudah dikunci melalui pemilihan umum. Peluang mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR tetap terbuka meski melalui Pemilu. Caranya, Pemilu juga diikuti calon perseorangan, yaitu calon-calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Nah, anggota DPD yang terpilih sebenarnya adalah pribadi-pribadi, bukan mewakili kelembagaan. Di sinilah, anggota DPD yang terpilih mewakili pribadi masing-masing dan sebenarnya di antara mereka ada yang mewakili golongan-golongan," kata Senator dari Jawa Tengah ini.

Selama ini orang menganggap bahwa anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Padahal, berbeda dengan DPR yang mewakili partai politik, anggota DPD sesungguhnya adalah individu-individu. "Kami sendiri sedang menginisiasi Utusan Golongan dengan membentuk Kaukus Utusan Golongan. Anggotanya adalah anggota DPR dan anggota DPD yang mempunyai basis golongan, misalnya mewakili agama, akademisi, petani, perempuan, pemuda, pengusaha, dan lainnya," jelasnya.

Faktanya, lanjut Abdul Kholik, banyak anggota DPD yang sebenarnya mewakili golongan-golongan, seperti dari unsur agama antara lain NU, Muhammadiyah, dan lainnya, dari akademisi, profesi, guru, petani. "Jadi, sebenarnya ada anggota DPD yang berasal dari golongan-golongan. Ketika di MPR, mereka bisa memilih apakah masuk sebagai Utusan Daerah atau Utusan Golongan. Dengan demikian, keanggotaan di MPR menjadi jelas, yaitu ada anggota DPR yang mewakili partai politik, anggota DPD yang mewakili Utusan Daerah, dan anggota yang mewakili golongan-golongan bisa dari anggota DPD maupun anggota DPR. Utusan Golongan itu hanya ada di MPR, dan dia bisa menjadi bagian dari DPD. Jadi, untuk mengembalikan Utusan Golongan di MPR tidak harus dengan amandemen UUD," katanya. ❑

DER/BSC

Utusan Golongan

Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi

PADA saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai lembaga-lembaga negara. Aturan Peralihan UUD 1945 dalam Pasal IV menyebutkan, sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional, yaitu Komite Nasional Pusat atau lebih sering disebut sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

KNIP dibentuk oleh Presiden pada 29 Agustus 1945. Anggota KNIP diangkat oleh Presiden, yang pada umumnya adalah mantan anggota PPKI. Pada 7 Oktober 1945, KNIP mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR dengan anggota sementara dari anggota KNIP. Desakan tersebut diwujudkan dalam bentuk referendum yang ditandatangani oleh 50 orang anggota KNIP. Namun, pembentukan MPR belum dapat direalisasikan. Masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena situasi saat itu tidak mendukung.

Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang diberikan tugas membuat Undang-Undang Dasar sebagai Pengganti UUDS 1950. Namun, Konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan UUD menemui jalan buntu. Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan: Pembubaran Konstituante, Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak diberlakukan lagi UUD Sementara 1950, Pembentukan dua lembaga yaitu MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Dalam rangka melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah membentuk MPRS, Presiden pada 22 Juli 1959 mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 tentang Pembentukan MPRS. Pasal 1 Penpres tersebut menyatakan bahwa susunan MPRS terdiri atas anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sejak itulah muncul Utusan Golongan dalam lembaga MPR(S).

Untuk Utusan Daerah dan Utusan Golongan diatur dalam Peraturan Presiden No. 12/1959. Utusan Daerah berjumlah 94 orang, yang terdiri atas wakil 24 daerah provinsi yang jumlahnya berkisar antara tiga sampai lima orang. Sedangkan yang dimaksud dengan Utusan Golongan terdiri atas 13 macam golongan, yaitu: Golongan Tani, Buruh/Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, Koperasi, Angkatan Bersenjata, Veteran, Alim Ulama–Islam, Katolik, Protestan, Hindu Bali, Pemuda, Wanita, Wartawan, dan Cendikiawan/Pendidikan. Jumlah keseluruhan Utusan Golongan tersebut adalah 200 orang.

Dalam komposisi seperti itu, MPRS menggelar Sidang Istimewa setelah DPR-GR mengeluarkan Resolusi dan Memorandum tertanggal 9 Februari 1967. DPR-GR berpendapat, “Kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa negara, dan Pancasila.” Sidang Istimewa MRS bertujuan untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan presiden/mandataris MPRS. Kemudian Letjen Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden/mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966.

Pada masa Orde Baru Soeharto, MPR sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini dipertahankan selama masa pemerintahan Orde Baru. Cara pengisian keanggotaan MPR melalui tiga cara, yaitu melalui Pemilu, pemilihan bertingkat, dan melalui pengangkatan atau penunjukan.

Lebih jelasnya, cara pengisian keanggota

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MPR melalui Pemilu dilaksanakan untuk mengisi sebagian kursi di DPR, yang keanggotaannya berasal dari organisasi peserta Pemilu. Sedangkan sebagian lagi cara pengisian anggota DPR dilakukan dengan cara pengangkatan. Cara pengisian melalui pemilihan bertingkat dilakukan untuk mengisi sebagian anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah. Anggota MPR dari Utusan Daerah dipilih oleh DPRD Tingkat I, sedangkan pengisian keanggotaan DPRD dilakukan melalui Pemilu.

Cara pengisian melalui pengangkatan atau penunjukan dilakukan baik untuk mengisi sebagian kursi di DPR yang anggota berasal dari Golkar ABRI, maupun untuk mengisi sebagian kursi di MPR dari Golkar ABRI. Pengangkatan atau penunjukan juga dilaksanakan untuk pengisian anggota-anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah serta seluruh Utusan Golongan-Golongan.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-Utusan dari Daerah, Golongan Politik, dan Golongan Karya (Pasal 1 ayat 1).

Komposisi keanggotaannya kemudian dijabarkan lebih luas, yaitu: a). Utusan Daerah termasuk Gubernur /Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1; b). Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilihan umum (organisasi Golongan Politik/Karya yang ikut pemilihan umum tetapi tidak mendapat wakil di DPR dijamin satu utusan di MPR yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan); c). Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan.

Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata. Sedangkan untuk anggota tambahan MPR dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa presiden. Hal ini tentu menyimpang dari makna Pasal 2 Penjelasan UUD 1945 tentang Utusan Golongan.

Singkatnya, dalam praktik, masa pemerintahan Orde Baru, Utusan Golongan untuk memperbesar dukungan politik kepada penguasa. Cara pengisian utusan golongan mudah menimbulkan kolusi politik antara golongan yang diangkat dengan presiden sebagai pihak yang mengangkat. Bahkan, regulasi yang ada memberi wewenang kepada presiden mengangkat Utusan Golongan, yang pada gilirannya membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Presiden hanya akan mengangkat golongan yang menyokong presiden atau politik presiden.

Pada awal reformasi, sebelum amandemen UUD 1945, MPR hasil pemilihan umum tahun 1999 masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Utusan Daerah adalah tokoh masyarakat yang dianggap dapat membawa kepentingan rakyat di daerahnya, dan dipilih oleh DPRD I untuk menjadi anggota MPR mewakili daerahnya.

Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proporsional di DPR. Utusan Golongan terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, perintis kemerdekaan, lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa, golongan perempuan, Pegawai Negeri Sipil, etnis minoritas, dan penyandang cacat.

Pengisian Utusan golongan tersebut berdasarkan usulan dari masing-masing golongan, dan pengangkatannya tidak ada keterlibatan Presiden. Utusan golongan di sini hanya menjadi salah satu unsur Anggota MPR bukan membangun kamar baru parlemen. Hal ini sebagaimana tampak pada periode 1999 – 2004.

Pada akhirnya, susunan keanggotaan MPR pun berubah setelah amandemen UUD 1945. Komposisi MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dalam komposisi keanggotaan MPR, tidak ada lagi unsur golongan fungsional, yang ada hanya keanggotaan yang mencerminkan perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan daerah (*regional representation*).

Dengan demikian, keanggotaan MPR sejak Pemilu 2004 terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, untuk anggota MPR dari unsur Utusan Golongan telah ditiadakan sama sekali. Anggota MPR semuanya dipilih oleh rakyat dengan komposisi terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. ❑

BSC/dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Wakil Ketua MPR RI

MPR Masih Mengkaji Wacana Utusan Golongan

PADA saat Pimpinan MPR bertemu dengan para tokoh bangsa dalam Silaturahim Kebangsaan, MPR menerima berbagai aspirasi, salah satunya aspirasi untuk menghidupkan kembali Utusan Golongan. Aspirasi ini pernah disampaikan PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Para tokoh bangsa melihat bahwa unsur Utusan Golongan patut dipertimbangkan untuk hadir kembali dalam keanggotaan MPR RI

Memang, setelah empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pada tahun 1999 hingga 2002, terjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk perubahan sistem dan lembaga perwakilan politik di Parlemen, khususnya di lembaga MPR RI. Sebelum amandemen UUD, keanggotaan MPR RI terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Setelah amandemen UUD, keanggotaan MPR RI hanya terdiri dari anggota DPR RI sebagai representasi partai politik, dan anggota DPD RI sebagai representasi kepentingan daerah. Sedangkan Utusan Golongan dihapuskan.

Dengan kehadiran Utusan Golongan maka akan menjadikan MPR RI sebagai lembaga perwakilan yang inklusif, yang mengikutsertakan seluruh unsur dalam masyarakat Indonesia yang plural. Kehadiran Utusan Golongan juga membuat kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik dan daerah bisa terakomodir. Termasuk golongan yang karena aturan undang-undang, hak pilih dan/atau hak dipilihnya ditiadakan.

MPR berencana akan melakukan kajian untuk mengembalikan Utusan Golongan ke dalam tubuh MPR periode selanjutnya. Nantinya, pengkajian wacana pengembalian Utusan Golongan juga dilakukan oleh Forum Aspirasi Konstitusi yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie. Lalu, hasil kajian Forum Aspirasi Konstitusi akan dijadikan rekomendasi untuk MPR periode selanjutnya.

Untuk mengetahui lebih jauh wacana untuk mengembalikan Utusan Golongan ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Berikut wawancara Majelis dengan Fadel Muhammad yang juga senator dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di sela-sela kunjungan kerja di Gorontalo beberapa waktu lalu. Petikannya.

MPR menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan Utusan Golongan kembali masuk dalam keanggotaan MPR. Aspirasi ini pernah disampaikan PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Bagaimana menurut pendapat Bapak?

Begini, Indonesia adalah negara besar dengan berbagai keragaman rakyat di dalamnya. Keberagaman itu bermacam-macam. Ada keberagaman fisik, suku, budaya, selain itu ada keberagaman pemikiran dan pendapat. Termasuk wacana Utusan Golongan ini. Itu adalah hasil pemikiran sebagian elemen masyarakat yang harus dihormati pendapatnya.

Di Lembaga Pengkajian MPR, hal ini sudah dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan memang munculnya kembali Utusan Golongan di MPR menjadi salah satu aspirasi masyarakat.

Dari berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, muncul pemikiran agar tokoh-tokoh nasional atau daerah yang memang layak untuk duduk di perlemen dan tidak harus dipilih melalui Pemilu, dimunculkan kembali dan ditempatkan di parlemen sebagai Utusan Golongan.

Beberapa kali diskusi soal wacana ini di Jakarta, wacana ini juga sering dibahas. Kami di MPR berpikir boleh juga dimunculkan karena memang baik dan sesuai dengan implementasi Bhinneka Tunggal Ika menjadi lebih sempurna.

Apa urgensinya memasukkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI. Bukankah ini bisa menjadikan MPR kembali seperti sebelum reformasi? Sebagai lembaga tertinggi negara?

Sekali lagi, ini baru sebatas wacana yang berkembang di masyarakat dan kajian tentang itu sedang berjalan. MPR menangkap aspirasi dan keinginan masyarakat dan menurut kami baik ya sudah boleh saja. Jika hal ini makin berkembang dan rakyat melihatnya sebagai satu yang sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara maka tinggal dicari proseduralnya yang sesuai dengan konstitusi dan aturan yang ada.

Melihat sistem ketatanegaraan dan kondisi sosial politik saat ini, apakah menghadirkan kembali Utusan Golongan di MPR bisa diwujudkan/ direalisasikan?

Bisa saja jika rakyat menghendaki dan saluran untuk mewujudkan itu ada. Namun, memang wacana ini perlu dibicarakan secara lebih matang. Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah berubah sejak reformasi bergulir, di mana Utusan Golongan tidak ada lalu muncul Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Yang menjadi pertanyaan adalah jangan sampai Utusan Golongan jika masuk dalam keanggotaan di MPR malah berbenturan dengan DPD.

Bagaimana untuk merealisasikan Utusan Golongan kembali masuk dalam keanggotaan MPR? Apakah perlu amandemen UUD NRI Tahun 1945?

Menurut saya, MPR yang harus melaksanakan langkah-langkah untuk merealisasikan Utusan Golongan itu. Namun, MPR periode ini sudah sepakat tak akan melakukan amandemen UUD 1945, sedangkan pengembalian utusan golongan ke MPR memerlukan amandemen. Hal-hal inilah yang memerlukan kajian mendalam dan pembahasan lebih serius.

Bagaimana teknisnya atau siapa yang menentukan kriteria Golongan yang bisa masuk dalam keanggotaan MPR? Dipilih melalui Pemilu atau ditunjuk?

Sebelum reformasi Utusan Golongan diusulkan oleh golongannya masing masing kepada DPR untuk ditetapkan. Tata cara penetapan Anggota MPR Utusan Golongan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Apakah dipakai yang seperti ini atau ada mekanisme yang lain, inilah yang menjadi pembahasan selanjutnya, mekanisme penunjukannya oleh siapa? Apakah oleh pemerintah daerah atau DPRD, kalau melalui Pemilu semestinya menurut saya tidak. Tapi kita lihat perkembangannya ke depan.

Untuk merealisasikan Utusan Golongan masuk dalam keanggotaan MPR RI tidak mungkin dalam waktu dekat, sehingga bisa diwujudkan pada keanggotaan setelah Pemilu 2024, atau pada Pemilu 2029. Jadi masih butuh waktu lama?

Ya, masih akan panjang wacana ini sampai terealisasi itu juga baru kemungkinan. Banyak sekali yang masih simpang siur yang harus dibahas dan disepakati dengan benar. Seperti mau ditaruh di mana Utusan Golongan ini, apakah digabung bersama DPD atau berdiri sendiri, intinya masih akan panjang ini.

Prinsip kehati-hatian dan kesempurnaan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan wacana Utusan Golongan ini, supaya tidak ada polemik baru yang berpotensi memecah kesatuan antaranak bangsa sehingga ke depannya bisa berjalan lancar.

Apa harapan Bapak bila Utusan Golongan ini bisa direalisasikan masuk dalam keanggotaan MPR RI?

Kita lihat saja. Begini, saya pernah menjadi Utusan Golongan di MPR sebelum era reformasi mewakili Sulawesi Tengah, karena Gorontalo belum ada pada waktu itu dan yang memilih itu Presiden RI saat itu Soeharto atas beberapa nama usulan Pemda. Dan, dalam kiprahnya di parlemen, Utusan Golongan juga sangat berkualitas bagus-bagus dan pintar-pintar.

Saya harap, wacana Utusan Golongan ini harus dipertajam dan dimatangkan. Utusan Golongan ini harus menjadi pertimbangan untuk diwujudkan untuk masa depan Indonesia. Tentu, semua hal-hal yang dimunculkan, termasuk Utusan Golongan, tentu saja berujung kepada semuanya demi kepentingan dan kemaslahatan bangsa dan negara. ❑

Temu Tokoh Nasional

Perempuan Punya Legitimasi Kuat

Wujudkan Indonesia Jadi Bangsa yang Besar

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perempuan sebagai Ibu bangsa memiliki legitimasi untuk berperan lebih besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bersatu.

PEREMPUAN di dalam keluarga jelas memiliki peran sentral, tetapi mengapa kekuatan alami itu belum berhasil dibawa ke sektor formal. Kita perlu mendorong perempuan masuk dalam sistem dalam proses pembangunan bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka acara Temu Tokoh Nasional MPR RI bertema Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Memperkuat Kebangsaan, di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis (24/11).

Acara Temu Tokoh yang diselenggarakan di sela penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, itu dihadiri, antara lain: Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Lubis, Lc,M.A., (Rektor UIN Jakarta), Dr (H.C) KH. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama 2014-2019), KH. Nuruddin Amin (Wakil Ketua DPRD Kab. Jepara), dan Dr. Suyoto,M.Si., (Bupati Bojonegoro 2008-2018).

Saat ini, ujar Lestari, banyak permasalahan bangsa yang harus kita hadapi. Melalui pelaksanaan KUPI II ini para perempuan diharapkan ikut aktif memengaruhi kebijakan dalam upaya menjawab berbagai tantangan itu. "KUPI adalah salah satu kekuatan yang luar biasa yang bisa mewujudkan peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik," ujar Rerie, sapaan Lestari Moerdijat.

Jadi, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, apa pun partai dan golongannya para perempuan harus membuka kesempatan seluas-luasnya agar mampu melakukan perubahan dari dalam sistem ketatanegaraan yang kita jalankan.

Apalagi, ujar Rerie, saat pandemi kita dipacu untuk melakukan banyak perubahan. Sebelumnya, bangsa ini juga menghadapi lompatan-lompatan teknologi yang belum sepenuhnya bisa kita antisipasi sejumlah dampaknya.

Pada kesempatan itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, itu juga mengingatkan para hadirin tentang pentingnya Empat Pilar MPR, seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian.

Keempat konsensus kebangsaan itu, jelas Rerie, harus menjadi nafas setiap anak bangsa, termasuk para anggota KUPI, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rerie berharap, di era ini para anggota KUPI dapat berperan dalam mengisi pembangunan dan mampu menjadi agen pemersatu bangsa. Apalagi, ujarnya, tantangan global seperti resesi ekonomi dan pemikiran-pemikiran besar yang mendorong gerakan ekstrim kiri maupun kanan berpotensi mengancam bangsa.

"Kita harus bersatu untuk menangkal para anasir yang membawa berbagai ancaman tersebut ke tanah air. Saya yakin para anggota KUPI mampu mendidik anak bangsa untuk mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan bersatu," pungkasnya. ❑

Gelar Pahlawan Nasional untuk KH. Ahmad Sanusi

HNW: Mestinya Semua Anggota BPUPK Dianugrahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para tokoh yang terbukti berjasa karena perjuangan mereka untuk Indonesia Merdeka memang wajar diapresiasi, selain sebagai bukti etika berbangsa juga sebagai pembelajaran sejarah bagi generasi muda penerus dan pengisi Indonesia Merdeka

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

INI hari yang sangat membahagiakan karena anggota BPUPK, yang juga tokoh umat Islam, pendiri ormas PUI (Persatuan Umat Islam), telah diberi anugerah oleh Pemerintah sebagai Pahlawan Nasional," ujar Wakil Ketua MPR, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., (HNW) dalam sambutannya pada acara Tasyakur Bi Ni'mah atas Penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional KH. Ahmad Sanusi, di Jakarta, 7 November 2022.

Ahmad Sanusi adalah ulama pejuang, salah satu pendiri Ormas Persatuan Umat Islam (PUI). Pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 18 September 1889, itu adalah anggota BPUPK. Dalam catatan sejarah, beliau yang usulkan bentuk Republik dan Kesatuan untuk Negara Indonesia Merdeka. Beliau juga pernah menjadi anggota KNIP, Dewan Penasihat Daerah Bogor, Wakil Residen Bogor, membentuk PETA, BKR, KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Kotapraja Sukabumi, dan diangkat sebagai pengurus Jawa Hokokai.

Penganugrahan gelar Pahlawan Nasional pada Ahmad Sanusi, menurut HNW. menunjukkan bahwa negara telah melaksanakan apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Soekarno, 'Jas Merah' alias jangan sekali-kali melupakan sejarah. "Tetapi, selain Jas Merah, juga penting 'Jas Hijau,' yakni jangan sekali-kali menghilangkah Jasa ulama, umara, dan umat," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

HNW mengingatkan soal itu karena masih banyak anggota BPUPK, maupun pejuang yang berjasa untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, baik dari kalangan anggota BPUPK, maupun ulama, umara, dan umat yang layak mendapat gelar pahlawan nasional, namun hingga saat ini belum diberi anugrah gelar pahlawan nasional. "Padahal mereka berjasa dan terlibat langsung dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Termasuk diantaranya adalah Mr Syamsuddin, anggota BPUPK yang juga pendiri Ormas PUI (Persetuan Umat Islam)," tegasnya.

Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu, lebih lanjut menyatakan, dengan diangkatnya KH Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional menunjukkan semakin banyak tokoh Islam yang diakui negara sebagai pahlawan nasional. Pemaknaan ini diperlukan untuk mengoreksi kesalahpahaman sejarah, serta untuk semakin menghadirkan pembuktian bahwa umat Islam dari dahulu memang mempunyai jasa besar bagi hadirnya bangsa dan negara Indonesia Merdeka.

Pemberian anugrah gelar Pahlawan Nasional kepada KH. Ahmad Sanusi menunjukkan bukti banyaknya tokoh Ormas Islam, selain dari orpol Islam, yang bersama dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya, berjasa hadirkan Indonesia Merdeka. Selain tokoh dari Muhammadiyah dan NU, ada juga tokoh dari PUI.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada para tokoh yang terbukti berjasa karena perjuangan mereka untuk Indonesia Merdeka memang wajar diapresiasi, selain sebagai bukti etika berbangsa juga sebagai pembelajaran sejarah bagi generasi muda penerus dan pengisi Indonesia Merdeka. Karenanya mestinya penganugrahan gelar pahlawan nasional itu bukan dibatasi per tahunnya hanya beberapa orang dengan mempertimbangkan usulan daerah dan ragam latar belakang daerah. Mestinya, yang diprioritaskan mendapat anugrah gelar Pahlawan Nasional adalah semua anggota BPUPK, Panitia 9, dan anggota PPKI dari semua latar belakang. Karena, menurut HNW, jasa mereka jelas, sukses hadirkan Indonesia Merdeka dengan Pancasila, UUD 45, serta NKRI dalam semangat bhinneka tunggal ika. Tapi banyak diantara mereka,

seperti Mr. Syamsudin, Mr. Maria Ulfah Santoso, H. Abikusno Cokrosuyoso dll., sampai hari ini belum mendapatkan pengakuan dari Negara dalam bentuk anugrah gelar Pahlawan Nasional.

HNW berharap, semoga tahun depan, tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Jokowi untuk menganugrahkan gelar Pahlawan Nasional kepada semua anggota BPUPK, Panitia 9 atau PPKI yang belum mendapatkan anugrah gelar Pahlawan Nasional, agar Negara memprioritaskan penganugrahan gelar Pahlawan Nasional untuk mereka. Itu akan jadi legacy positif dan sekaligus pembelajaran kenegarawanan untuk semua warga bangsa,"pungkasnya. ❑

HNW Menegaskan

TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., meluruskan kesalahpahaman yang beredar di sebagian media massa maupun group-group WhatsApp, seolah-olah TAP MPR terkait Larangan PKI telah dicabut. Padahal, sebenarnya TAP tersebut tidak dicabut, dan masih terus berlaku hingga saat ini.

KESALAHPAHAMAN ini muncul di sejumlah pemberitaan pasca Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dicabut. Sejumlah pemberitaan dan beberapa pihak menyebut bahwa TAP MPRS tersebut adalah TAP MPRS tentang peristiwa G30S/PKI. Padahal, TAP MPRS yang disebut Presiden Jokowi adalah tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno. Bukan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, leninisme. Karena antara TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 adalah dua TAP MPRS yang berbeda.

"Jadi, ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat, seakan bahwa TAP MPRS terkait dengan larangan PKI dicabut. Padahal, bukan, karena objek dari 2 TAP MPRS itu berbeda. Yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi adalah TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, sedangkan TAP MPRS yang melarang PKI adalah TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Dan, TAP MPRS yang terakhir itu tidak disinggung apalagi dinyatakan tidak berlaku oleh Presiden Jokowi, karena Presiden memang tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk mencabut atau menyatakan TAP MPRS sudah tidak berlaku lagi," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Untuk diketahui, judul lengkap TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 soal PKI itu adalah tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

"TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang melarang PKI itu masih berlaku, dan bahkan pemberlakuannya diperkuat dengan adanya berbagai ketentuan perundangan, seperti Pasal 107a sampai Pasal 107e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas dan Pasal 4 ayat (3) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," ujarnya.

HNW, sapaan akrabnya, juga meluruskan nukilan dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinilai kurang tepat terkait dengan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang disebut mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. "Nukilan atas pernyataan tersebut juga kurang tepat dan kurang cermat dalam membaca TAP MPR Nomor I/MPR/2003 sekalipun memang dihadirkan untuk meninjau TAP MPRS dari 1960 sampai dengan 2002," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menjelaskan, hasil tinjauan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 terhadap materi dan status hukum TAP MPR dan TAP MPRS sebelumnya dari rentang waktu 1960 – 2002 membuat beberapa kategori. Kategori pertama adalah TAP MPR(S) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Di dalam kategori pertama ini tidak ada TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang dinukil sebagai disebutkan oleh Presiden Jokowi. Jadi, apabila disebut bahwa TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dicabut oleh TAP MPR Nomor I/2003, itu tidak benar," ujarnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kategori kedua adalah TAP MPR(S) yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Salah satu yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan itu adalah TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang berkaitan dengan larangan PKI. TAP MPRS tersebut masih berlaku dan tidak dicabut. "Dan. bahkan TAP MPR ini dinyatakan tetap berlaku sebagai pedoman dalam kebijakan politik Nasional," jelasnya.

Selanjutnya, kategori ketiga adalah TAP MPR(S) yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004. Kategori keempat adalah TAP MPR(S) yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Kategori kelima adalah TAP MPR(S) yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Tata Tertib MPR hasil Pemilu 2004.

Sedangkan, kategori keenam adalah TAP MPR(S) yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena (i) bersifat einmalig (final), (ii) telah dicabut maupun (iii) telah selesai dilaksanakan. "Nah, TAP MPRS No. XXXIIII/MPRS/1967 masuk ke dalam kategori keenam ini bersama dengan 103 TAP MPR(S) lainnya," jelasnya.

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 masuk kategori keenam karena sifatnya yang einmalig (norma yang berlaku sekali dan setelah itu selesai), isinya berkaitan dengan pencabutan mandat Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI, yang peristiwanya telah terjadi, lewat dan berakhir. "Jadi bukan telah dicabut, karena memang tidak ada TAP pencabutannya, tetapi lebih karena sifatnya yang 'einmalig' (final) sehingga tidak diperlukan tindakan hukum lebih lanjut," ujarnya.

"Penjelasan ini untuk meluruskan kesalahpahaman saja, dan simpangsiurnya informasi, karena terlepas dari berbagai peristiwa yang melatarbelakanginya, kita bangsa Indonesia tentu sangat menghormati dan mengakui jasa besar Presiden Soekarno sebagai bapak Bangsa, proklamator kemerdekaan RI, dan presiden pertama Negara Republik Indonesia. Apalagi Presiden SBY pada tahun 2012 sudah mengeluarkan Keppres Nomor 83/TK/Tahun 2012 yang menganugerahkan kepada Presiden Soekarno gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional," pungkasnya. ❑

Peringatan Hari Pahlawan

Ahmad Basarah Ajak Generasi Muda Jadi 'Pahlawan Kebhinekaan'

Mengisi alam kemerdekaan dengan Bhinneka Tunggal Ika serta menjunjung tinggi toleransi di antara anak bangsa adalah bagian dari sikap kepahlawanan.

BERKAITAN dengan peringatan Hari Pahlawan 2022, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengajak generasi muda menjadi bagian dari pahlawan kebhinekaan di era 5.0 saat ini. Dia menilai kepahlawanan seseorang tidak hanya terbatas pada saat peperangan merebut kemerdekaan, tapi juga mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Mengisi alam kemerdekaan dengan Bhinneka Tunggal Ika serta menjunjung tinggi toleransi di antara anak bangsa adalah bagian dari sikap kepahlawanan.

"Tentu sangat berat merebut kemerdekaan dari penjajah, kita semua berutang jasa pada pahlawan bangsa. Tapi, mempertahankan dan merawat kemerdekaan juga bukan perkara mudah, khususnya di tengah banyaknya kepentingan anak bangsa saat ini yang banyak mengedepankan ego masing masing untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri,'' jelas Ahmad Basarah di Jakarta, Kamis (10/11/22).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, esensi terpenting dalam peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November adalah menggali untuk kemudian mentransfor-

masikan spirit nasionalisme dan patriotisme yang diwariskan para pahlawan bangsa kepada generasi selanjutnya. ''Dengan demikian kita benar-benar dapat menangkap api kepahlawanan para pendahulu bangsa,'' tegas Ahmad Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, dari banyak nilai dan spirit kepahlawanan yang harus ditiru generasi saat ini adalah bagaimana para pahlawan bangsa menjunjung tinggi toleransi setiap kali mengambil keputusan bersama saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Toleransi yang besar telah mereka perlihatkan dalam Kongres Pemuda II pada 27 - 28 Oktober 1928, yang di dalamnya tirani mayoritas ditiadakan dan eksistensi minoritas dihargai lewat kesepakatan ikrar Sumpah Pemuda bahwa mereka bersatu dalam konsep tanah air, bangsa, dan bahasa.

Contoh lain, Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Semarang itu menunjuk momen historis perumusan Pancasila, terutama menyangkut sila pertama Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang awalnya berbunyi 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.'

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

''Seandainya para alim ulama pendiri bangsa Indonesia ngotot mempertahankan tujuh kata tersebut, mungkin Indonesia tidak sebesar sekarang ini. Indonesia akan terpecah-pecah berdasarkan suku, agama, dan ras. Mengapa saat ini kita tetap bersatu? Semua itu terjadi karena para pendiri bangsa kita berjiwa besar untuk menurunkan ego golongan masing masing, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi," tegas Ahmad Basarah.

Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia itu menambahkan, saat ini pahlawan-pahlawan kebhinekaan sangat dibutuhkan jika merujuk pada beberapa survei terkait posisi Indonesia dalam hal toleransi. Dalam rilis terbarunya, Juni 2022, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menyimpulkan, 30,16% mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah atau sangat rendah. Survei PPIM dilakukan di 92 perguruan tinggi di 34 provinsi mengenai toleransi di kalangan responden mahasiswa dan dosen dari kelompok Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan.

Sedangkan Survei International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menemukan kecenderungan eksklusif beragama pada sebagian generasi muda. Misalnya, 40% responden menyatakan setuju peraturan berpakaian di sekolah disesuaikan dengan mayoritas agama yang dianut para siswa. Dalam kategori kepemimpinan, mereka berpendapat agama pemimpin harus disesuaikan dengan agama mayoritas pemilih, hanya 19% responden yang menganggap pemeluk agama minoritas layak menjadi presiden.

Sementara itu, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) dalam survei nasional Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada 2021 menyimpulkan 36% responden menyatakan keberatan jika penganut agama lain membangun tempat ibadah meski sudah mengantongi izin, 25% responden enggan hidup bertetangga dengan pemeluk agama lain, dan 34% enggan jika masyarakat berbeda agama merayakan hari besar keagamaan mereka sendiri.

"Gejala-gejala inklusivisme seperti ini tentu merisaukan kita dan bisa menggerus kebhinekaan. Karena itu dibutuhkan kehadiran pahlawan-pahlawan kebhinekaan yang terus mengusung toleransi. Gerakan itu bisa dimulai dari diri sendiri, dilanjutkan keluarga, kemudian bergerak di kelompok sebaya sampai gerakan besar demi tujuan mempertahankan ideologi Pancasila dan NKRI," pungkas Ahmad Basarah. ❑

Stadion Kanjuruhan Malang

Yandri Susanto: Tragedi Kanjuruhan Harus Jadi yang Terakhir

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, meninggalkan duka mendalam. Peristiwa kelam itu harus menjadi kejadian terakhir, tidak boleh terulang lagi

WAKIL Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Kementerian Sosial menangani korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang pada (1/10/2022). Bukti kerja keras adalah gerak cepat dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang langsung datang ke Malang, begitu mendengar kerusuhan itu terjadi. Kemensos juga sangat cepat membuka posko pengaduan yang saat itu sangat dibutuhkan oleh keluarga korban yang terdampak kerusuhan Kanjuruhan.

"Kemensos juga tanggap dan cepat memberikan santunan kepada korban dan ahli waris keluarga terdampak kerusuhan Kanjuruhan. Dan, itu mambuat keresahan serta kekhawatiran sebagian anggota keluarga korban sedikit teratasi," kata Yandri Susanto.

Pernyataan itu disampaikan Yandri di tengah kesibukan mengikuti Kompetisi Bola Basket Imonoke Cup Tahun 2022, dalam menanggapi penanganan Kemensos setelah genap 42 hari, pasca kerusuhan Kanjuruhan. Imonoke Cup sendiri merupakan Kompetisi Bola Basket SMA dan Sederajat se-Malang Raya. Acara tersebut berlangsung di GOR Universitas Negeri Malang, Sabtu (12/11/2022).

Balajar dari pengalaman Kanjuruhan, menurut Yandri, antisipasi penanganan kerusuhan pada acara-acara yang mengundang kerumunan masa harus selalu dipersiapkan. Agar kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa tidak boleh terulang lagi. Apalagi mencapai 135 korban meninggal seperti pada kasus Kanjuruhan.

"Kanjuruhan harus menjadi kasus terakhir, tidak boleh terulang lagi. Saya sangat merasakan duka yang dalam, seperti warga bangsa Indonesia lainnya. Karena itu apapun kerumunannya harus dipastikan ada antisipasi yang dipersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi kerusuhan," tambah Yandri.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Antisipasi, menurut Yandri, juga harus dilakukan selama masa kampanye pileg dan pilpres jelang pemilu 2024. Karena kegiatan kampanye identik dengan acara musik, dan berpotensi menyulut kerusuhan. Karena itu, agar terhindar dari keributan, pada pileg dan pilpres nanti para calon perlu memikirkan model kampanye lain, tanpa melibatkan kerumunan. Seperti melalui medsos maupun daring.

Meski kasus Kanjuruhan menimbulkan luka mendalam, bagi Yandri, peristiwa tersebut juga meninggalkan satu khikmah yang tidak bisa dianggap remeh. Yaitu, munculnya rasa empati dan kesetiakawanan yang sangat besar. Bukan hanya dari masyarkat pecinta bola dan warga Malang semata, tetapi juga dari masyarakat umum dan dari seluruh bangsa Indonesia.

"Kita masih memiliki semangat gotong-royong. Buktinya, di mana-mana ditemukan aksi penggalangan dana untuk membantu para korban. Sayangnya, aksi-aksi penggalangan dana itu juga kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu, yang hendak mencari keuntungan sendiri," pungkas Yandri. ❑

Terima Telepon Ketua Parlemen Turki

Ketua MPR: Turki Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa Cianjur

Indonesia dan Turki, dua negara memiliki tingkat kerawanan bencana gempa cukup tinggi. Negara Turki rawan gempa karena berada di garis patahan Bumi, sementara Indonesia rawan gempa karena dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menerima telepon Ketua Parlemen Turki, Mustafa Sentop, yang menyampaikan duka cita atas musibah gempa dengan magnitudo 5,6 yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada Senin (21/11/22). Bamsoet juga menyampaikan duka cita atas musibah gempa dengan magnitudo 6,1 yang terjadi di Turki pada Rabu dini hari waktu Turki (23/11/22).

"Ketua Parlemen Turki, Mustafa Sentop, menyampaikan, Turki melalui Bulan Sabit Merah akan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa di Kabupaten Cianjur, dengan berkoordinasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak terkait lainnya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Turki terhadap Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa duka Indonesia juga menjadi duka bagi Turki," ujar Bamsoet usai menerima telepon dari Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop, di Jakarta, Rabu (23/11/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, BNPB melaporkan akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, hingga Selasa (22/11) pukul 17.00 WIB terdapat 268 jiwa korban meninggal dunia. Serta korban hilang mencapai 151 orang. Masyarakat yang mengungsi mencapai 58.362 orang, luka-luka 1.083 orang, serta kerusakan infrastruktur seperti rumah rusak berjumlah 22.198 unit. Sementara gempa di Turki menyebabkan 22 orang dilaporkan luka-luka, serta tidak menyebabkan korban meninggal dunia.

"Indonesia dan Turki merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi dalam hal bencana gempa. Turki menjadi salah satu negara paling rawan gempa karena berada di garis patahan Bumi. Sementara Indonesia, rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tidak salah jika Indonesia dan Turki saling meningkatkan kerjasama, baik dalam hal penanganan bencana gempa maupun dalam hal mengantisipasi potensi bencana gempa," jelas Bamsoet.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kerjasama Indonesia dengan Turki terhadap penanganan bencana sudah terjalin sejak lama, baik dari sisi pemerintahan maupun antarmasyarakat. Misalnya, pada tahun 2020 lalu, Muhammadiyah AID menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa ke Pemerintah Daerah Bornova, Izmir, Turki. Jauh sebelumnya pada tahun 2011 lalu, saat Turki diguncang gempa hebat dengan magnitudo 7,2, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan sebesar USD 1 juta atau sekitar Rp 8,93 miliar kepada Pemerintah Turki.

"Saat Indonesia menghadapi musibah gempa dengan magnitudo 7,7 di Paku pada tahun 2018 lalu, Turki juga mengirimkan bantuan melalui Bulan Sabit Merah Turki. Tidak hanya terhadap bencana gempa, pemerintah Turki juga mendukung Pemerintah RI dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dukungan tersebut berupa bantuan alat-alat kesehatan terdiri dari 50 set ventilator dan 600.000 box obat-obatan senilai lebih dari Rp 100 miliar," pungkas Bamsoet. ❏

Temu Pakar Ketua MPR dan F-AK

Menepis Potensi *Money Politic* pada Amandemen UUD

Isu money politic sempat muncul menyertai pelaksanaan amandemen UUD 1945. Tetapi isu politik uang itu segera dibantah oleh mereka yang terlibat dalam amandemen.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ISU POLITIK uang yang ditengarai mengiringi pelaksanaan empat tahap perubahan UUD 1945 dalam kurun 1999-2002 kembali mencuat pada acara Temu Pakar Ketua MPR dengan Forum Aspirasi Konstitusi (F-AK). Awalnya, Ketua PAH I MPR 2001-2004 Jakob Tobing mengaku, sedih karena isu money politic pada proses amandemen UUD 1945 di era reformasi itu menjadi liar, muncul sebagai berita utama di berbagai media. Padahal, selaku Ketua PAH I MPR, Jakob tidak pernah melihat, apalagi menikmati uang seperti yang digambarkan berbagai media hingga berkarung-karung jumlahnya.

Jakob yakin, anggota MPR yang saat itu melakukan tugasnya merancang perubahan konstitusi sudah bekerja dengan baik. Mereka melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sesuai amanat serta mandat yang diemban. Sama sekali tidak berfikir terkait spekulasi politik uang.

"Mana uangnya, saya tidak pernah lihat apalagi menyentuh. Padahal saat itu saya Ketua PAH I," kata Jakob sembari membentangkan kedua tangannya.

Sanggahan adanya praktek politik uang pada amandemen UUD 1945 disampaikan Jakob Tobing saat menjadi pembicara pada Forum Aspirasi Konstitusi, dengan tema "Evaluasi Konstitusi Guna Menjamin Efektivitas Penyelenggaraan Negara dan Pencapaian Tujuan Bernegara". Acara tersebut berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Rabu (30/11/2022). Acara itu dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua F-AK Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dan Sekretaris F-AK Dr. Abdul Kholik S.H., M.Si.

Ada empat narasumber yang menyampaikan makalahnya pada acara tersebut. Mereka adalah Ketua PAH I MPR 2001-2004 Jakob Tobing, Ketua MK periode 2013-2015 Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. Dr. Sofian Effendi, B.A., M.A., M.P.I.A., Ph.D., serta Sekjen Forum Purnawirawan TNI-Polri Letnan Jendral TNI (purn) Bambang Darmono.

Menurut Jakob, amandemen terhadap UUD 1945 murni dilakukan sesuai tuntutan reformasi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang terdapat dalam UUD 1945. Itu dilakukan, salah satunya memenuhi pesan Presiden Soekarno agar pada saatnya UUD 1945 dilakukan penyempurnaan, karena penyusunannya berjalan secara tergesa-gesa.

"Hanya bagian pembukaannya saja yang mendapat perhatian serius. Sementara yang lain tergesa-gesa, karena dibatasi waktu, supaya bisa disahkan pada 18 Agustus 1945," jelas Jakob.

Tuduhan Keji

Pendapat serupa disampaikan Ketua MK periode 2013-2015, Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH. Menurutnya, anggota MPR saat perubahan tidak seburuk yang disangkakan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak berorientasi dengan uang. Mereka juga kelompok orang-orang yang sangat bersahaja, dan untuk menjadi anggota legislatif tidak semahal sekarang

"Menuduh bahwa reformasi dan amandemen sebagai sebuah gerakan pengkhianatan karena iming-iming uang adalah perbuatan sangat keji. Nyatanya, saat itu tekanan rakyat melalui aksi demo terasa sangat kuat. Sehingga anggota MPR tidak punya pilihan lain, kecuali memenuhi tuntutan gerakan reformasi," ungkap Hamdan.

Hamdan Zoelva mengajak masyarakat membaca dan mempelajari sejarah dengan bijak. Menggunakan berbagai pertimbangan, dan tidak mudah mengkambinghitamkan kelompok-kelompok tertentu, yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Apakah kita harus membunuh rakyat yang menuntut reformasi, tentu tidak. Jadi, jangan menyalahkan reformasi dengan paradigma sekarang," tambahnya.

Menyangkut wacana kaji ulang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Hamdan berpendapat, itu adalah hal yang lumrah. Apalagi, sejak ditetapkan UUD NRI Tahun 1945, sudah berusia lebih dari 20 tahun. Jika rakyat menghendaki perubahan, seyogyanya MPR memenuhi keinginann tersebut.

"Bagaimanapun, UUD NRI Tahun 1945 itu sudah baik. Masalah muncul karena banyak UU tidak sesuai dengan UUD," pungkas.

Sebelumnya, saat menyampaikan pengantar diskusi, Ketua MPR Bambang Soesayo menegaskan, disisa periode 2019-2024, MPRRI menyimpan asa mengembalikan Haluan Pembangunan Negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), ke dalam sistem ketatanegaraan. Keinginan tersebut bukan semata kemauan MPR periode ini, tetapi rekomendasi dari pimpinan MPR sebelumnya, yaitu periode 2014-2019 dan periode 2009-2014.

Tetapi, mengembalikan Haluan Pembangunan Negara ke dalam sistem Ketatanegaraan melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat sulit. Bahkan ketika dicoba menggunakan konvensi ketatanegaraan melalui sidang paripurna, juga belum berhasil.

Padahal, Pokok-Pokok Haluan Negara dipentingkan untuk menjadi peta arah pembangunan. Agar, rencana pembangunan tidak hanya berpegangan pada visi misi presiden, gubernur, bupati dan walikota saat kampanye. Karena peta arah pembangunan yang berdasarkan visi misi saat kampanye menyebabkan banyak proyek tebengkalai. Tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

"Kita masih berikhtiar untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara di sisa MPR periode sekarang. Kalau tidak berhasil, minimal kita akan memberikan rekomendasi kepada MPR yang akan datang agar melakukan kajian mendalam terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan selama ini," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Sistem Demokrasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan Konstitusi, menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ini perlu dilakukan mengingat UUD NRI Tahun 1945 sudah berlaku lebih dari dua dasarwarsa. Karena itu, perlu dikaji sejauh mana efektivitasnya dalam penyelenggaraan dan pencapaian tujuan bernegara.

Apalagi, saat ini dunia berkembang semakin pesat. Muncul dunia maya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Batas-batas wilayah negara semakin kabur. Demikian pula mata uang yang berlaku di satu negara tertentu makin terpinggirkan. Juga aset yang tak terwujud semakin sering ditransaksikan.

"Perlu dikaji juga bagaimana pelaksanaan sistem demokrasi yang sudah berlangsung selama ini. Apakah kita pertahankan atau barangkali malah harus kembali kepada sistem demokrasi sesuai pemikiran para pendiri bangsa, sekalipun kita harus rela dinamakan mundur dari kemajuan demokrasi saat sekarang," pungkas Ketua DPR ke-20 ini. ❑

MBO

Kunjungan Kahfi BBC Motivator School

HNW : Para Politisi Juga Perlu Dapat Motivasi

Di tahun poilitik seperti sekarang, kehadiran motivator sangat dibutuhkan. Terutama motivator yang Meneladani visi misi Rasulullah SAW dan para Bapak Bangsa.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menerima kunjungan pengurus Kahfi BBC Motivator School, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9 kompleks MPR/DPR RI, Selasa (29/11/2022). Kehadiran delegasi Kahfi BBC Motivator School di kompleks Parlemen dipimpin pendirinya Dr. Tubagus Wahyudi, ST, MSi, MCHt. CHI.

Menyambut kehadiran tamunya, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kegiatan yang selama ini dilaksanakan Kahfi BBC Motivator School dalam memberikan motivasi ke berbagai kalangan masyarakat. Apalagi, kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa mengharap imbalan apapun. Dengan cara itu, diharapkan para motivator senantiasa mendapatkan petunjuk, sebagaimana janji Allah dalam Alquran Surat Yasin ayat 21.

Hidayat berharap, motivasi yang disampaikan Kahfi BBC Motivator School selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW., serta para Bapak Bangsa. Yaitu, motivasi yang bisa memperbaiki akhlak dan peradaban manusia di tengah berbagai tantangan dan kondisi yang genting. Juga bermanfaat dalam menjaga kiblat berbangsa dan bernegara. Mengurangi perpecahan, sikap saling caci dan membenci yang selama ini masih sering terjadi di masyarakat.

"Akan lebih baik jika motivasi yang disampaikan Kahfi BBC Motivator School bisa berkontribusi mendamaikan keanekaan dan keberagaman bangsa. Apalagi, hingga saat ini masih ada pihak-pihak tertentu yang berupaya melakukan pembelahan, saling caci, curiga-mencurigai, menyebar hoax, dan politik ancam-mengancam, hingga saling jegal," ungkap HNW, begitu Hidayat Nur Wahid biasa disapa.

Selain kepada masyarakat umum, menurut HNW, para politisi juga perlu mendapat motivasi. Agar mereka bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Selalu berbuat baik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri, kelompok, dan golongannya. Serta menjadi pengamal Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Banyak hal mendasar yang bisa dilakukan oleh para politisi. Jika mereka selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengikuti jejak Rasulullah dan para Bapak pendiri Bangsa sebagai pimpinan bangsa dan negara, niscaya kemajuan dan kesejahteraan serta keadilan bagi bangsa ini akan lebih mudah dicapai," kata Hidayat lagi.

Ronggo Warsito

Keberadaan motivator yang senantiasa menjaga jati diri dan merujuk pada pribadi Rasulullah SAW dan Bapak Bangsa, menurut Anggota DPR RI dapil Jakarta II yang meliputi

Jakarta Pusat, Selatan dan luar negeri, ini semakin dibutuhkan masyarakat. Yaitu, motivator yang bukan bisa mengkritik atau mencaci, tetapi juga bisa menyalakan pelita dan cahayanya mampu mencerahkan masyarakat. Seperti yang pernah diingatkan oleh Pujangga Jawa bernama Ronggo Warsito.

"*Saiki jamane jaman edan* (sekarang zamannya zaman gila). *Yen ora edan ora keduman* (kalau nggak gila nggak dapat bagian). *Sak bejo bejone wong kang edan* (seberuntung-beruntungnya orang yang gila itu), *isih bejo wong kang eling lan waspada* (masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada)," tambah HNW.

Pada kesempatan itu, HNW menerima baik keinginan Kahfi BBC Motivator School menjadikan dirinya sebagai pembina. Tetapi, Hidayat mengingatkan, masyarakat terlanjur mengenal dirinya sebagai politisi. Karena itu, patut dipertimbangkan, apakah sudah tepat menjadikannya sebagai "Orangtua" bagi Kahfi BBC Motivator School.

"Saya menerima keinginaan Kahfi BBC Motivator School sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi, saya bisa memberikan saran, nasihat, dan masukan kepada Kahfi BBC Motivator School sekalipun tidak menjadi "orangtua". Bahkan, pintu saya selalu terbuka, jika sewaktu-waktu mau berkunjung. Karena itu, mohon dipertimbangkan kembali baik buruknya," pungkas HNW.

Sebelumnya, kepada Wakil Ketua MPR, pendiri Kahfi BBC Motivator School Tubagus Wahyudi berterima kasih mau menerima kehadirannya untuk bersilaturahim. Pada kesempatan itu Tubagus meminta kesediaan Hidayat Nur Wahid menjadi Pembina Kahfi BBC Motivator School. Permintaan tersebut diiringi harapaan agar Hidayat senantiasa memberikan saran, nasihat dan masukan bagi perbaikan lembaga yang dipimpinnya. ❑

Delegasi Jakarta Islamic Centre

HNW: Islamic Center Juga untuk Majukan Peradaban Manusia

Setiap masjid sebenarnya juga merupakan "islamic center," karena sejak awal Nabi Muhammad SAW., membangun masjid, maka masjid merupakan pusat segala aktivitas dakwah, sosial, dan peradaban.

SELASA, 15 November 2022, Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid MA (HNW)., yang juga anggota Komisi VIII DPRRI, menerima Panitia Konferensi International Jakarta Islamic Center (KIJIC) di Ruang Kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Kehadiran delegasi yang dipimpin oleh H. Herlan Intapura SE., itu untuk mengundang HNW menjadi keynote speech pada konferensi internasioanal yang akan digelar pihak penyelenggara.

HNW menyatakan, meski Masjid Jakarta Islamic Centre mengalami musibah, kubahnya terbakar, namun mereka tetap menyelenggarakan acara internasional yang sudah diprogramkan. KIJIC digelar pada 22 dan 23 November. Dalam acara tersebut panitia mengundang islamic center -islamic center yang ada di Indonesia. Selain islamic center juga masjid raya, ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, juga diundang. Bahkan peserta dari Sudan, Turki, India, Jepang, dan Malaysia menyatakan siap hadir.

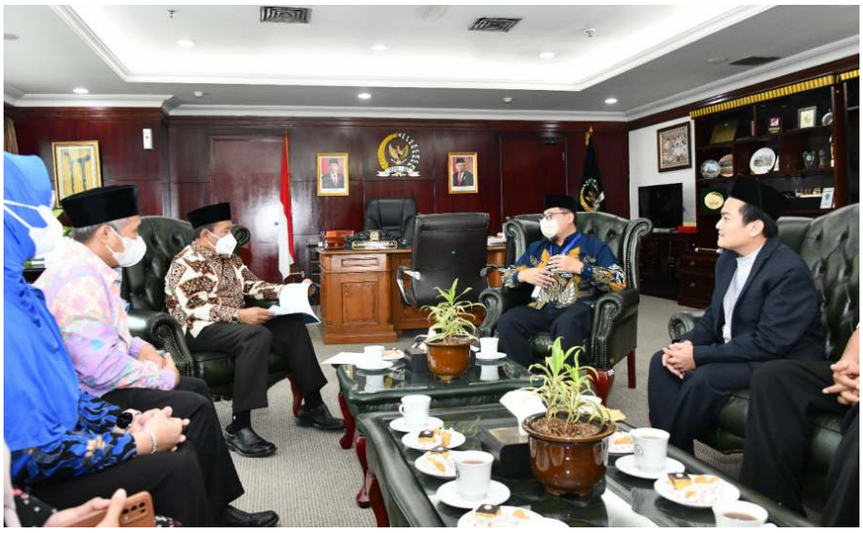

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kegiatan konferensi digelar di banyak tempat, selain di Masjid Raya Islamic Centre, juga di Masjid Istiqlal dan konferensinya di Hotel Mercure Ancol. Sebagai masjid besar dan islamic centre, Jakarta Islamic Centre tak hanya ingin menjadi pusat peribadatan tapi juga markas peradaban dan pusat kajian Islam.

Kehadiran panitia KIJIC disambut hangat oleh HNW. Dia mengungkapkan rasa keprihatinan atas musibah yang terjadi pada Masjid Jakarta Islamic Centre. Dan berharap, agar musibah itu jadi bahan instrospeksi. Ia juga mendukung agar Pemprov DKI segera

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

melakukan renovasi dengan menyediakan anggaran sebagaimana Premprov DKI bisa segera menyiapkan anggaran untuk program-program yang lainnya. Selama ini alumni Pondok Pesantren Gontor itu kerap berkunjung ke sana untuk mengisi berbagai kegiatan, termasuk khutbah Idul Adha 1444 H.

Dalam kesempatan itu, HNW juga mengapresiasi rencana penyelenggaraan KIJIC. "Mengapresiasi penyelenggaraan KIJIC yang baru kali pertama ini digelar. Semoga jadi sunnah hasanah, tradisi baik yang terus bisa dikembangkan, menjadi manfaat bagi Islamic Center dan kegiatan-kegiatannya, juga umat manusia sebagai mitranya", tuturnya.

Dikatakan, setiap masjid itu sebenarnya juga merupakan "islamic center". Karena sejak awal Nabi Muhammad SAW membangun masjid, maka masjid merupakan pusat segala aktivitas dakwah, sosial, dan peradaban. Sejak awal masjid menjadi pusat kegiata umat, menjadi Islamic Center, tidak hanya mengurus masalah ibadah, namun juga kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan segala hal yang menyangkut kehidupan umat Islam dan kemanusiaan juga bermula diatur dari masjid. Masjid menjadi center (pusat) kegiatan umat dan bangsa.

Islamic centre sendiri disebut fenomena baru yang ada di Barat. Di kota-kota besar Eropa dan Amerika dan di negara-negara di mana ummat Islam minoritas, disana Umar biasa mendirikan lembaga yang diberi label "islamic centre". "Sebab terminologinya baru, mempunyai daya tarik dan bobot. Selanjutnya istilah islamic centre sangat populer hingga juga dipakai di mana-mana termasuk di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti di Indonesia.

Pada hari yang sama, sebelum menerima panitia KIJIC, HNW juga menerima tamu dari Universitas Al Washliyah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kehadiran delegasi yang dipimpin oleh Razvi itu, untuk mengundang HNW hadir sebagai keynote speech dalam acara wisuda mahasiswa Universitas Al Washliyah. Wisuda sendiri digelar pada 13 Desember 2022.

Dalam dua pertemuan tersebut dibahas juga berbagai permasalah keumatan dan bangsa. Dan, HNW mengingatkan, pentingnya kolaborasi serta peran peradaban berkeunggulan dari Islamic-Islamic Center dan universitas-universitas Islam untuk koreksi Islamophobia, sekaligus sebagai bukti Islam yang memang rahmatan lil 'alamin dan kontribusi berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan umat dan bangsa," pungkasnya. ❑

Kebijakan Bank Tanah

Bamsoet: Kehadiran Bank Tanah Harus Menjadi Solusi Persoalan Agraria

Pada prinsipnya, kehadiran Bank Tanah harus menjadi bagian dari solusi untuk menjawab berbagai persoalan agraria, bukan menambah persoalan baru.

DI TENGAH masih peliknya persoalan mengenai pengelolaan tanah, kehadiran Bank Tanah yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah, turut menghadirkan polemik di ruang publik. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah, masih menyisakan opini pro dan kontra di tengah masyarakat.

Paparan di atas disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Delegasi, Kompleks MPR/ DPR/ DPD, Senayan, Jakarta, 1 Desember 2022. FGD yang terselenggara berkat kerja sama MPR dengan Brain Society Center (BSC) siang itu bertema: 'Kebijakan Bank Tanah dalam Perspektif Konsep dan Implementasi untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.'

Hadir dalam FGD ini, antara lain: Guru Besar Hukum Agraria, Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono; Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bogor, Prof. Dr. Endriatmo Sutarto; Ketua Dewan Pakar Brain Society Center (BSC), Prof. Dr. Didin S. Damanhuri; dan para narasumber seperti Prof. Dr. Endang Sutrisno, Dr. Irene Eka Sihombing, M. Ali Rahangiar, dan Notaris Osye Anggandari SH., MH.

Lebih lanjut, Bambang Soesatyo mengungkapkan, pandangan yang pro mengedepankan argumen bahwa pembentukan Bank Tanah memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat, sedangkan ketersediaan tanah semakin terbtas, harga tanah yang terus meningkat, belum optimalnya pemanfaatan tanah khususnya untuk kepentingan umum, dan masih maraknya praktik spekulan serta "penelantaran" tanah.

Pada banyak kasus, pembangunan infrastruktur publik yang didedikasikan untuk kepentingan umum dan bernilai strategis sering terkendala karena beberapa hambatan dalam penyediaan lahan, antara lain: ketidaksesuaian lokasi lahan, adanya resistensi atau penolakan dari warga masyarakat, ketidakjelasan hak atas tanah, penentuan besaran ganti rugi yang tidak menemui titik temu, munculnya spekulan, dan lain-lain. Ringkasnya, keberadaan Bank Tanah diperlukan sebagai instrument pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

Di sisi lain, pandangan yang kontra, menganggap kehadiran Bank Tanah dikhawatirkan hanya menjadi sebuah kemubaziran, dan akan tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang juga memiiki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.

Dikatakan oleh Politisi Partai Golkar itu, kehadiran Bank Tanah juga dipandang berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi penguasaan tanah masyarakat adat yang belum memiliki kepastian hukum, serta meningkatkan eskalasi konflik agraria. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencatat, pada tahun 2021 terdapat 13 laporan kasus perampasan wilayah adat dengan total luas 251 ribu hektar, dan berdampak pada 103 ribu jiwa.

Sebelummnya, Konsorsium Pembaruan Agraria juga mencatat, sepanjang tahun 2020, terjadi 241 kasus konflik agraria dengan korban terdampak sebanyak lebih dari 135 ribu kepala keluarga, termasuk korban kekerasan 169 orang di mana 11 orang di antaranya meninggal dunia. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2020, jumlah konflik agraria di tanah air mencapai angka 2.288 kasus.

Di samping itu, kehadiran Bank Tanah juga "dicurigai" sebagai bagian dari agenda liberalisasi tanah di Indonesia, di mana orientasi keadilan sosial dalam pengelolaan agraria, dikesampingkan oleh sahwat ekonomi dengan menjadikan tanah sebagai sebuah komoditas.

Ditegaskan oleh Ketua DPR ke-20 itu, pada prinsipnya, kehadiran Bank Tanah harus menjadi bagian dari solusi untuk menjawab berbagai persoalan agraria, dan bukan menambah persoalan baru. Perlu ada sinergi dan keseimbangan dalam pengelolaan agraria, baik sebagai penopang kebutuhan dasar rakyat, sebagai sumber perekonomian rakyat, maupun sebagai aset investasi pembangunan yang potensial.

"Saya juga perlu mengingatkan bahwa sebagai negara agraris, keberpihakan kita kepada kepentingan petani adalah sebuah keniscayaan, apalagi mengingat besarnya peran dan kontribusi sektor pertanian dalam menopang kedaulatan pangan," ujarnya. "Di sisi lain, seiring dinamika dan perkembangan zaman, pengelolaan agraria untuk menangkap peluang investasi yang dapat menopang pembangunan nasional harus bermuara pada sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat", tambahnya. ❑

Bertemu Pedagang Cibaduyut

Ahmad Muzani: Kalau UMKM Kuat, Ekonomi Sehat, Negara Mantap

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengingatkan, kita tidak boleh bosan dan lelah menggiatkan perekonomian rakyat, karena ini tanggung jawab kita memakmurkan kehidupan rakyat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKJEN Partai Gerindra, Ahmad Muzani, beraudiensi dengan ratusan pegiat UMKM Cibaduyut, di Gedung UPT Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2022). Pada kesempatan ini, Muzani menyampaikan pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian negara.

Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 65 juta di seluruh daerah. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar sebagai penopang perekonomian nasional. Oleh sebab itu, Muzani mengingatkan, pentingnya pemberdayaan UMKM oleh pemimpin bangsa di masa mendatang.

"Menhan Pak Prabowo Subianto mengatakan, memberi penguatan terhadap ekonomi rakyat harus menjadi cara pandang kita semua. Sebab, rakyat adalah tulang punggung negara dan sektor itu tercermin dari UMKM. Karena itu, geliat UMKM akan menentukan bagi pertumbuhan perekonomian nasional," kata Muzani dalam pidatonya.

"Kita tidak boleh bosan dan lelah menggiatkan perekonomian rakyat, karena ini tanggung jawab kita memakmurkan kehidupan rakyat. Sebagai pemimpin komitmen itu harus terus ditegakkan. Tetap memakmurkan rakyat meskipun kita tahu besok akan kiamat," imbuh Muzani.

Bagaimana caranya, lanjut Muzani, yaitu yang kerja tetap kerja, yang dagang tetap jualan, yang petani tetap ke sawah, yang pedagang tetap ke pasar, dan yang pegawai tetap ke kantor. Karena, kata Muzani, hanya itu yang membuat rakyat kuat, ekonomi sehat, dan negara mantap.

Komitmen itu, menurut Muzani, harus menjadi dasar berpikir bagi setiap pemimpin. Jangan ada maksud mencapai popularitas hanya untuk sekadar konten viral yang hanya dimaksudkan untuk pencitraan. Ketulusan dan keikhlasan inilah yang diperlukan dalam tindakan dan keputusan para pemimpin.

"Kita tidak boleh menodai ketulusan dengan niat yang lain. Karena rakyat dan para pelaku UMKM untuk bisa pulih akibat Covid-19 yang diperlukan adalah sentuhan ketulusan, bukan pencitraan, termasuk UMKM Cibaduyut. Jadi, tidak ada kaitannya dengan survei yang rendah atau tinggi, biar rakyat yang menilai," jelas Wakil Ketua MPR itu.

"Karena itu, sekali lagi, Pak Prabowo mengingatkan saya, dalam mewujudkan kemakmuran rakyat tidak boleh terperangkap pencitraan, meskipun kita tahu besok akan kiamat," tambahnya.

Pandemi Covid-19 memberi dampak buruk terhadap sektor UMKM di seluruh Indonesia, termasuk UMKM Cibaduyut. Namun, kata Muzani, kita bersyukur karena sekarang sudah mulai pulih meskipun belum secara keseluruhan.

"Penguatan UMKM yang dilakukan semua pihak sudah berada di jalan yang benar. Tapi yang perlu dilakukan UMKM sekarang adalah

inovasi. Jika sebelumnya Ibu Bapak hanya berjualan offline, maka mulai sekarang harus mulai berjualan online," papar Muzani.

Selain Muzani, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid, turut mengisi acara tersebut. Sodik mengatakan, Insya Allah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan sektor UMKM.

"Ibu Bapak sekalian, apakah Ibu Bapak siap untuk mendukung Pak Prabowo agar sektor UMKM ke depan bisa terjamin kesejahteraan dan kemakmurannya?," tanya Sodik.

"Siap, kami bersedia mendukung Pak Prabowo," jawab hadirin UMKM yang hadir di lokasi.

Dalam kegiatan ini, puluhan pegiat UMKM menyampaikan keluh kesahnya terkait pendapatan mereka. Terutama, saat diterpa badai Covid-19 yang mengharuskan mereka untuk mengurangi produksi sampai memberhentikan pegawai. ❑

Haul ke-35 Mbah Noer Durya bin Sayyid

Ahmad Muzani: Pemimpin Politik Bersatu Bantu Masyarakat Terkena Bencana

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani berpesan, dalam pembangunan bangsa yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan dan kesatuan. Kegotong-royongan adalah kunci agar rakyat Indonesia bisa hidup damai dan sejahtera.

WAKIL Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, hadir dalam acara peringatan Haul ke-35 Mbah Noer Durya bin Sayyid di area pemakamannya pada Ahad (4/12/2022). Acara ini dihadiri ribuan Jamaah yang datang dari Tegal, Brebes, Pemalang, Purwekerto, dan juga para ulama serta habaib.

Sekjen Gerindra ini menyampaikan rasa syukur karena telah hadir di tengah-tengah ribuan jamaah yang menghadiri Haul Mbah Nur. Dia mengatakan, sosok Mbah Nur bin Sayyid patut menjadi teladan bagi setiap pemimpin bangsa. Keteladanan dan pengabdiannya untuk umat begitu ikhlas dilakukan tanpa ada pamrih. Ketulusannya dalam pengorbanan untuk bangsa dan negara sangat patut dicontoh.

"Mbah Nur bin Sayyid adalah sosok yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Beliau sama sekali tidak memikirkan dirinya dalam pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan agama. Sikap ini sangat patut kita tiru dan patut dicontoh oleh para pemimpin bangsa," kata Muzani.

Kemudian Muzani berpesan, dalam pembangunan bangsa yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan dan kesatuan. Kegotong-royongan adalah kunci agar rakyat Indonesia bisa hidup damai dan sejahtera.

"Saat ini bencana mulai terjadi di mana-mana. Lebih dari 80 ribu saudara-saudara kita di Cianjur yang mengungsi karena masih menanti rumah yang hancur karena gempa. Mereka hidup di tenda-tenda pengungsian. Karena itu, kita harus bersatu membantu saudara kita. Belum selesai Cianjur, gempa kembali terjadi di Garut yang getarannya dirasakan sampai Jakarta, Magelang, dan Bandung," jelas Wakil Ketua MPR itu.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Itu sebabnya, pada momen Haul Mbah Nur ini menjadi penting agar para pemimpin bangsa tetap memprioritaskan rakyat, meskipun saat ini sedang dalam proses dinamika pembahasan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024.

"Di tengah kesibukan para pemimpin politik mencari calon presiden tidak boleh lupa untuk tetap memikirkan rakyat. Karena itu, saya mengimbau kepada para pemimpin meskipun sekarang tahun politik, sudah ramai pembahasan calon presiden, tapi kita harus tetap bersatu membantu rakyat kita yang sedang kesulitan terkena musibah. Membantu masyarakat yang perlu pertolongan," ujar Muzani.

"Saya percaya persatuan yang kita jaga akan membawa bangsa kita menjadi kuat, menjadikan umat kita kuat, rakyat sejahtera, dan segera pulih dari bencana," tutup Muzani.

Turut hadir dalam acara ini Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Kemudian sejumlah anggota DPRD Provinsi Gerindra Jawa Tengah, jajaran pengurus DPD Gerindra Jawa Tengah, serta pengurus DPC Gerindra Tegal dan Pemalang. ❑

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Urgensi Jalan Tengah Perdamaian Dunia

KITA patut bermawas diri bahwa di tengah maraknya upaya berbagai entitas global dalam mewujudkan perdamaian dunia, kita justru dihadapkan pada fakta statistik bahwa indeks perdamaian global terus-menerus memburuk dan mengalami penurunan hingga 3,2% selama kurun waktu 14 tahun terakhir, sebagaimana terungkap dari rilis Institut Ekonomi dan Perdamaian (Institute for Economics and Peace).

Kita pun harus merenungkan kembali, apakah komunitas internasional sudah melangkah di jalan yang tepat dalam memperjuangkan keadilan global, ketika World Justice Project pada bulan Oktober 2022 mengungkapkan bahwa 61% dari 140 negara yang disurvei, tingkat kepatuhan terhadap supremasi hukum justru mengalami penurunan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kian melemah. Di sisi lain, keadilan global juga akan sulit diwujudkan, manakala kepatuhan terhadap norma dan hukum internasional masih menjadi isu yang diperdebatkan, dan dalam penerapan sanksinya pun masih menyisakan persepsi adanya perbedaaan standar.

Demikian pula halnya dengan upaya dunia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk dunia. Di tengah modernitas zaman yang terus melaju, yang ditopang oleh lompatan kemajuan teknologi, kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Juli 2022, sekitar 345 juta orang penduduk dunia saat ini dalam kondisi sangat kelaparan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa selama lebih dari 2 tahun pandemi Covid-19 telah menghantam perekonomian dunia, yang juga berdampak pada melemahnya tingkat kesejahteraan masyarakat global. Resesi ekonomi dan peningkatan angka pengangguran menjadi isu yang mengemuka di berbagai negara. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization) memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran global dapat mencapai 207 juta orang pada tahun 2022, di mana 73 juta di antaranya adalah kelompok usia muda.

Dengan adanya ketimpangan kemampuan setiap negara dalam mananggulangi dan memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19, yang diperburuk oleh dampak perubahan iklim, dan masih berlangsungnya konflik bersenjata yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan global, maka hampir dapat dipastikan angka kelaparan akut global, berpotensi terus mengalami peningkatan.

Di tengah gambaran paradoks dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat global, gagasan menjadikan Persaudaraan Insani dan Jalan Tengah sebagai pondasi dan titik tumpu, menemui urgensinya.

Pertama, Persaudaraan Insani, sebagaimana kita rujuk pada dokumen “Persaudaraan Insani untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama” (Human Fraternity for World Peace and Living Together) yang ditandatangani bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmed el-Tayeb pada tanggal 4 Februari 2019, adalah penegasan komitmen untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai krisis global, seperti konflik bersenjata / perang, penindasan, dan kemiskinan.

Dokumen ini mengedepankan pendekatan transendental untuk membangun semangat persahabatan dan persaudaraan antarumat manusia. Lebih jauh lagi, dokumen ini juga dapat kita maknai sebagai kritik atas realitas global, yang belum sepenuhnya sepadan dengan besarnya upaya kita untuk mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

Pokok pikiran yang menjiwai gagasan persaudaraan insani, di satu sisi mengisyaratkan urgensi untuk mengedepankan sikap dan perilaku yang berlandaskan pada kemurnian hati nurani, kepekaan sosial, moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, spirit persaudaraan insani juga meniscayakan untuk mereduksi dominasi perilaku individualistis dan materalialistis.

Apsek kedua, konsep Jalan Tengah. Jika kita tarik

benang merah dari setiap pemicu terjadinya krisis global, salah satunya adalah adanya gap, ketimpangan, dan ketidakseimbangan, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun politik. Kita merasakan betapa bumi tempat kita berpijak saat ini sudah semakin bertambah "tua". Kemampuan bumi untuk menopang kehidupan umat manusia semakin menurun, seiring dengan semakin menipisnya dukungan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kondisi ini diperburuk oleh krisis iklim dan kerusakan lingkungan, yang sebagian besar justru disebabkan oleh kelalaian kita sendiri.

Menurunnya daya dukung semesta terhadap kehidupan umat manusia berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk yang melaju dengan deret ukur. Tanggal 15 November 2022 yang lalu, PBB memproyeksikan bahwa jumlah penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 8 miliar jiwa. Ketimpangan kemampuan alam untuk menopang kehidupan penduduk dunia, jika tidak disikapi dengan benar, dapat memicu lahirnya konflik perebutan sumberdaya alam.

Dalam perspektif yang lebih luas, ketidakseimbangan ini juga tercermin dari derasnya arus liberalisasi dalam segenap aspek kehidupan, yang mendorong tuntutan pemenuhan hak, namun di sisi lain mengesampingkan pemenuhan kewajiban.

Gambaran lain, laju peradaban dan modernitas zaman yang ditopang oleh lompatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak diimbangi oleh peningkatan moralitas dan kebijaksanaan dalam implementasinya. Yang terjadi adalah penyalahgunaan kemajuan teknologi untuk mencederai dan melukai, bukan untuk mendorong kemajuan peradaban.

Berbagai gambaran ketidakseimbangan tadi meniscayakan hadirnya langkah terobosan. Di sinilah peran penting dari gagasan Jalan Tengah untuk mendorong terwujudnya keseimbangan tersebut, untuk meminimalisir, dan sekaligus menjadi solusi, atas terjadinya berbagai krisis global.

Kata kunci dari konsepsi Jalan Tengah adalah toleransi dan inklusivitas. Toleransi mendorong lahirnya sikap moderat dan tenggang rasa, bahwa keberagaman dalam budaya, agama, dan berbagai atribut primordialisme lainnya, tidak menghapus fitrah bahwa kita adalah satu saudara dalam kemanusiaan.

Gagasan Jalan Tengah juga harus dibangun oleh semangat inklusivitas, yang dapat merangkul semua kalangan. Tidak ada satu pun entitas global yang merasa tidak dilibatkan atau terwakili aspirasinya.

Komitmen Global

Setiap tanggal 21 September, lonceng perdamaian dibunyikan di markas PBB. Pada hari itu, aksi kekerasan ditiadakan, dan gencatan senjata diberlakukan. Merujuk pada kondisi dunia saat ini, semestinya lonceng perdamaian tersebut berdentang setiap hari.

Saat ini, ketika kita sedang mendorong komitmen global untuk menjaga semangat perdamaian, di belahan bumi yang lain, konflik bersenjata masih terus berkecamuk. Tidak hanya perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan ratusan ribu korban tewas dan puluhan juta warga mengungsi, melainkan juga di beberapa negara lainnya yang hingga saat ini masih berjibaku menghadapi konflik.

Di Yaman, sejak awal berlangsungnya konflik telah menyebabkan lebih dari 140.000 korban jiwa. Di Ethiopia, perang saudara menimbulkan lebih dari 9.000 kematian, bahkan menurut sumber lain, korban jiwa diperkirakan lebih dari 50.000 hingga September 2021. Di Afghanistan, pada tahun 2020 saja, jumlah korban jiwa akibat konflik bersenjata mencapai 30.936. Dan, di Myanmar, konflik bersenjata sepanjang tahun 2021 telah menyebabkan korban tewas sekitar 11.114 jiwa.

Di sinilah urgensi untuk menjadikan spirit Forum Perdamaian Dunia sebagai komitmen global. Perdamaian adalah konsep universal yang seharusnya begitu mudah untuk dipahami dalam berbagai bahasa. Perdamaian sama bernilainya, baik bagi kita yang bertekad untuk memperjuangkannya, maupun bagi mereka yang "sedang" melalaikannya.

Apa pun alasannya, perang hanya akan membawa kerugian, dan meninggalkan bekas luka dan trauma yang membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkannya. Kita juga tidak boleh melupakan, bahwa perang yang sesungguhnya harus kita menangkan, adalah perang melawan kemiskinan, kebodohan, ketertindasan, serta ketidak-adilan.

Perdamaian adalah keniscayaan bagi setiap komunitas internasional untuk dapat hidup berdampingan. Perdamaian adalah "titik temu" yang mengakomodir berbagai arus aspirasi dan kepentingan, karena dunia ini begitu kaya akan keberagaman, yang tidak mungkin dipaksakan untuk diseragamkan. Namun, kita juga menyadari sepenuhnya, bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang given. Perdamaian harus dihadirkan sebagai komitmen kolektif dan diwujudkan dalam langkah implementatif. ❑

Menghilangkan Semut di Layar Televisi

Dua November 2022 merupakan hari bersejarah bagi pertelevisian di Indonesia. Pada hari, bulan, dan tahun itu, pemerintah secara resmi mengalihkan siaran televisi dari analog ke siaran televisi digital. Banyak kelebihan dari teknologi digital, di antaranya adalah tidak adanya lagi noise atau bintik-bintik seperti semut sehingga tayangan, baik gambar maupun suara, akan lebih bagus dan jernih.

Meski demikian, peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 11/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6/2021 Mengenai Penyelenggaraan Penyiaran itu mengundang banyak keluhan dari para wakil rakyat, dan tentunya juga dari masyarakat. Kekurangnya dalam hal sosialisasi distribusi set top box yang tidak merata dan tak tepat sasaran, serta masalah teknis pemasangan set top box kerap terdengar keluahan di tengah masyarakat.

Lalu bagaimana proses dari itu semua? Berikut pendapat dari para wakil rakyat yang membidangi masalah itu di Komisi I DPR.

Meutya Hafid, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Perlu Sosialisasi ke Masyarakat

LEMBAGA penyiaran swasta diminta oleh Meutya Hafid untuk patuh pada aturan mengenai peralihan siaran televisi analog ke digital. Politisi Partai Golkar itu menyebut aturan yang ada mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam berita yang beredar di *dpr.go.id, 8/11/2022,* Meutya mengatakan, semua LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) harus patuh pada aturan, apalagi aturan ini turunan turunan dari undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja. Tidak ada alasan untuk menolak, karena digital itu keniscayaan.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menurut Meutya, kekurangan dalam proses harus dibenahi sambil jalan tanpa menunda lagi jadual era digital penyiaran di Tanah Air. Lebih lanjut disampaikan, Indonesia sudah terlambat jauh dari banyak negara di dunia, bahkan dari negara tetangga seperti Malaysia yang sudah ASO beberapa tahun lalu.

Dalam *web* itu, ia mengatakan, masyarakat juga berhak atas buah dari digitalisasi, yaitu keberagaman konten atau isi siaran. Komisi I berharap, televisi digital menghidupkan kreativitas, menciptakan lapangan kerja, khususnya di bidang penyiaran. Buah kedua dari digitalisasi adalah keberagaman kepemilikan, dengan digitalisasi penyiaran pemilik saluran televisi akan bertambah banyak. Artinya tidak dikuasai segelintiran orang besar saja, seperti saat ini.

Meski demikian, ia juga memberikan catatan kepada pemerintah agar transformasi tak mendapatkan kendala. Salah satu saran yang diusulkan adalah pemerintah harus melakukan sosialisasi besar-besaran, namun pemerintah juga punya PR, harus memastikan proses *analogue switch off* ini berjalan *smooth*. Artinya, sosialisasi kepada masyarakat harus masif daripada saat ini yang masih banyak belum paham transisi analog ke digital untuk penyiaran. Kemudian apa dampak dan apa pula yang perlu disiapkan.

Penyediaan *set top box* (semacam dekoder bagi yang TV-nya masih analog) harus tersedia di pasar dan bagi masyarakat miskin harus dipenuhi. Dengan demikian, saya harap seluruh LPS dapat menjalani jadual ASO ini dengan taat. ❑

AWG

Rudianto Tjen, Anggota MPR Fraksi PDIP

Distribusikan Set Top Box ke Masyarakat

RUDIANTO Tjen berharap, pendistribusian bantuan *set top box* secara gratis bisa benar-benar diterima oleh masyarakat kecil. Dengan *set top box* masyarakat bisa menikmati siaran televisi jauh lebih baik dari televisi analog, televisi digital yang sudah modern sehingga siaran akan sangat prima. Bisa dikatakan bahwa televisi digital sangat penting, karena ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan, pemberian *set top box* merupakan bentuk transformasi menuju masyarakat digital, seperti termuat di *Babelpos.id, 7/11/2022.*

Ia sangat mengapresasi dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan *set top box* untuk masyarakat secara gratis. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap mengakses layanan televisi digital dengan kualitas terbaik. Pemerintah luar biasa, betul-betul memerhatikan masyarakatnya. Kalau (mungkin) di negara lain mau *switch off analog* ke digital pemerintahnya tidak mikirin bagaimana rakyatnya, tetapi pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai berpikir ke sana sehingga Menteri Kominfo diperintahkan untuk memikirkan rakyat yang belum mampu menyediakan televisi digitalnya. Sehingga oleh Kominfo bersama Komisi I DPR RI, memutuskan mempersiapkan *set top box* untuk kita semua.

Lebih lanjut, dalam *web* itu, Rudianto bercerita bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah melaju dengan sangat cepat. Bagaimana interaksi satu sama lain dari zaman ke zaman semakin berkembang. Mulai dari komunikasi melalui surat hingga kini hanya cukup melalui *smartphone* yang hampir dimiliki oleh siapapun. Begitu juga dengan televisi yang dulu kala masih menggunakan televisi tabung dengan tampilan layar hitam putih.

Rudianto bangga bisa mengikuti perubahan yang begitu banyak. Tetapi dengan perkembangan zaman seperti ini, televisi analog sudah tidak bisa dipertahankan. Televisi analog ini sudah termasuk ketinggalan zaman, jadi mau tidak mau, televisi ini harus masuk ke era digital murni. Makanya itu pemerintah berencana secara bertahap akan men-switch off televisi analog. ❑

AWG

Eliza Marthen Kissya

Tinggalkan Kesenangan Demi Kelestarian Alam

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ELIZA Marthen Kissya (73) adalah satu dari sepuluh tokoh penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2022. Ini penghargaan Kalpataru yang dia terima, setelah penghargaan serupa diterimanya pada tahun 1985. Bedanya, kalau perhargaan Kalpataru pertama untuk kategori Penyelamat Lingkungan. Sedang penghargaan Kalpataru kedua untuk kategori Pembina L:ingkungan.

Sejatinya, Eliza Marthen tidak pernah mengharap penghargan apapun, termasuk Kalpataru. Karena aktivitas sosial yang dilakukan dikerjakan dengan ikhlas, tanpa berharap pamrih. Akan tetapi melihat dedikasi dan pengorbanannya selama 43 tahun menjaga serta melestarikan lingkungan sebagai Kepala Kewang (penjaga pranata hukum adat yang berperan menjaga kelestarian alam) Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, tak berlebihan jika ia mendapatkan penghargaan tersebut.

Tak mudah bagi pria kelahiran Haruku, Maluku Tengah, 12 Maret 1949, itu menggapai penghargaan Kalpataru. Eliza telah menjaga lingkungan hidup di Pulau Haruku yang luas wilayahnya hampir seluruh wilayah di Maluku, jauh sebelum penghargaan Kalpataru diberikan pertama kali pada 1980. Sejak berusia 30 tahun, Opa Eli — begitu ia biasa disapa — diberi tanggung jawab menjadi Kepala Kewang di Negeri Haruku. Tanggung jawab tersebut akan terus dipegang dan laksanakan hingga hembusan nafas terakhirnya.

Eliza berasal dari keluarga kepala Kewang. Pilihan hidup serta tanggung jawab meneruskan warisan leluhur itulah yang membuat Opa Eli rela tidak bersekolah, seperti teman sebayanya dulu. Padahal, ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil dan memiliki kemampuan ekonomi.

Namaun, Opa Eli hanya bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah rakyat (SR). Tetapi, Ia bisa membuktikan bahwa belajar itu tidak sebatas hanya di bangku sekolah. Alam juga bisa memberinya ilmu,

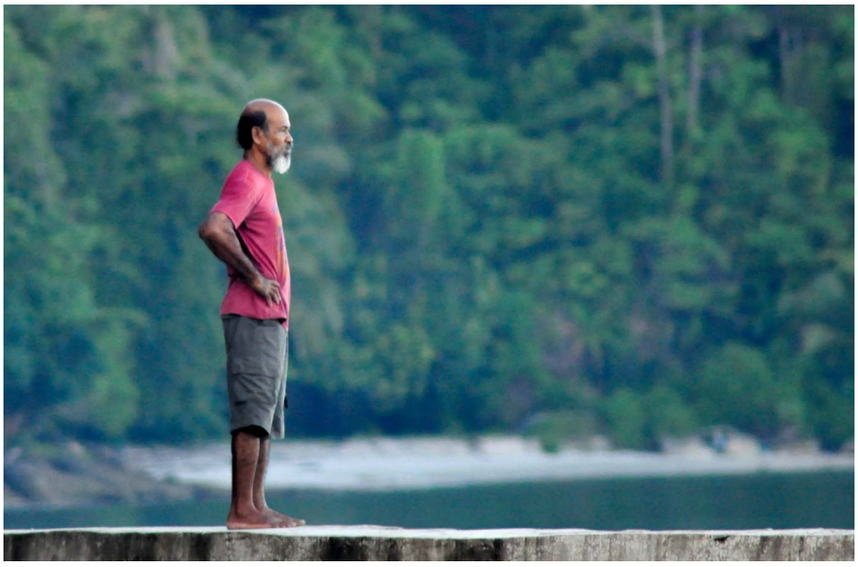

termasuk yang tidak diberikan di bangku pendidikan.

"Saya tidak sekolah meski bapak saya pegawai. Saya harus tetap tinggal di kampung untuk merawat ini (Kewang), sebagai peninggalan orang-orang tua," tegasnya.

Meski tidak mengenyam pendidikan formal, Eliza beruntung karena kerap mengikuti berbagai pelatihan. Seperti, Pendidikan Konservasi Alam oleh Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1987), Latihan Budidaya Perikanan di Politeknik Universitas Pattimura (1989), serta Latihan Analisa Dampak Lingkungan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Juga mengikuti studi banding Pertanian Lahan Kering di Flores (1992); dan Latihan Media Komunikasi Rakyat oleh SEARICE (1993).

Dalam kedudukannya sebagai pemangku atau kepala pelaksana adat alias Kewang Negeri Haruku, Eliza juga terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan regional. Antara lain, Pertemuan Nelayan se-Indonesia Timur di Lombok (1989,) Simposium Sumber Daya Hukum Lingkungan, serta Seminar Hukum Adat Kelautan di Universitas Pattimura, Ambon (1991).

Burung Maleo

Selama 43 tahun menjaga lingkungan, tentunya aktivitas Eliza selalu berhubungan dengan alam. Ia berupaya mempertahankan kelestarian menggunakan nilai-nilai kearifan lokal yang dinamakan Sasi. Sasi adalah larangan mengambil hasil daya alam di waktu tertentu. Larangan ini diberlakukan untuk menjaga pelestarian alam, mutu, dan keberlanjutannya.

Ada empat jenis Sasi di Negeri Haruku. Yakni, Sasi Hutan, Sasi Laut, Sasi Sungai, dan Sasi Negeri. Sasi Laut dihitung 200 meter dari pesisir pantai ke arah laut. Sasi Sungai yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan area sepanjang sungai. Sasi Hutan yang mencakup aturan-aturan pemanfaatan hutan. sedangkan Sasi Negeri mengatur tata cara hidup bermasyarakat. Ia yakin, itu merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga keharmonisan manusia dan alam.

"Inilah nilai jual Kewang Haruku. Jauh sebelum dunia bicara pembangunan berkelanjutan, adat kita sudah mengajarkan untuk setia menjaga alam dengan baik," katanya lagi.

Berkat perjuangannya itu, pada 1985 atau setelah sepuluh tahun mengemban tugas sebagai Kepala Kewang, masyarakat Desa Haruku menerima Kalptaru kategori Penyelamat Lingkungan. Penghargaan itu diperoleh tak lepas dari kontribusi Eliza. Setelah itu, Eliza juga mendapat penghargaan Satya Lencana (1999), Coastal Award (2010), serta penghargaan sebagai tokoh inspiratif dalam penanggulangan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana (2012).

Ia sadar, perjuangannya menjaga kelestarian alam harus diteruskan oleh generasi muda. Karena itu, ia juga berikhtiar untuk melahirkan generasi penerus Kewang di Haruku. Eliza mendidik lebih dari 100 orang muda untuk menjadi Kewang. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, termasuk anak-anak dan cucu-cucunya.

Selama menjadi Kewang, pria yang mahir memetik Ukelele ini juga telah melakukan pengembangbiakan berbagai satwa. Seperti penetasan burung Maleo, penetasan dan pelepasan penyu, pembibitan dan penanam-an bakau. serta menjaga tradisi Sasi Lompa atau larangan mengambil ikan lompa (Trisina Baelama). Dia juga membangun gedung pendidikan lingkungan, tempat pelatihan pertanian organik dan membangun perpustakaan. ❑

MBO

Setjen MPR Kembali Menerima Anugerah Meritokrasi

Ma'ruf Cahyono: Bukti, Reformasi Birokrasi di MPR Berjalan Baik

Untuk kedua kalinya Setjen MPR menerima Penghargaan Meritokrasi Tahun 2022, setelah tahun sebelumnya, 2021, Setjen MPR juga menerima penghargaan serupa.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR RI, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., menerima Penghargaan Meritokrasi Tahun 2022. Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) itu diserahkan oleh Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, di Jakarta, Kamis (8/12/2022). Anugerah Meritokrasi diberikan kepada kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan kategori baik dan sangat baik.

Penghargaan Meritokrasi Tahun 2022 yang diterima oleh Setjen MPR ini terasa istimewa, karena anugerah tersebut merupakan kali kedua diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR. Sebelumnya, 2021, Setjen MPR juga menerima penghargaan serupa.

Mengomentari keberhasilan tersebut, Ma'ruf Cahyono menyatakan, sangat berbahagia memperoleh apresiasi dari KASN tersebut. Menurut Ma'ruf, keberhasilan tersebut tak hanya sebagai wujud dari capaian prestasi, namun juga menjadi bukti keberhasilan Setjen MPR melaksanakan reformasi birokrasi.

"Ini bukti nyata bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan Setjen MPR, meliputi delapan area perubahan, mencapai hasil yang baik. Ke delapan area perubahan itu adalah: Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik," ungkap Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman ini.

Selain bukti keberhasilan Reformasi Birokrasi, anugerah Meritokrasi 2022, kata Ma'ruf, sebagai bentuk pengakuan bahwa SDM Setjen MPR yang "Berakhlak" sebagai nilai-nilai dasar ASN juga telah terwujud. Yaitu, SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Ma'ruf berharap, ke depan sistem pembinaan di lingkungan Setjen MPR akan semakin berkualitas. Melahirkan ASN yang semakin profesional, netral, mampu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, melalui teknologi informasi.

Penghargaan Meritokrasi ini, menurut Mas'ruf, adalah buah dari keberhasilan Reformasi Birokrasi, bukan target yang hendak dicapai. Karena, tujuan utama dari keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Anugerah ini juga pertanda bahwa MPR siap menjalankan tatalaksana pemerintahan sarwo (serba) elektronik. Membuang jauh-jauh penggunaan kertas dan mewujudkan sistem korespondensi berbasis digital," pungkasnya. ❑

Membangun Kota Ramah Sepeda

Amsterdam menjadi kota yang ramah bagi pengguna sepeda terbangun tidak secara serta merta. Selepas Perang Dunia II, kota-kota di negeri Belanda ingin merevitalisasi kotanya dengan kemodernan. Jalan yang lebar, luas, sehingga mobil bisa hilir mudik. Kebijakan yang demikian rupanya menjadi masalah bagi Amsterdam. Kota menjadi macet, ruwet, serta tingginya angka kecelakaan.

Agar terbebas dari masalah seperti itu, budaya naik sepeda yang sebelumnya sudah ada, diangkat kembali. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro bagi pengguna sepeda. Meski aspirasi lamban direspon, namun akhirnya pemerintah melakukan langkah-langkah besar dalam menata kota. Ribuan jalur sepeda dibangun, tempat parkir dibuat di mana-mana, dan dibuat pajak yang besar dan harga BBM yang mahal bagi pengguna mobil.

Kebijakan yang demikian membuat Amsterdam menjadi surga bagi pesepeda. Kota-kota di Eropa bahkan dunia pun ingin meniru langkah-langkah yang dilakukan.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BILA berada di kota-kota besar di Eropa, terutama di Amsterdam, terlihat di berbagai sudut jalan, apalagi di stasiun kereta atau halte bus, puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan sepeda terparkir. Sepeda-sepeda yang ada terparkir sangat rapat, di antaranya malah saling berhimpitan seolah-olah bila mau mengambil sepeda yang terparkir itu perlu menggunakan tenaga ekstra, sebab harus menggeser sepeda-sepeda yang lain.

Kali pertama ke Amsterdam, mungkin kita tercengang dengan fenomena di atas sebab sepeda di sini sepertinya sebagai sarana transportasi yang sudah mulai banyak ditinggalkan, tidak berharga, dan dianggap menguras tenaga bila menggunakan. Orang-orang di sini lebih memilih menggunakan sepeda motor bahkan mobil untuk menuju ke tempat kerja, pasar, sekolah, kampus, atau tempat-tempat yang lain. Menggunakan kenderaan bermotor dianggap lebih bergensi daripada naik sepeda.

Sepulang dari Amsterdam atau kota-kota di Eropa, pikiran kita bisa berubah. Sepeda yang di sini dianggap sebagai alat transportasi yang jarang digunakan, namun di negara maju masih menjadi bagian hidup keseharian. Tak hanya itu, banyak manfaat bila beraktivitas menggunakan sepeda, bukan hanya menjadikan sehat namun juga membuat polusi di kota menjadi rendah, murah, nyaman, dan aman bagi seluruh warga kota.

Amsterdam menjadi surga kaum pesepeda tidak serta merta terbentuk. Ia harus melalui perjuangan yang panjang, bahkan melawan kebijakan pembangunan kota yang dirasa tidak ramah bagi pesepeda. Berkat perjuangan yang ada, ditambah dengan kesadaran masyarakat, saat ini dari data yang ada menyebut jalur sepeda di negeri orange itu sudah mencapai sekitar 4.500 km dan 3.500 km diklasifikasi sebagai *long distance cycle route* (jalur jauh/panjang) yang memiliki panjang bervariasi, dari 40 km hingga 1.300 km. Jalur panjang itu disebut sebagai jalur untuk lomba *Tour the Netherlands*. Sumber lain menyebutkan, pada tahun 2017, jalur sepeda di sana sudah mencapai 35.000 km.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sebelum Amsterdam menjadi seperti saat ini, surga bagi pengguna sepeda, kota ini tak ubahnya seperti kota-kota di Eropa lainnya. Selepas Perang Dunia II, kota-kota di Eropa berbenah diri membangun ulang gedung-gedung yang rusak akibat terkena bom. Dalam pembangunan, konsep yang ada adalah bagaimana terbentang jalan yang lebar panjang serta tersedia pusat-pusat perekonomian. Pembangunan yang demikian rupanya membuat terjadinya lonjakan pengguna kendaraan roda empat atau mobil. Akibatnya, Amsterdam menjadi kota yang ruwet, tak karuan, dan banyak mobil parkir di pinggir jalan.

Akibat pembangunan yang belum memikirkan jalur sepeda, selang waktu tahun 1950 hingga 1970, jumlah kepemilikan mobil di Belanda melonjak drastis. Menurut data yang ada, jumlah mobil pada masa itu berada pada kisaran 100 ribu hingga 2,5 juta mobil. Kendaraan bermesin yang pada masa itu dikatakan modern rupanya menggerus jumlah pengguna sepeda. Pengguna sepeda yang awalnya mencapai 80% menjadi anjlok hingga tinggal 20%.

Jutaan mobil yang berlalu lalang di Belanda

rupanya banyak memunculkan masalah. Polusi pasti. Kepadatan lalu lintas iya. Masalah parkir merepotkan. Bagi pengguna mobil sendiri dibayang-bayangi naiknya harga BBM, apalagi ketika ada embargo minyak bumi. Dan, yang tak kalah menyedihkan adalah naiknya angka kecelakaan di jalan. Dari sumber *The Guardian* pada tahun 1971 di Amsterdam terjadi 3.300 kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Dari korban sebanyak itu, 400 korban adalah dari kalangan anak-anak.

Problem penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat dan banyaknya korban kecelakaan itulah yang membuat orang Belanda berpikir ulang tetang tata kota. Diawali saat sekelompok orang yang mengatasnamakan *Stop de Kindermood* (Hentikan Pembunuhan Terhadap Anak-Anak) melakukan unjuk rasa dengan cara *gowes* di jalan-jalan Amsterdam di saat jam kantor atau jam kerja. Di saat bersepeda mereka mengayuh dengan pelan sehingga membuat jengkel pengendara mobil yang berada di belakang mereka.

Pada masa itu sebenarnya juga ada masyarakat yang telah mengampanyekan hidup naik sepeda. Di saat orang-orang Belanda banyak menggunakan mobil, ada mahasiswa-mahasiswa luar kota, luar Amsterdam, yang dalam keseharian menggunakan sepeda untuk beraktivitas. Mereka melakukan hal yang demikan entah karena alasan ekonomi atau faktor yang lain. Apapun alasannya, kebiasaan yang mereka lakukan rupanya sangat bermanfaat, yakni tubuh mereka menjadi bugar. Kebiasaan ini rupanya menular kepada masyarakat yang lain. Ibu-ibu, anak sekolah, pekerja, hingga warga senior, juga melakukan hal yang sama, rajin bersepeda ke sekolah, kampus, pasar, dan kantor.

Dalam *kompas.id, 26 Februari 2022, Kota Sepeda Amsterdam Setelah 50 Tahun*, banyaknya korban akibat kecelakaan lalu lintas, direspon warga dengan melakukan aksi seperti di atas, juga dengan menutup lokasi-lokasi tertentu, mendengungkan penutupan jalan dari mobil agar anak-anak aman saat pergi dan pulang sekolah. Sayangnya, protes seperti itu oleh pemerintah hanya direspon dengan membangun *woonerf* atau 'polisi tidur' dengan tujuan untuk menahan laju kendaraan bermotor.

Membuat polisi tidur tidak mengatasi masalah di Amsterdam. Angka kecelakaan tetap tinggi dan kemacetan serta kesemrawutan kota tetap ada. Emosi masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap bebal terhadap tuntutan membuat mereka melakukan aksi besar-besaran menjelang Pemilu pada tahun 1978. Lewat aksi demonstrasi besar-besaran itu, mereka meminta politisi membangun kota yang mengutamakan jalur sepeda. Dari sinilah muncullah petisi *Amsterdam Fietst* atau Sepeda Amsterdam.

Meski orang-orang Belanda melakukan aksi besar-besaran, namun keinginan mereka baru terkabul empat tahun kemudian. Dalam *kompas.id* disebut secara prinsip, rencana ini meliputi dua pertiga dari semua jalan utama untuk jalur sepeda, menghubungkan jalur sepeda di semua ruas jalan utama maupun arteri hingga gang, mewujudkan kawasan-kawasan bebas mobil pribadi dengan menguatkan sistem transportasi publik dan fasilitas pejalan kaki juga pesepeda, serta menjadikan lahan parkir mobil sebagai ruang publik dan tempat untuk sepeda.

Setelah itu, sejak tahun 1982, hingga saat ini, Feddes dan rekannya menyatakan, rencana induk menjadikan Amsterdam dan kota-kota lain di Belanda menjadi ramah sepeda sudah 95% tercapai. Proses menjadi lebih baik dan berkelanjutan terus dilakukan. Dalam *web* disebutkan, Fred Feddes, Marjolein de Lange, dan Marco te Brömmelstroet dalam artikelnya "HardWork in Paradise: The contested making of Amsterdam as a cycling city" membawa pembaca kembali ke Belanda era tahun 1950-an, tak lama setelah Perang Dunia II usai. Artikel Feddes dan dua koleganya itu termasuk salah satu artikel dalam buku The Politics of Cycling Infrastructure: Spaces and (In)Equality (2020).

Dalam *dunia.tempo.co, 24 November 2018, Kenapa Orang Belanda Suka Bersepeda?* Dikatakan tingginya tingkat pengendara sepeda di Amsterdam karena berbagai kebijakan transportasi yang ramah sepeda. Kota ini menawarkan sistem jalur

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sepeda yang luas yang memungkinkan pengendara untuk memotong rambu lalu lintas dan memintas jalan.

Kebijakan yang ramah sepeda itu seperti fasilitas parkir sepeda terletak di seluruh kota, sementara parkir kendaraan di pusat kota sangat dibatasi. Sewa parkir kendaraan bermotor pun dikenakan tarif tinggi. Salah seorang warga Belanda, Buehler yang kerap naik mobil mengatakan, membutuhkan lima Euro untuk parkir dan menghabiskan waktu 10 menit lebih banyak daripada jika bersepeda.

Disebutkan dalam web itu, provinsi-provinsi di Belanda, daerah-daerah transportasi dan kotamadya ingin mengajukan anggaran 245 juta euro atau Rp 4 triliun agar semakin banyak orang menggunakan sepeda untuk bekerja. Menteri Urusan Infrastruktur, Stientje van Veldhoven, mengumumkan bahwa pemerintah menginvestasikan 100 juta euro atau Rp1,6 triliun untuk mempromosikan bersepeda.

Ditambahkan, tempat penampungan sepeda akan dibangun di Stasiun Pusat Amsterdam, Stasiun Pusat Rotterdam, dan Heerlen. 53 fasilitas parkir yang ada akan diperluas. Semua ini akan menghasilkan total 25 ribu tempat parkir sepeda baru.

Dalam *mongabay.co.id, di-negeri-belanda ke mana-mana-naik-sepeda-bagaimana-di-indonesia,* dituliskan, negeri Belanda memiliki luas wilayah 41.543 km2 (sekitar tujuh kali luas pulau Bali), dengan populasi penduduk berdasarkan sensus 2018 lebih kurang 17 juta jiwa. Menariknya, berdasarkan *Dutch Cycling Vision* (2018) ada 22 juta jumlah sepeda di seluruh Belanda, yang berarti lebih banyak dari total populasi penduduknya.

Jika ditarik angka rata-rata, maka akan ada 1,3 sepeda per penduduk. Artinya, setiap orang di Belanda paling tidak mempunyai satu sepeda. Menariknya, bersepeda bagi orang Belanda saat ini bukan lagi untuk 'gaya-gaya-an' tapi bagian dari budaya kehidupan sehari-hari.

Tumbuhnya kebiasaan bersepeda ini pun berkontribusi sangat signifikan pada peningkatan taraf hidup masyarakat, utamanya persoalan lingkungan hidup. Jika dibandingkan dengan produksi emisi berbagai jenis transportasi lain, bersepeda jelas menghasilkan jejak karbon yang jauh lebih minim.

Jejak emisi yang rendah tentu akan berpengaruh secara vital pada peningkatan kualitas udara. Berdasarkan penelitian, bersepeda hanya menghasilkan jejak karbon sekitar 21 gram karbon dioksida per kilometer.

Angka ini merupakan jumlah emisi yang sangat rendah, lebih rendah sepuluh kali lipat dari emisi yang dihasilkan dari berkendaraan energi fosil, yang bahkan masih lebih rendah daripada berjalan kaki atau naik bus. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Merancang Jakarta Ramah Sepeda

Di masa Anies Baswedan menjabat Gubernur Jakarta, program pembangunan jalur sepeda dan infrastruktur pendukungnya direalisasikan secara masif. Bentangan jalur sepeda semakin panjang. Sayang setelah era Anies berakhir, program itu dihapus.

BILA kita melintas di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, di salah satu titik yang ada, kita akan menemukan suatu landmark yang berbentuk lingkaran besar. Landmark itu disebut dengan Tugu Sepeda. Tugu yang saat ini kerap dijadikan tempat selfie atau berfoto itu dibangun oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai bukti, wujud, atau keberpihakan pemerintahan yang dipimpinnya kepada para pengguna sepeda. Harus diakui, Jakarta di bawah kepemimpinan alumni UGM itu masif melakukan pembangunan jalur sepeda dan infrastruktur pendukungnya.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Car Free Day yang dirintis oleh Gubernur Sutiyoso yang lintasan panjang mulai dari Tugu Air Mancur hingga Tugu Pemuda, sangat diminati oleh para pesepeda. Pada hari Ahad, ribuan pesepeda gowes di jalur ini dengan rasa aman, nyaman, dan lega karena tidak ada lalu lalang kendaraan bermotor serta di arena yang luas, lapang, dan lega.

Meski laluan di Sudirman dan Jl. Thamrin sebagai arena bersepeda, namun pada masa

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebelum Anies Baswedan belum ada jalur khusus buat pesepeda. Dari keinginan untuk membahagiakan warganya maka salah satu program yang dijalankan adalah menyediakan jalur sepeda. Banyak alasan yang dilakukan Anies untuk membangun jalur sepeda, selain untuk memfasilitasi pesepeda itu sendiri, di sana juga ada upaya untuk mengurangi polusi udara, kemacetan, serta menciptakan kesetaraan bagi semua warga.

Dari keinginan ini maka dibangunlah jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin. Jalur yang ada tidak hanya sekadar mengecat ruas di pinggir jalan, baik di jalur kanan dan kiri, namun di sana juga diletakkan pembatas-pembatas yang terbilang kokoh. Tak hanya itu, di garis-garis yang ada dipasang semacam lampu. Bila malam lampu-lampu yang terpasang berkedip sehingga menunjukkan itu jalur sepeda. Diharap dengan adanya bangunan pembatas dan lampu tadi selain untuk menyisir antara pengguna sepeda dan kendaraan bermotor, juga untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pesepeda di saat melintas terutama ketika jam-jam sibuk, bukan di saat *car free day* saja.

Langkah Anies tidak hanya menghamparkan ruas jalur sepeda, namun bagaimana infrastruktur yang ada juga mendukung kegiatan bersepeda. Bila di Eropa, pesepeda bisa menjangkau wilayah-wilayah jauh dengan menaikkan sepedanya di kereta, hal demikian juga diupayakan oleh pemerintah Jakarta. Dalam suatu kesempatan, Anies Baswedan membawa sepeda dan menuju ke Stasiun MRT. Apa yang dilakukan sebagai pesan bahwa transportasi umum menyediakan ruang untuk sepeda. Dengan cara seperti itu akan semakin banyak pengguna sepeda beraktivitas dengan cara sambung menyambung. Di satu saat ia menggunakan transportasi umum, di saat yang lain ia naik sepeda.

Di tempat-tempat umum seperti di sekitar Stasiun MRT, Halte Transjakarta, Stasiun Kereta, juga disediakan tempat-tempat parkir sepeda. Dengan cara seperti ini, masyarakat yang gemar bersepeda bisa menaruh tunggangannya sebelum melanjutkan naik angkutan umum.

Mereka yang 'tidak mempunyai sepeda' pun bisa menikmati bersepeda di Jakarta. Kalau kita amati di Sudirman, Thamrin, Jl. Pemuda, serta beberapa tempat yang lain, di sana terpakir puluhan sepeda. Sepeda-sepeda berwarna merah orange itu bisa dimanfaatkan dengan bebas dan suka-suka oleh masyarakat yang ingin gowes, namun untuk memanfaatkan fasilitas tersebut harus menggunakan kode-kode elektrik tertentu.

Di tempat-tempat ruang terbuka hijau, seperti taman juga dibangun sarana untuk para pengguna sepeda, seperti tempat parkir. Selama ini kalau kita lihat jembatan penyeberangan orang (JPO), jembatan yang ada hanya diperuntukan bagi orang, namun saat JPO Phinisi yang dibangun di Sudirman, di sana juga tersedia fasilitas ruang bagi pesepeda sehingga sebutan yang ada menjadi Jembatan Penyeberangan Orang dan Sepeda (JPOS) Phinisi. Di JPOS tersebut ada lift bagi sepeda. Di jalur atas pun juga ada kalur khusus bagi pesepeda.

Selanjutnya, seperti dalam *detik.com*, 22 September 2022, *Peta 26 Calon Jalur Sepeda Baru di Jakarta, Total Panjang Nyaris 200 Km!,* diberitakan Pemeritah Provinsi Jakarta akan membangun jalur sepeda baru sepanjang 196,45 kilometer. Jalur sepeda itu tersebar di 26 ruas jalan. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, pembangunan lajur sepeda tahun anggaran 2022 direncanakan sepanjang 196,45 km.

Pembatas jalur sepeda tahun ini berbeda-beda. Jalur baru sepanjang 40,06 km akan dibangun dengan pembatas *stick cone.* Kemudian, jalur berbagi ditandai dengan marka atau paku jalan (share) sepanjang 154,73 km serta jalur sepeda di *trotoar/ complete street* sepanjang 1,67 km.

Lebih lanjut dalam web itu dikatakan, proyek jalur sepeda ini bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 36 Pengembangan Prasarana dan Sarana Sepeda serta mendukung Program Jakarta Ramah Bersepeda. Syafrin mengatakan, jalur sepeda juga menjadi program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Liputo mengimbau kepada para pengguna jalan (*motorized* dan *unmotorized*) agar menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan di jalan.

Masalah muncul ketika Anies Baswedan tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Sebagaimana beredar dalam berbagai berita disebut, Pemerintah Provinsi Jakarta menghapus anggaran jalur sepeda mulai tahun depan. Hal ini sudah disepakati bersama dengan DPRD Jakarta. Kesepakatan penghapusan anggaran jalur sepeda diambil saat rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan Jakarta.

Dalam berbagai berita online, anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, pembangunan jalur sepeda bukan suatu prioritas pembangunan di Jakarta. Sementara itu, anggota DPRD Jakata dari PSI, Eneng Malianasari, menyebutkan, keberadaan jalur sepeda memperparah kemacetan di Jakarta. Jalur tersebut dikatakan membuat laju kendaraan semakin lambat. Lebih lanjut diungkapkan, jalur sepeda fungsinya tidak jelas. Sepedanya tidak ada.

Sementara itu, anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli, menganggap ada upaya untuk menghilangkan program Anies Baswedan. Terkait jalur sepeda, dirinya mengatakan, ini merupakan terobosan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Fraksinya mendesak agar program jalur sepeda tetap dijalankan. Menurutnya, bila ada program yang bagus ya harus dilanjutkan. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Perlu Perubahan Mindset dalam Urusan Mobilitas Warga

BANYAK keuntungan bila beraktivitas menggunakan sepeda namun tidak mudah melakukan di ruang di mana kebijakan pembangunan yang ada tidak berpihak padanya, seperti pembangunan kota yang car-oriented. Lalu bagaimana seharusnya pembangunan kota yang dilakukan agar pesepeda bisa nyaman dan aman dalam beraktivitas? Berikut Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima menguraikan berbagai permasalahan dan solusinya terkait upaya menciptakan kota yang ramah bagi pesepeda.

Amsterdam, Belanda, butuh waktu selama 40 tahun untuk menjadikan kota dan negaranya sebagai surga pesepeda, nah berapa lama dibutuhkan Jakarta, Indonesia, seperti Amsterdam?

Masalah di Jakarta sudah sangat kompleks. Anggap saja salah satu yang paling berkepanjangan adalah soal macet. Salah satu *root cause* dari kemacetan Jakarta adalah pola pergerakan yang tidak efisien, pembangunan kota yang *car-oriented*, dan pengembangan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas; sehingga untuk beraktivitas sehari-hari warga menghabiskan banyak waktu untuk bermobilisasi mencapai pusat-pusat aktivitas. Di saat kota-kota besar dunia lainnya sudah mengadopsi konsep 15 minute *city, average travel time* di Jakarta untuk mengakses suatu tempat dan kegiatan adalah 90 menit (JUTPI 2), dengan rata-rata kecepatan kendaraan yang relatif rendah yaitu 24.91 km/jam.

Kemacetan juga berimplikasi pada

kerugian materiil (*high economic cost*), dampak negatif kesehatan fisik dan mental, serta penurunan kualitas udara. Untuk mengurai kemacetan tersebut seharusnya pemerintah menggagas transformasi secara menyeluruh melalui pergeseran paradigma penataan ruang yang lebih berorientasi transit dan selaras dengan rencana pengembangan sistem transportasi, penyediaan infrastruktur transportasi umum terintegrasi, yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong *active mobility* melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki, lajur sepeda, dan prasarana lainnya yang mendorong warga melakukan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga merestrukturisasi hierarki prioritas pengguna jalan yang menempatkan pejalan kaki dan pesepeda pada prioritas utama, diikuti dengan angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi pada prioritas terakhir.

Jadi, jika Jakarta ingin seperti Amsterdam mesti dahulu mengubah mindset utama dalam urusan mobilitas warga. Pemerintah harus punya roadmap atau *time plan* agar bisa membuat solusi yang berkelanjutan, khususnya soal budaya bersepeda. Contoh kecil Jakarta, seperti jalur *busway* pada awal 2004 mulai dibangun, juga banyak sekali masalah yang timbul, dianggap penyebab kemacetan karena badan jalan yang dibagi, lalu diserobot oleh mobil dan motor, warga DKI Jakarta terkesan cuek dan sebagainya ternyata butuh 15 tahunan lebih ketika kita merasakan perubahan pelan-pelan terhadap *busway,* jalur sudah mulai steril, mobil, dan motor takut melewatinya karena tilang dan lain sebagainya.

Tantangan apa dalam membangun kota yang ramah pesepeda?

Untuk kota-kota di Indonesia (khususnya kota besar) seharusnya relatif tidak ada kendala, karena dari segi demografi, kota-kota relatif punya jalan-jalan yang datar, sehingga memudahkan untuk bersepeda.Namun banyak hambatan yang kami fikir sudah sistematis, seperti (a). Tidak adanya pola rencana pembangunan yang *suistainable* (berkelanjutan), karena biasanya ketika kepala daerah berganti maka berganti pula kebijakannnya; (b). Pola pikir pembangunan, biasanya pembangunan jalan di kota-kota di Indonesia selalu berorientasi pada kendaraan bermotor (mungkin karena pembayar pajak) sehingga kemudian kota-kota penuh dengan kendaraan bermotor, ruas, dan lebar jalan sudah tidak memadai sehingga untuk membangun jalur sepeda sudah tidak punya ruang; (c). Keramaian jalan-jalan sekarang sudah terlalu berlebihan sehingga untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan orang untuk bersepeda sangat sulit; (d). Anggapan bersepeda tidak ada "manfaatnya" seperti bikin jalurnya yang bikin macet, tidak menghasilkan income pajak, tidak banyak yang menggunakan dan lan sebagainya.

Fahmi Saimima

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Faktor-faktor apa yang menyebabkan orang gemar atau tidak bersepeda?

Faktor yang mendorong orang bersepeda: (1). Efisien, makin dewasa dan makin bertambah umur, kesibukan kita pun makin bertambah dan makin banyak hal yang dilakukan. Namun, tak perlu khawatir waktu olahraga jadi hilang karena selain berolahraga, bersepeda juga sarana transportasi efisien. Mengendarai sepeda ke tempat kerja ataupun ke tempat 'hang out,' tak hanya membakar kalori, namun juga dapat menyegarkan hari yang dibebani seabrek aktivitas.

Tak hanya itu, sudah banyak sekali dampak buruk kesehatan mental jika kita selalu menghadapi macet tiap hari. Memangkasnya dengan bersepeda tentu dapat memberi perubahan signifikan pada kesehatan, baik fisik maupun mental; (2). Hemat biaya, harga sepeda tentu lebih murah dari motor, terlebih lagi perawatannya juga jauh lebih murah daripada kendaraan bermotor. Selain itu, dengan mengendarai sepeda, kita tak perlu mampir ke pom bensin untuk isi bahan bakar. Jadi, setiap kayuhan sepeda yang kamu lakukan, kamu menghemat uangmu sendiri.

(3). Bikin pinter. Sebuah studi menunjukkan bahwa bersepeda yang dijadikan latihan olahraga dalam rutinitas sehari-hari dapat menajamkan pemikiran kita. Hal ini dikarenakan bersepeda dapat mengaktifkan se-sel di otak yang memicu saraf mendorong produksi protein. Bersepeda juga membantu transmisi saraf untuk berkomunikasi lebih efektif satu sama lain. Sederhananya, hal ini membuatmu mengalami peningkatan dalam hal menerima informasi dan membuat konsentrasi lebih kuat; (4). Relatif aman (kesehatan), banyak orang berasumsi bahwa bersepeda adalah hal berbahaya, terlebih lagi dilakukan di kota besar dengan

kuantitas mobil dan motor yang sangat banyak. Namun, secara statistik hal ini tidak benar. Dalam statistik yang tercatat di masyarakat Amerika Serikat, masyarakat paling banyak meninggal disebabkan karena serangan jantung, di mana kemungkinan tersebut sebesar 467:1. Sementara kemungkinan meninggal di atas sadel sepeda hanya sebesar 340.845:1. Jadi tak perlu khawatir akan bahaya bersepeda, karena justru bersepeda bisa mengurangi resiko penyakit jantung.

(5). Melatih otot karena bersepeda mengaktifkan otot pantat, quadricep dan otot, tentu dengan bersepeda lebih sering kamu akan mendapatkan otot jadi di daerah tulang belakang hingga pergelangan kaki. (6). Memperbaiki suasana hati. Terdapat berbagai penelitian ilmiah yang mengungkapkan bahwa bersepeda dapat meningkatkan mood, menghilangkan stres dan merilis senyawa endorfin di otak. Hal ini sangat bisa dibuktikan dengan mencoba membandingkan ekspresi wajah pengendara sepeda, pengendara mobil serta pengendara motor. Tentu ada perbedaan besar terhadap ekspresi mereka.

Lalu faktor yang bikin orang tidak mau bersepeda: (a). Jarak, perubahan tatanan kehidupan sosial di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa "jarak" yang semakin melebar antara tempat tinggal seseorang dan pusat aktivitas bikin menambah males bersepeda, Contohnya, jarak dari rumah ke kantor atau ke sekolah; (b). Waktu, kadang orang males bersepeda karena tidak bisa memaintan waktu; (c). Panas. Alasan yang paling klise adalah menyalahkan cuaca; (d). Status social. Coba saja tanyakan kepada anak millenial, kalau mereka hendak bepergian dengan pacar ke bioskop, maukah mereka menggunakan sepeda daripada sepeda motor? Pasti jawabnya tidak, karena sepeda masih dianggap sebagai kendaraan orang miskin; (e). Keselamatan dan keamanan. Amankah menggunakan sepeda di jalan raya? Kalau akhir pekan mungkin nyaman dan aman, tetapi kalau di hari sibuk, hari kerja, pastinya sulit untuk merasa keselamatan terjamin. Ketidakpatuhan para pengguna jalan di Indonesia menghasilkan sebuah kondisi yang bahkan sulit untuk merasa aman di dalamnya. Kecerobohan penggunanya sudah menghasilkan bukti yang banyak sekali dalam bentuk kecelakaan lalu lintas yang semakin tahun semakin meningkat.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Benarkah factor cuaca, panas, dingin, dan sejuk, mempengaruhi orang bersepeda?

Jika cuaca terlalu dingin atau lembab atau panas untuk bersepeda maka secara umum cuaca akan terlalu dingin, lembab, dan panas untuk bepergian ke manapun. Ketika jalanan terancang dengan baik untuk bersepeda, sama seperti berjalan kaki, Anda tidak memerlukan belas kasihan cuaca.

Belanda dan Denmark secara rutin mengalami musim dingin, namun manajemen lalu lintas yang baik, termasuk pembersihan jalur-jalur utama bersepeda dari salju, memastikan bahwa bersepeda akan tetap menjadi pilihan bagi kebanyakan orang di saat-saat seperti itu. Orang-orang tetap berjalan kaki ketika hujan, dingin atau panas dan tentunya mereka bisa bersepeda juga.

Meskipun mungkin memang ada beberapa daerah dengan kondisi cuaca yang ekstrim sehingga bersepeda jadi hal yang benar-benar sulit dilakukan. Untuk kebanyakan tempat, pendapat ini keliru dan tidak dapat dijadikan pembenaran bagi ketidakmampuan untuk membangun infrastruktur bersepeda yang aman dan menarik. Tapi untuk di Indonesia, orang masih menyalahkan cuaca.

Selama ini bagaimana kebijakan presiden dan kepala daerah terkait jalur sepeda?

Presiden lebih suka kembangkan kendaraan listrik, sementara kepala daerah juga mayoritas masih orientasi pembangunannya untuk kendaraan bermesin.

Dulu sepeda merupakan alat transportasi yang banyak diminati orang (anak-anak sekolah pun dulu naik sepeda saat sekolah), sekarang semua beralih ke sepeda motor bah-kan mobil, apakah hal yang demikian menunjukan sepeda 'ketinggalan jaman'?

Bisa dibilang demikian, karena perubahan perilaku dan juga moderenisme

Apakah kesadaran pengguna sepeda sendiri saat ini sudah terbangun terkait kasus di Harmoni, Jakarta, ada yang menerobos traffic light?

Untuk ranah kasus sepeda di perempatan Harmoni, Jakarta, adalah murni kesalahan pesepeda, release kami terhadap kejadian tersebut justru menyesalkan pihak kepolisian yang mengambil jalur "damai" karena seharusnya penegakan hukum diberlakukan agar diambil efek jera atau edukasi ke masyarakat. ❑

Bang Aswi

Ketua Komunitas Blogger Bandung

Media Sosial Salah Satu Instrumen Sosialisasi Empat Pilar

DI ERA kemajuan teknologi dan modernisasi global saat ini, media sosial dengan banyak bentuknya, seperti blog, Youtube, Instagram dan lainnya, sudah menjadi sumber informasi alternatif, selain media umum.

Sumber informasi yang tersedia di media sosial memiliki beberapa keunggulan yang mempermudah masyarakat menggunakannya, seperti pengoperasiannya mudah, murah hanya memakai kuota internet, kecepatan lalu lintas dengan tampilan yang kekinian

Media sosial juga menjadi sesuatu yang lumrah di era sekarang. Siapapun, baik tua, muda mapun anak-anak pasti akrab dengan media sosial. Karakrteristik media sosial seperti ini yang banyak disukai. Sosialisasi Empat Pilar MPR juga menjadi cepat tersosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat.

Kami komunitas blogger Bandung pernah beberapa kali bekerjasama dengan MPR untuk memasifkan sosialisasi penting itu. Dan, kami sangat mendukung upaya pemahaman nilai-nilai luhur bangsa itu. Untuk, kedepannya, kami siap membantu lebih memasifkan lagi berbagai program MPR kepada masyarakat luas. ❑

DER

Dr. I Made Sukamerta, S.Pd

Rektor Universitas Mahasaraswati Bali

Apresiasi Kepada MPR, Kegiatannya Selalu Libatkan Kampus

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SAYA kagum dengan MPR, bahkan saya berikan apresiasi dan penghargaan setingginya, sebab MPR sangat memerhatikan dan melibatkan civitas akademika perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Mahasaraswati dalam kegiatannya, seperti Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Beberapa bulan lalu, Ketua MPR menyambangi kami untuk menggelar sosialisasi dan kali ini Setjen MPR menyambangi kami untuk menggelar kegiatan Sarasehan Kehumasan yang berisi diskusi interaktif yang berkualitas.

Kami berharap, kegiatan bermutu seperti ini terus digiatkan lebih banyak dan lebih luas lagi, karena manfaatnya sangat banyak, terutama untuk mahasiswa, agar mereka bertambah wawasanya tentang MPR dan tentang kenegaraan secara lebih luas. ❑

DER

Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2022

Jazilul Fawaid

Ada Panduan Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SESEORANG memiliki jiwa Pancasila bila dirinya religius, manusiawi, humanis, adil, beradab, pemersatu, dan pro rakyat. Dalam bahasa kekinian sosok itu merupakan sosok yang kolaboratif, mampu menyinergikan antarsila yang ada di Pancasila.

Adalah Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber acara talkshow bertema 'Pulih dan Kuat Bersama Berdasarkan Pancasila, Konstitusi, dan Semangat Antikorupsi,' yang digelar di Ruang Auditorium, Kampus Universitas Tanjung Pura (Untan), Kalimantan Barat (Kalbar), 12 November 2022.

Selain Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, juga hadir sebagai pembicara dalam rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022 itu adalah Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dan Rektor Untan Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si.

Lebih lanjut, Gus Jazil menyatakan, yakin mahasiswa Untan merupakan sosok yang memiliki jiwa Pancasila. "Saya yakin mahasiswa di sini memiliki jiwa yang kolaboratif untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal demikian harus dipertahankan, bahkan perlu ditularkan," paparnya.

Nilai-nilai Pancasila, kata politisi PKB itu, harus diimplementasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh komponen bangsa, termasuk para pejabat negara. Dia menyebutkan, Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang menurutnya penting untuk ditegakkan. "Banyak hal diatur dalam Tap itu. Ada etika-etika yang perlu dipegang saat menjalankan kehidupan politik, pemerintahan, ekonomi, dan bisnis," katanya.

Etika yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan, seperti mengedepankan kejujuran, kesungguhan, bertanggung jawab, dan memiliki rasa malu. Hanya saja, meski ada tuntunan beretika dalam kehidupan berbangsa, hidup dalam suasana yang penuh kejujuran, bertanggung jawab, dan memiliki rasa malu belum menjadi budaya birokrasi bangsa ini. Pun juga dalam etika berbisnis dan menjalankan roda ekonomi. "Kegiatan bisnis dan perekonomian tidak boleh dikuasai oligarki dan tak boleh juga ada kesenjangan," tegasnya.

Ia membandingkan dengan kehidupan berpolitik di Jepang. Ada seorang menteri di Negeri "Sakura" itu mengundurkan diri hanya karena dikritik oleh rakyatnya. Meski dia hanya melakukan suatu kesalahan dari sudut pandang etika bukan hukum, namun dia sudah mengundurkan diri. "Di Indonesia hal demikian belum terjadi," ungkapnya.

Untuk membangun watak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itulah, menurut Gus Jazil, MPR saat ini gencar melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR.

"Setelah disosialisasi selanjutnya diinternalisasikan. Jadi, Pancasila tidak hanya dihafalkan, namun juga wajib dipahami dan diamalkan," ujarnya. ❑

Gus Jazil Kunjungi Stand MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FESTIVAL Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2022 yang digelar di Kampus Universitas Tanjung Pura (Untan), Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) yang berlangsung tanggal 11-13 November 2022 sangat meriah. Setiap hari ribuan mahasiswa bahkan para pelajar mendatangi Gedung Auditorium di kampus terbesar di Kalbar itu untuk mengikuti berbagai kegiatan.

Di festival yang bertema 'Pulih dan Kuat Bersama Berdasar Pancasila, Konstitusi, dan Semangat Antikorupsi' itu digelar berbagai kegiatan. Ada talkshow dari pimpinan MPR, MK, KPK, dan Rektor Untan. Ada pula talkshow dari kalangan Gen-Z. Ada Bincang Sore yang menghadirkan para juru bicara dari MPK, KPK, dan MPR.

Selain acara talkshow atau diskusi, arena festival konstitusi dan antikorupsi tahun 2022 ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lainnya. Di sana juga ada Pameran UMKM, unjuk inovasi dari para mahasiswa Untan, serta terdapat pula stan (booth) dari MPR, MK, KPK, Untan, dan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hadirnya stan MPR mendapat banyak perhatian dari para pengunjung. Setiap hari ratusan pengunjung hari mampir di stan MPR. Selepas menjadi pembicara dalam acara talkshow (12/11/2022), Wakil Ketua MPR Dr, Jazilul Fawaid SQ., MA., menyempatkan diri mengunjungi stan MPR. Kehadiran politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu disambut langsung oleh Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah SE., MM., dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hululembaga Setjen MPR Budi Muliawan SH., MH.

Kepada wartawan, Jazilul mengatakan, festival yang digelar ini merupakan kegiatan yang penting sebab konstitusi dan antikorupsi merupakan hal dasar dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. "Menjalankan konstitusi yang baik dengan semangat clean government," ujarnya.

Kegiatan yang digelar di kampus universitas negeri di Kalbar itu, menurut Jazilul, sangat bermanfaat, apalagi diselenggarakan di kampus-kampus karena kampus adalah pemilik masa depan. Kepada generasi muda, mahasiswa, perlu ditanamkan kecintaan idelogi Pancasila, konstitusi, dan semangat antikorupsi. "Generasi muda ke depan harus terus memegang Pancasila, tegak lurus pada konstitusi, dan mempunyai semangat antikorupsi," tegasnya.

Pria asal Pulau Bawean, Kabpaten Gresik, Jawa Timur, berharap, festival yang telah digelar di berbagai kampus itu perlu ditingkatkan, sebab melibatkan anak-anak muda. ❑

Terima Siswa SMA Ponpes Modern Internasional Dea Malela, NTB

Bamsoet Ajak Generasi Muda Manfaatkan Bonus Demografi Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bangga, konsep pendidikan Pondok Modern Internasional Dea Malela Sumbawa, Nusa Tenggara Barat — di bawah binaan tokoh bangsa Prof. Din Syamsudin— diselenggarakan dengan mengedepankan tiga nilai keutamaan yang bertumpu pada pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Ketiga nilai itu adalah: Keunggulan komparatif (beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan religius), keunggulan kompetitif (berilmu, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri), dan keunggulan dinamik (toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab).

Konsep tersebut, lanjut Bamsoet – begitu dia biasa disapa— selaras dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia. Amanat Konstitusi ini dimaknai bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya sekedar untuk melahirkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil saja, tetapi juga berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

"Generasi muda yang berwawasan kebangsaan adalah generasi yang berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila," ujar Bamsoet saat menerima kunjungan siswa Kelas XII SMA Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Sumbawa, NTB sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks MPR RI, Jakarta, Senin (9/11/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini bangsa Indonesia telah menapakkan kaki pada fase bonus demografi, di mana komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif. Diperkirakan, mayoritas (70 persen) dari kelompok usia produktif tersebut adalah generasi muda (berusia 15-44 tahun). Generasi muda memiliki peran penting dan strategis, baik sebagai agen perubahan, sebagai kontrol sosial, sebagai kekuatan moral, sebagai penjaga dan pelestari nilai kebangsaan, maupun sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Singkatnya, generasi muda adalah faktor kunci yang akan menentukan seperti apa wajah Indonesia di masa depan.

"Satu hal yang perlu diingat, masa depan tidak hadir secara tiba-tiba. Masa depan dibentuk, dibangun, dan ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada saat ini. Masa depan bangsa dan negara dicapai melalui tahapan pembangunan, dengan melewati berbagai tantangan kebangsaan, dan berproses melalui dinamika zaman," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, derasnya laju modernitas zaman telah menghadirkan berbagai lompatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Menurut catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, hingga bulan Juni 2022 tingkat penetrasi internet Indonesia sudah mencapai angka 77,02 atau mencapai lebih dari 210 juta user, dan pengguna internet aktif didominasi oleh generasi muda.

"Meskipun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta pemanfaatan internet pada semua lini kehidupan, telah menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa jika tidak bijaksana dalam menyikapi kemajuan teknologi tersebut, selain dapat menghadirkan sebuah kemubaziran, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang merugikan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, kemubaziran tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa besarnya angka penetrasi internet oleh generasi muda ternyata tidak berbanding lurus dengan pemanfaatan yang optimal. Sebagian besar generasi muda menggunakan internet untuk media sosial dan jejaring sosial, dan bukan hal yang produktif. Selain kemubaziran, pesatnya kemajuan teknologi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, misalnya lahirnya generasi yang cenderung bersikap individual dan 'anti sosial'.

"Kita memang tidak boleh anti terhadap budaya dan peradaban asing, tapi kita juga harus selektif untuk memilih yang positif. Sehingga generasi muda kita tidak menjadi 'lost generation', generasi yang linglung, generasi yang tercerabut dari akar budayanya sendiri. Kita juga tidak ingin, kemajuan teknologi dan modernitas peradaban dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai luhur, jati diri, dan budaya bangsa," pungkas Bamsoet. ❑

Festival Konstitusi dan Antikorupsi Untan

Siti Fauziah: Memberi Pemahaman Pentingnya Sadar Bekonstitusi dan Sikap Antikorupsi

PELAKSANA Tugas (Plt) Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE., MM., menyambut baik kembali diselenggarakannya Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang digelar bersama MPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah terhenti karena pandemi Covid-19, Festival Konstitusi dan Antikorupsi pada tahun ini kembali digelar di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, pada 11-13 November 2022.

"Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini bisa mendorong masyarakat, terutama mahasiswa dan generasi muda untuk sadar berkonstitusi dan mendukung gerakan anti korupsi. Kiranya, mahasiswa dan generasi muda perlu memahami pentingnya konstitusi, dan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagai implementasi UUD NRI Tahun 1945," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Festival Konstitusi dan Antikorupsi telah diselenggarakan sejak tahun 2016. Festival ini diselenggarakan setiap tahun melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, di antaranya Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Setelah terhenti karena pandemi Covid-19, pada tahun ini Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, mendapat giliran menyelenggarakan festival ini.

Menurut Siti Fauziah, Untan dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan festival in karena Pontianak dan Kalbar merupakan kota dan provinsi strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dan menjadi akses jalan menuju negara jiran itu. "Wilayah yang berbatasan dengan negara lain, seperti Kalbar, tentu mempunyai banyak tantangan dalam menjaga wilayah NKRI. Itu sebabnya festival ini diselenggarakan di Kalbar dalam rangka memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan antikorupsi," ujarnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Mengambil tema "Pulih dan Kuat Bersama Berdasarkan Pancasila, Kontitusi, dan Semangat Antikorupsi," Siti Fauziah menjelaskan, agenda dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini di antaranya temu wicara, Diskusi Kelompok Terpimpin, talkshow utama maupun talkswhow Gen-Z, pameran diikuti MPR, MK, dan KPK, serta pagelaran seni budaya.

Selain itu, lanjutnya, festival ini rencana nya dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan MK, Pimpinan KPK, anggota MPR, Gubernur Kalimantan Barat, Rektor Untan, Walikota Singkawang. "Mereka juga akan melakukan temu wicara dan memberi pemaparan berkaitan dengan konstitusi dan antikorupsi. Tentu banyak pesan konstitusi dan antikorupsi yang akan disampaikan," ujar Bu Titi, sapaan Siti Fauziah.

Siti Fauziah menambahkan, para mahasiswa dan generasi muda juga terlibat dalam festival ini. Bahkan, festival ini mengikutsertakan Miss Indonesia dari Kalimantan Barat dan artis Tissa Biani. "Bersama Wakil Presiden BEM Untan, Miss Indonesia dari Kalbar dan Artis Tissa Biani juga melakukan temu wicara mengupas masalah konstitusi dan antikorupsi. Jadi, agenda festival konstitusi dan antikorupsi ini memang dibuat menarik perhatian kalangan generasi muda," tuturnya.

Pada hari terakhir festival ini, sambung Siti Fauziah, para peserta diajak mengunjungi Desa Pancasila di wilayah Pontianak untuk melihat bagaimana masyarakat desa itu mengimplementasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dalam pelaksanaan festival ini akan dideklarasikan sikap antikorupsi yang berisi ajakan untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan. ❑

Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022

Budi Muliawan: Generasi Z Penting Memiliki Prinsip Nilai-Nilai Pancasila, Konstitusi, dan Sikap Antikorupsi

SEBAGAI bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 274 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Para mahasiswa, generasi muda, dan generasi Z, yang akan menjadi pemimpin bangsa pada masa itu perlu menyadari tantangan-tantangan tersebut. Menghadapi tantangan itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR, Budi Muliawan, SH, MH, mengingatkan pentingnya generasi Z memiliki prinsip nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan sikap antikorupsi.

"Untuk itulah MPR mempunyai visi sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. MPR tidak pernah berhenti menyosialisasikan Pancasila, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Pancasila dan konstitusi tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi perlu dipahami dan dihayati, serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Budi Muliawan saat menjadi narasumber "Bincang Sore" di Kampus Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (11/11/2022).

"Bincang Sore" ini merupakan salah satu kegiatan dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang digelar di Untan pada 11-13 November 2022. Dalam diskusi dengan moderator Budi Prasetyo ini turut berbicara Juru Bicara MK Fajar Laksono dan Juru Bicara KPK Ipi Maryati.

Menurut Budi Muliawan, generasi muda atau generasi Z harus punya kebanggaan karena memiliki Pancasila. Sebab, dengan Pancasila, Indonesia dengan segala keragamannya bisa bertahan sampai saat ini. "NKRI bisa selamat sampai hari ini dan masih berdiri tegak karena Pancasila," ujarnya.

Dia memberi contoh Yugoslavia dan negara-negara Balkan yang semula negara yang bersatu saat ini sudah tercerai berai. "Para pendiri bangsa sudah berikhtiar

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menyelamatkan NKRI. Para pendiri bangsa atau founding fathers sudah memberi contoh dan keteladanan dengan sikap mereka yang lebih mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutur alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.

Peristiwa Kongres II Pemuda tahun 1928 hingga Proklamasi 1945 merupakan wujud dari sikap itu. "Bisa dibayangkan, bila para Bapak Bangsa mendahulukan dan mementingkan egonya. Sebelum Indonesia merdeka, mereka telah memberi contoh dan teladan nyata mementingkan kepentingan bangsa di atas segalanya sehingga hingga hari ini Indonesia bisa tetap berdiri kokoh dengan keragaman adat, bahasa, budaya, dan agama," katanya lagi.

"Inilah satu kekayaan kita sebagai bangsa yang memiliki Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang benar-benar pas untuk bangsa Indonesia," imbuhnya.

Budi Muliawan menambahkan, belajar dari sejarah itu, seluruh elemen bangsa perlu memiliki semangat, pikiran, dan kerjasama dalam mengelola negara ini, termasuk sinergi antara MPR, MK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Menghilangkan segala ego dan kepentingan pribadi dan kelompok. Di MPR, kami melaksanakan politik kebangsaan. MPR merekatkan seluruh elemen bangsa," ucapnya.

Terkait sikap antikorupsi, Budi Muliawan melanjutkan bahwa selain korupsi, generasi muda atau generasi Z juga perlu memahami tentang fraud (sikap curang). "Sikap ini tentu saja perbuatan yang salah. Sehingga kita juga perlu menanamkan sikap anti-fraud," ujarnya.

Dia menjelaskan, teori yang disebut dengan fraud triangle. Fraud ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu: Pertama, karena tekanan, seperti tekanan terkait jabatan. Kedua, karena ada kesempatan. Dan, ketiga, karena rasionalisasi bahwa yang dilakukan itu tidak salah dan sudah biasa. "Poin ketiga ini sangat berbahaya. Membiasakan sesuatu yang tidak benar sangat berbahaya. Di sinilah pentingnya nilai-nilai integritas perlu ditanamkan kepada generasi muda," tegasnya.

Budi Muliawan berharap, nilai dan sikap anti fraud ini bisa tertanam pada generasi muda sehingga mereka memiliki integritas, pemikiran yang baik, dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. ❑

Dialog Kebangsaan

Yandri Susanto: Kita Butuh Banyak Orang Baik Jadi Anggota DPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

JAUH hari sebelum Pemilu 2024 berlangsung, Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto S. Pt mengajak masyarakat untuk memilah figur calon anggota legislatif yang akan bertarung pada pemilihan umum 2024. Yandri menyarankan agar masyarakat memilih caleg yang terbukti jujur, baik, taat beribadah dan gemar menolong masyarakat.

Dengan memilih caleg yang jujur, baik, taat beribadah dan suka menolong, diharapkan DPR akan menjadi lembaga legislatif yang baik. Mampu menghasilkan produk perundangan yang baik pula.

"DPR itu lembaga yang sangat penting, karena itu harus diisi oleh orang-orang yang baik. Kalau itu terealisasi, kita bisa berharap, kinerjanya semakin membaik. Bukan hanya dalam membuat perundangan, tetapi juga dalam hal pengawasan serta penganggaran," kata Yandri penuh harap.

Pernyataan itu disampaikan Yandri Susanto pada acara Dialog Kebangsaan bersama tokoh masyarakat Kabupaten Malang, Jawa Timur. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Cakra Malang, Ahad (13/11/2022). Untuk menyemarakkan suasana, mantan Ketua Komisi VIII DPR RI, itu mengisinya dengan berbagai kuis, dengan mengajukan pertanyaan dan memberi hadiah bagi peserta yang berani mencoba untuk menjawab soal-soal yang diajukan.

Memilih orang baik, jujur, taat beribadah dan suka menolong masyarakat, menurut Yandri, termasuk ibadah dengan kategori amal jariyah. Karena produk-produk kerja DPR tidak hanya akan dirasakan manfaatnya sekarang saja, tetapi hasil pekerjaan DPR itu akan bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Sehingga pemilih, ikut mendapatkan pahala selama hasil kerja DPR itu masih digunakan.

"Meskipun kita tidak duduk menjadi anggota DPR, tetapi karena kita memilih anggota legislatif dari orang-orang yang baik, dan mereka menghasilkan perundangan yang baik, maka kita ikut mendapat kebaikannya, berupa pahala yang akan terus mengalir," tambah Yandri.

Saat ini, menurut Yandri, kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia tengah dalam kondisi darurat narkoba, judi, bahaya LGBT, dan terancam krisis ekonomi dunia. Karena itu, dibutuhkan figur-figur anggota DPR yang baik, siap memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

'Kita butuh orang baik, dalam jumlah yang besar. Dan, untuk menempatkan orang-orang terbaik pada posisi yang tepat sesuai konstitusi adalah menggunakan saluran pemilu, lima tahun sekali. Kalau lima tahun sekali itu tidak dimanfaatkan maka kita akan merugi," pungkas Yandri. ❑

MBO

Diskusi Empat Pilar MPR RI

Arsul Sani: Berbagai Kelompok Masyarakat Inginkan Kembalinya Utusan Golongan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WACANA kembalinya utusan golongan ke dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah mengemuka sejak lama. Sejak tiga tahun terakhir, usulan tersebut semakin sering disuarakan. Berbagai kelompok masyarakat datang ke MPR untuk menyampaikan aspirasinya terkait urgensi kembalinya utusan golongan ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan kembalinya utusan golongan meminta pimpinan MPR menguji kemungkinan diadakannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena jalan yang bisa ditempuh untuk mengembalikan utusan golongan ke dalam sistem pemerintahan adalah perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945

"Selama tiga tahun menjadi Wakil Ketua MPR, saya menerima usulan berbagai kelompok masyarakat untuk menghidupkan kembali utusan golongan, Aspirasi tersebut sejalan dengan rekomendasi MPR periode 2014-2019 agar pimpinan periode ini melakukan kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan menggunakan dasar hukum Ketetapan MPR. Agar rekomendasi itu terlaksana maka dipentingkan untuk mengamandemen UUD," kata Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Arsul Sani, SH., M.Si., Pr. M.

Pernyataan itu disampaikan Arsul saat menjadi pembicara pada Diskusi Empat Pilar

MPR RI di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (16/11/2022). Selain Arsul, diskusi yang mengambil tema Urgensi Kehadiran Utusan Golongan itu juga menghadirkan dua pembicara lain, yakni: Anggota MPR yang juga Ketua Forum Aspirasi Konstitusi MPR RI, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH., M.H, dan pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. John Pieris, SH., MH., M.S.

Wacana mengubah UUD NRI Tahun 1945 yang sudah dibahas itu, kata Arsul, urung dilakukan menyusul munculnya keinginan sebagian kelompok yang hendak mengubah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menyangkut jabatan presiden tiga periode. Dan, juga keinginan untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024.

"Gagasan perubahan konstitusi itu nyaris terjadi. Karena Ketua DPD juga ingin mengubah UUD agar ada peluang presiden independen. Tetapi wacana itu batal karena pimpinan MPR berkeyakinan mengubah UUD sebelum pemilu bisa membuka kotak pandora, dan memantik terjadinya amandemen terhadap pasal-pasal yang lain," ungkap Arsul.

Kalaupun amandemen kelima akan dilaksanakan, bagi Arsul waktu yang tepat adalah bulan Maret 2024 atau paska pemilu. Saat itu, para calon sudah mengetahui hasil pemilu. Sementara DPR lama masih memegang jabatan hingga bulan Oktober.

"Pertanyaannya adalah, apakah waktu yang tersedia cukup untuk melaksanakan amandemen. Apalagi ada keinginan amandemen kali ini harus bisa menyelesaikan segala masalah yang terus mengganjal. Seperti UU Pemilu dan Partai Politik menyangkut ambang batas presiden dan parlemen," pungkas politisi PPP itu.

Era Reformasi

Sementara Ketua Forum Aspirasi Konstitusi MPR RI, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH., M.H., memastikan, setelah 24 tahun reformasi sudah saatnya bangsa Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk evaluasi terhadap konstitusi dan tantangan-tantangan terbaru yang muncul saat ini.

Saat ini, banyak sekali tantangan baru yang harus diperhitungkan. Apalagi setelah 24 tahun konstitusi hasil reformasi diterapkan, dihubungkan dengan peta politik, sosial dan ekonomi dunia yang berubah sangat pesat.

"Sebagai tuan rumah G20, kita menjadi kutub perhatian dunia. Dengan jumlah penduduk menempati urutan keempat sudah sepatutnya secara kualitatatif kita juga bisa menjadi negara keempat terkuat di dunia," kata Jimly lagi.

Karena itu, MPR perlu membentuk Forum Aspirasi Konstitusi sebagai penjelmaan MPR rumah musyawarah bagi seluruh rakyat. Forum Aspirasi Konstitusi berguna untuk menampung berbagai pemikiran dan pendapat, bukan membiarkan pemikiran itu bertarung secara bebas di luar.

"Forum ini juga menjadi kaukus utusan golongan, karena sesungguhnya sebagian anggota MPR adalah utusan golongan yang maju lewat partai. Mereka ini adalah penjelmaan seluruh rakyat," kata Jimly lagi.

Pandangan in, menurut Jimly, sesuai dengan konsep perwakilan yang dilahirkan para pendiri bangsa saat membuat konstitusi. Yaitu, perwakilan politik atau DPR (partai), utusan daerah, dan utusan golongan. Keterwakilan politik melalui partai tidak mampu merefleksikan seluruh rakyat, karena jumlahnya yang sangat besar, sehingga dibutuhkan perwakilan daerah dan utusan golongan.

Pendapat serupa disampaikan Prof. Dr. John Pieris, SH., MH., M.S. Menurutnya, seluruh dunia mengenal adanya tiga sistem perwakilan, yaitu: perwakilan politik melalui parpol, perwakilan teritorial melalui kedaerahan atau negara bagian, dan perwakilan fungsional melalui golongan-golongan penduduk. Oleh para pendiri bangsa, ketiga sistem perwakilan itu diadopsi menjadi tiga sistem perwakilan dengan pertimbangan bahwa keragaman masyarakat tidak bisa hanya diwakili oleh partai politik dan daerah saja. Sehingga dibutuhkan sistem perwakilan utusan golongan tersendiri.

"Golongan penduduk berdasarkan adat istiadat, suku bangsa, agama, bahkan ras, memerlukan perwakilannya tersendiri. Jadi, kita memang membutuhkan kembalinya perwakilan utusan golongan masuk ke dalam sistem pemerintahan," kata John Pieris. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kunjungi MAN 2 Malang

Yandri Susanto Ungkapkan Rahasia Suksesnya

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S. Pt, menyempatkan singgah ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, Jawa Timur, dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat malam (11/11/2022). Kunjungan Yandri Susanto ke MAN 2 Malang itu berbarengan dengan serah terima jabatan Pengurus OSIS Ma'had MAN 2. Ikut hadir pada acara tersebut Kepala Sekolah MAN 2 Kota Malang, Drs. H. Mohammad Husnan, M.Pd., serta Kepala Ma'had MAN 2 Kota Malang, Drs. H. Ahmad Taufik Wahyudi A, Lc.MA.

Kehadiran Yandri di aula MAN 2 itu sontak membuat suasana menjadi lebih meriah. Karena mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini memberikan kuis kepada para santri, dan memberinya hadiah bagi mereka yang berani maju untuk menjawab soal yang diberikan. Cara tersebut membuat para santri berebut kesempatan maju untuk mendapat hadiah.

Pada kesempatan tersebut, Yandri juga didapuk menyampaikan nasihat kepada segenap siswa-siswi MAN 2 Malang. Beberapa nasihat yang disampaikan Yandri, antara lain seputar optimismenya bahwa siswa-siswi MAN 2 akan mampu mencapai cita-cita yang tinggi. Menjadi pengusaha, dokter, tentara, dan polisi, termasuk menjadi pemimpin negara, baik di ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Optimisme itu, menurut Yandri, didukung kenyataan bahwa MAN 2 adalah salah satu lembaga pendidikan terbaik yang ada di Jawa Timur. Karena itu, Ia percaya pihak sekolah mampu mendidik siswa-siswinya dengan baik, dan mengantarkan mereka mencapai cita-citanya.

"Saya dulu sekolah di kampung dengan fasilitas yang pas-pasan. Tetapi, saya bisa menjadi anggota DPR dan bahkan menjadi Wakil Ketua MPR termuda sepanjang sejarah. Apalagi adik-adik yang belajar di salah satu sekolah terbaik, pasti kalian akan mampu mencapai cita-cita yang lebih tinggi dari saya," ucap Yandri disambut tepuk tangan meriah warga MAN 2.

Untuk menjadi orang hebat, menurut Yandri, semua siswa harus taat pada Allah dan Rasul-Nya. Patuh pada orang tua dan guru, serta belajar dengan rajin. Berusaha mencari pengalaman sebanyak mungkin, termasuk melalui organisasi. Karena organisasi memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tidak diajarkan di bangku sekolah "Organisasi melatih seseorang untuk melakukan yang terbaik, di manapun kita berada. Organisasi juga mengajarkan kepada kita memenangkan persaingan," kata Yandri lagi.

Karena itu, sebagian besar anggota DPR, menurut Yandri, berasal dari kalangan yang pernah mengenyam pahit getirnya berorganisasi. Mereka pernah bersaing baik dengan kawan maupun lawan, untuk memperoleh yang dicita-citakan. Karena itu, mereka sudah teruji, bahkan sebelum ikut dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif.

"Semoga dimasa depan, semua akan menjadi orang yang sukses. Ada yang jadi pengusaha, menteri, jenderal, gubernur, DPR, bahkan presiden. Semua itu sangat mungkin, karena sekolah ini adalah sekolah yang hebat," pungkasnya. ❑

Kunjungan Mahasiswa UIN Jakarta

Sangat Berbahaya Bila Calon Pemimpin Bangsa Tak Paham Empat Pilar

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S. Pt., mengungkapkan, MPR RI masih harus menjalankan tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) karena masih banyak anggota masyarakat, termasuk mahasiswa yang belum memahami soal-soal kebangsaan. Menurut Yandri, akan sangat berbahaya bila mahasiswa sebagai calon pemimpin tidak memahami Empat Pilar yang menjadi pegangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya kerap bertemu mahasiswa dan pelajar. Tetapi selalu ada pertanyaan saya tentang kebangsaan yang tidak bisa mereka jawab. Apalagi masyarakat awam. Itu menandakan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR masih harus dilanjutkan, agar mereka memahami masalah bangsanya sebelum mereka menjadi pemimpin," kata Yandri Susanto saat menerima Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR RI, Selasa (15/11/2022).

Turut mendampingi Wakil Ketua MPR pada pertemuan tersebut Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Budi Muliawan, SH., MH. Sedangkan delegasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta dipimpin Ketua Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, Daffa Rizqulloh Yorga Wibowo.

Kepada mahasiswa yang hadir, Yandri juga menjelaskan perbedaan lembaga MPR sebelum dan sesudah amandemen konstitusi. Dulu sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, bertugas mengubah dan menetapkan Konstitusi. Juga memilih dan melantik Presiden, serta membuat dan menetapkan GBHN.

"Sekarang MPR sebagai lembaga tinggi negara, tugasnya antara lain, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum; melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya," ungkap mantan Ketua Komisi VIII ini.

Saat ini, lanjut Yandri, MPR tengah berupaya melahirkan Pokok-Pokok Haluan negara (PPHN) sebagai pengganti GBHN. Hilangnya GBHN menyebabkan arah pembangunan tidak berjalan beriringan antara presiden, gubernur, bupati serta walikota. Presiden, gubernur, bupati serta walikota berjalan sendiri-sendiri, sesuai visi misi yang mereka sampaikan saat kampanye. "MPR tengah merencanakan pembentukan panitia adhock PPHN," jelasnya.

Kepada mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Yandri Susanto berpesan agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. "Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Mereka akan menentukan arah bangsa ini di masa yang akan datang. Karena itu, setiap mahasiswa harus belajar dengan tekun. Jangan jumawa lantaran bisa belajar di perguruan tinggi unggulan. Karena perguruan tinggi favorit tidak akan bermakna apa-apa jika mahasiswanya tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN ini.

Menurut Yandri, perguruan tinggi unggulan, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tidak bisa menjamin seluruh mahasiswanya bakal berhasil di masa depan. Sebab, keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh usahanya sendiri-sendiri, bukan dari kualitas perguruan tinggi di mana dia menimba ilmu.

"Saya dulu kuliah di perguruan tinggi di Bengkulu. Saya selalu belajar dengan tekun, berani bersaing dan tidak minder menghadapi orang lain. Saya juga ikut berorganisasi, sehingga memiliki jaringan yang luas. Selesai kuliah saya mendapat banyak tawaran pekerjaan, tidak sampai melamar kerja," kata Yandri.

Selain itu, tambahnya, dirinya berusaha selalu taat pada Allah dan Rasul-Nya, juga patuh dengan orangtua serta guru. "Karena itu, meski dari perguruan tinggi di daerah, bahkan sempat bekerja menjadi pencuci mobil sepulang kuliah, kini saya bisa menjadi anggota DPR tiga periode. Bahkan sekarang jadi Wakil Ketua MPR RI," ucapnya. ❑

MBO

Sarasehan Kehumasan MPR

Neng Eem Dorong Perempuan Berperan di Ruang Publik

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, STh.I, MM, mendorong perempuan untuk menjadi srikandi-srikandi yang hebat, kuat, dan tangguh sehingga bisa berperan dan berkiprah di ruang publik, termasuk di bidang politik, pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Menjadi srikandi, perempuan tidak hanya mengurusi diri sendiri, tapi juga masyarakat, umat, bangsa dan negara.

"Agar bisa berperan di ruang publik,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

perempuan perlu merebut posisi-posisi strategis di ruang publik, menjadi pemangku jabatan dan kebijakan, seperti menjadi kepala desa, camat, bupati, gunernur, pengusaha, anggota dewan baik di daerah maupun di pusat, pejabat di pemerintahan, dan sebagainya," katanya dalam Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (17/11/2022).

Sarasehan Kehumasan kerjasama MPR RI dan Perempuan Bangsa dengan tema "Srikandi Masa Kini (Perempuan di Ruang Publik)" dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Cianjur Nyi Emas Enan, dan Penasihat Perempuan Bangsa Cianjur dan Ketua Muslimat NU Kabupaten Cianjur Hj Ai Rahmawati.

Neng Eem menjelaskan srikandi adalah perempuan hebat, kuat, dan tangguh yang tidak hanya mengurusi dirinya sendiri, tetapi juga mengurusi masyarakat, bangsa, dan negara. "Srikandi itu perempuan yang berpikir tentang bangsa dan negara, yang artinya berbicara dan berperan di ruang publik. Srikandi tidak hanya bericara untuk diri sendiri, tapi lebih luas lagi. Srikandi juga membekali dengan ilmu," ujarnya.

Menurut Neng Eem, ruang publik terbuka luas untuk perempuan berperan, seperti di bidang keagamaan (majelis taklim), pendidikan, pondok pesantren, ekonomi, organisasi kemasyarakatan, politik, dan sebagainya. "Terutama di bidang politik. Harus ada srikandi-srikandi yang duduk mewakili perempuan di lembaga legislatif di daerah maupun DPR RI," ujar Neng Eem yang juga anggota Komisi V DPR RI.

Semua aspek kehidupan, lanjut Neng Eem, tidak lepas dari keputusan politik di lembaga legislatif. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang tidak lepas dari keputusan politik karena semua diatur undang-undang sebagai keputusan politik yang dibuat lembaga legislatif (DPR) bersama pemerintah. "Karena itu harus ada srikandi-srikandi yang mewakili perempuan di DPRD bahkan di DPR RI," tuturnya.

Neng Eem pun mendorong perempuan untuk ikut dalam kontestasi politik pada Pemilu tahun 2024. Pemilu tahun 2024

menjadi batu uji bagi perempuan untuk berperan dalam politik. “Kita akan lihat pada Pemilu 2024 nanti. Kontestasi Pemilu 2024 menjadi batu ujian bagi perempuan di ruang publik,” tambahnya.

Dalam kontestasi politik Pemilu 2024 akan terjadi perebutan dan persaingan untuk terpilih menjadi anggota dewan. Perempuan juga harus bisa merebut dan memenangkan persaingan menjadi anggota dewan. “Kita harus menempatkan orang-orang baik dan benar yang berpegangan pada Empat Pilar di lembaga legislatif agar undang-undang yang dihasilkan selaras dengan UUD NRI Tahun 1945,” ujar Neng Eem yang juga Pembina Perempuan Bangsa Kabupaten Cianjur.

Menceritakan pengalaman saat mencalonkan sebagai anggota legislatif, Neng Eem mengungkapkan banyak tantangan dan halangan menjadi calon legislative, baik dari sisi dukungan finansial maupun dorongan dari orang sekitar. “Kuncinya jangan pernah menyerah untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Kita tidak boleh putus asa dan pesimistis dari rahmat Allah. Kegagalan dan keterpurukan akan membuat mental kita kuat. Srikandi tidak boleh mudah menyerah dan mengeluh,” pesannya kepada kader Perempuan Bangsa. ❑

Sarasehan Kehumasan MPR

Siti Fauziah: Perempuan Lebih Mudah Berperan di Era Digital

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SAAT ini masyarakat Indonesia dan dunia memasuki era digital yang didorong pesatnya kemajuan teknologi informasi. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., menyebutkan, di era digital ini, perempuan lebih mudah memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa melalui internet, media sosial, smartphone, dan jaringan multimedia lainnya.

“Namun, penggunaanya harus tetap bijak dan untuk hal-hal yang bersifat positif, edukatif, serta tentunya membangun,” katanya ketika membuka Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Wisma Kemnaker RI, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (17/11/2022).

Sarasehan Kehumasan ini merupakan kerjasama MPR RI dan Organisasi Perempuan Bangsa. Hadir dalam sarasehan ini anggota MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Cianjur Nyi Mas Enan, Penasihat Perempuan Bangsa Kabupaten Cianjur Hj. Ai Rahmawati.

Menurut Siti Fauziah, perempuan memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan bangsa dan negara Indonesia. “Perempuan berperan besar, baik sebagai pribadi, istri, ibu, serta warga negara yang berkewajiban mendidik generasi penerus,” ujarnya.

Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, menyebutkan, perempuan dengan segala potensi yang dimilikinya mempunyai peluang yang besar untuk masuk ke ruang publik. Untuk masuk dan berperan di ruang publik, perempuan bisa menjadi apapun dengan beragam profesi, seperti sebagai guru, pengusaha, atau lainnya. “Tidak harus menjadi anggota MPR atau DPR, seperti Ibu Neng Eem Marhamah. Tentu ibu Neng Eem Marhamah sebagai politisi akan membanggakan kita sebagai kaum perempuan,” tuturnya.

Peran perempuan di ruang publik, sambung Bu Titi, bisa dilakukan dengan mengikuti pengajian, posyandu, dan kegiatan positif lainnya termasuk kegiatan sarasehan kehumasan yang diikuti oleh mereka yang tergabung dalam Perempuan Bangsa ini.

Dalam kesempatan itu, Bu Titi menjelaskan bahwa MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan memiliki makna bahwa peserta sarasehan ini adalah sahabat MPR RI. Sahabat memiliki makna yang lebih mendalam daripada teman.

“Dengan mengenal lebih dekat MPR maka akan lebih mengetahui apa saja tugas dan wewenang lembaga MPR. Dengan demikian, sahabat kebangsaan akan berjalan beriringan dengan MPR untuk mengukuhkan peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat," jelasnya.

Kepada peserta sarasehan, Siti Fauziah memperkenalkan platform Buku Digital MPR RI. Dalam aplikasi ini, tersedia produk-produk dari MPR RI seperti jurnal, majalah, hasil kajian MPR, dan produk lainnya. "Sekarang baru tersedia di platform android. Jadi, silakan didownload di google play store. Jangan lupa kasih bintang 5 dan review yang bagus ya," katanya tersenyum.

"Kalau mau berkunjung ke MPR pun boleh, dengan mengirim surat lebih dahulu, nanti Biro Humas dan Sistem Informasi MPR akan mengagendakan waktu kunjungan. Di sana bisa menyaksikan langsung Gedung MPR, atau melihat koleksi buku-buku di Perpustakaan MPR," pungkasnya. ❑

Ngobrol Dengan Jurnalis Bandung

Siti Fauziah : Media Massa Adalah Mitra Strategis

PELAKSANA Tugas (Plt) Deputi Administrasi yang juga Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., mengapresiasi kerjasama dan bantuan para wartawan meliput serta mewartakan kegiatan Forum MPR Dunia di Bandung, 24-26 Oktober 2022. Partisipasi media dalam mewartakan kegiatan Forum MPR Dunia sehingga even internasional pertama yang digelar MPR RI itu dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.

"Saya ucapkan terimakasih, berkat bantuan teman-teman wartawan, Forum MPR Dunia berjalan lancar, beritanya bisa sampai ke masyarakat luas," kata Siti Fauziah.

Siti Fauziah menyatakan hal itu dalam acara 'Ngobrol Bareng Jurnalis' di Bandung,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Jawa Barat, Ahad (20/11/2022). Ikut hadir Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Budi Muliawan SH., MH. Sedangkan jurnalis yang hadir terdiri dari perwakilan media cetak, elektronik, dan televisi, yang ikut meliput kegiatan Forum

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR Dunia di Bandung.

Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, menyampaikan rasa syukurnya karena even Forum MPR Dunia berlangsung sukses. Meskipun persiapan untuk penyelenggaraan even tersebut relatif pendek. Terlebih bila dibandingkan dengan kegiatan internasional serupa, seperti G20 maupun P20.

Menurut Bu Titi, Forum MPR Dunia yang belum lama berakhir bakal dilanjutkan dengan pertemuan lain, yang jadualnya akan ditentukan kemudian. "Pertemuan berikutnya akan mengkaji dan membahas sejumlah keputusan yang telah diambil pada Forum MPR Dunia di Bandung tersebut," ungkap Bu Titi lagi.

Siti Fauziah berharap, kerjasama MPR dengan para wartawan, seperti yang terjadi pada even Forum MPR Dunia diBandung bisa terus dipupuk dan ditingkatkan. Apalagi keberhasilan kerja Biro Humas tak bisa lepas dari bantuan serta partisipasi para wartawan.

Kerjasama MPR dengan media massa dan para wartawan, menurut Bu Titi, sesungguhnya sudah berlangsung lama. Dan, sejak lama pula, MPR menganggap bahwa media massa merupakan mitra strategis. Ini penting, karena media massa pilar keempat dalam kehidupan berdemokrasi.

"Prinsipnya, kami ingin mendapatkan masukan agar ke depan hasilnya semakin baik. Meskipun masukan itu berupa kritik, karena kritik itu ibarat obat meskipun rasanya pahit tetapi bisa menyembuhkan penyakit. Sehingga kami bisa mempertahankan hal-hal yang sudah baik, dan memperbaiki yang belum baik," pungkas Siti Fauziah.

Dalam kesempatan itu, para wartawan menyampaikan beberapa masukan berdasar apa yang mereka alami selama meliput kegiatan Forum MPR Dunia di Bandung. Antara lain, kerjasama perlu ditingkatkan, terutama sebelum acara dimulai. Mereka juga mengusulkan agar para peliput diberi ruang yang lebih luas dalam melakukan peliputan. Serta informasi yang seterang-terangnya menyangkut bentuk dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. ❑

MBO

Sarasehan Kehumasan di Bali

Ajak Mahasiswa Pegang Teguh Empat Pilar MPR

INDONESIA adalah salah satu negara besar di dunia yang sangat kaya akan keberagaman, mulai dari suku, agama, ras dan antar golongan. Jika keberagaman yang sangat besar itu tidak bisa disatukan dengan satu ikatan kuat, maka potensi perpecahan sangat mungkin terjadi.

Plt. Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Setjen MPR, Muhammad Jaya, S.IP., M.Si., mengungkapkan, pemahaman dan implementasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar adalah elemen penting yang mempersatukan seluruh anak bangsa dalam satu ikatan kuat tak tergoyahkan.

"Apalagi, Indonesia juga sangat kaya akan sumber daya alam yang menjadi incaran serta rebutan negara lain sejak dulu hingga saat ini. Tidak bisa dibayangkan jika negara ini terpecah sehingga kekayaan alam terbengkalai,"tandas Muhammad Jaya, selaku narasumber diskusi Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Auditorium Ganesha, Gedung Rektorat IV, Kompleks Unmas, Denpasar, Bali, Kamis (24/11/2022).

Hadir dalam diskusi itu Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., Rektor Unmas Dr. I Made Sukamerta, M.Pd., Wakil Rektor Unmas Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH., serta sekitar 100 mahasiswa lintas Fakultas Unmas sebagai peserta

Selanjutnya, dalam diskusi bertema 'Peran Mahasiswa Dalam Mengisi Kemerdekaan,' yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Unmas itu, Muhammad Jaya mengajak seluruh anak bangsa, termasuk mahasiswa, untuk memegang teguh Empat Pilar guna menjaga persatuan dan eksistensi negara, serta mengelola kekayaan bangsa demi kemakmuran seluruh rakyat.

Generasi muda mahasiswa sebagai sumber daya manusia unggul, lanjut Muhammad Jaya, juga merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Akan sangat berbahaya buat kontinuitas kepemimpinan bangsa jika mahasiswa sebagai SDM unggul tidak terkelola dengan baik.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Adapun upaya untuk mewujudkan kecintaan kepada Empat Pilar oleh mahasiswa bisa dilakukan dengan berbagai cara yang sederhana saja, seperti kompak memakai pakaian adat Bali dalam acara diskusi ini. Lalu ada salah satu mahasiswi yang membaca puisi tentang Indonesia. Saya rasa baik sekali. Ini menunjukkan kebanggaan kepada nilai-nilai budaya daerah sendiri," ujarnya.

MPR sebagai lembaga negara, kata Muhammad Jaya, telah sejak lama melaksanakan program Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode, menyasar berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengedukasi dan membangkitkan semangat rakyat kembali memahami Empat Pilar demi kesatuan bangsa.

"Saya melihat Empat Pilar ini sangat penting untuk Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, saya mengajak para mahasiswa Unmas dan seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk semangat menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sebab, kalau bukan kita siapa lagi," tandasnya. ❑

Temu Pakar Bersama Pimpinan MPR

Fadel Muhammad Bicara Soal Pelestarian Budaya dan Dampak Globalisasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengungkapkan, generasi muda Indonesia saat ini hidup di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat tak terbendung, terutama teknologi informasi seperti media sosial yang sangat digandrungi anak muda.

Walaupun dampak positifnya sangat banyak karena mempermudah dalam menjalani aktivitas sehari-hari, namun sisi negatifnya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Melalui kecanggihan media sosial, anak-anak muda cenderung mengikuti semua yang sedang tren di dunia, dan tidak menyadari lama-kelamaan akan mendegradasi pemahaman mereka terhadap budaya bangsa sendiri. "Inilah yang saya khawatirkan, degradasi budaya tergerus dan akhirnya menghilang," katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini dalam acara Temu Pakar Bersama Pimpinan MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Dewan Eksekutif Wilayah (DEW) Rampai Nusantara Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, Jumat (18/11/2022).

Acara bertema 'Degradasi Budaya dan Upaya Mempertahankan Nilai-Nilai Luhur Budaya Gorontalo sebagai Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia' ini dihadiri Ketua DEW Rampai Nusantara Prov. Gorontalo, Yakop AR Mahmud, dan anggota Rampai Nusantara sebagai peserta.

Berbagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif globalisasi tersebut, lanjut Fadel Muhammad, salah satunya dengan melestarikan budaya bangsa, seperti yang dilakukan organisasi Lamahu dan Pemda DKI Jakarta yang menyelenggarakan Festival Seni Budaya Betawi Gorontalo ke-2 di Provinsi Gorontalo, 19-20 November 2022.

"Festival tersebut penuh dengan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda tentang kekayaan budaya Betawi dan Gorontalo. Pada intinya, masifnya pemahaman budaya menjadi sangat penting. Sebab, nilai-nilai budaya bangsa bisa menjadi benteng dari pengaruh efek negatif globalisasi," ujarnya

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini menegaskan, sebagai lembaga negara milik rakyat, MPR tentu sangat concern akan hal tersebut. "Kami di MPR tentu sangat peduli terhadap pemahaman generasi muda kepada budaya bangsanya sendiri. Untuk itulah, MPR membuat dan menjalankan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode kepada berbagai kalangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.

Dalam salah satu bagian dari Empat Pilar itu, diutarakan Fadel Muhammad, ada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menjadi semangat dan pendorong berbagai budaya bangsa yang sangat beragam untuk saling menghormati dan saling mengisi. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu bangsa, satu tanah air Indonesia.

"Saya mengajak anak-anak muda di Rampai Nusantara seluruh Indonesia segera menyadari persoalan ini dan mendukung serta berkiprah dalam segala kegiatan pelestarian budaya. Jika ini terjadi secara luas maka jati diri dan karakter generasi muda akan tetap kokoh, bahkan bertambah tebal sehingga tidak perlu khawatir lagi terhadap derasnya arus modernisasi," pungkasnya. ❑

MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan Bali

Siti Fauziah: Kuasai Iptek dan Lestarikan Budaya

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAHASISWA sebagai generasi muda Indonesia, saat ini berada di era modenisasi global dengan segala tantangannya yang berat. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., mengingatkan mahasiswa agar selalu bersiap diri dengan menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk memperluas wawasan dan keahlian, seperti bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa asing lainnya.

Selain menguasai Iptek, mahasiswa juga harus memiliki passion untuk mengenal, memahami, dan melestarikan secara riil budaya daerahnya. Apabila penguasaan dua elemen ini sudah ada dalam diri mahasiswa maka bisa menjadi benteng menghadang dampak buruk modernisasi global, terutama kemajuan teknologi informasi, dan menjadi modal penting untuk berperan demi kemajuan negara.

"Hal itu harus betul-betul disadari para mahasiswa. Sebab, generasi mudalah yang paling banyak berhadapan sangat intens setiap hari dan di setiap aktivitas dengan kemajuan teknologi, seperti smartphone, media social, dan lainnya," katanya, saat membuka Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan, di Auditorium Ganesha, Gedung Rektorat IV, Kompleks Universitas Mahasaraswati (Unmas), Denpasar, Bali, Kamis (24/11/2022).

Hadir dalam acara yang mengambil tema 'Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan' itu, antara lain: Rektor Unmas Dr. I Made Sukamerta, M.Pd., Wakil Rektor Unmas Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH., Plt. Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Setjen MPR Muhammad Jaya, Si.P, MSi., serta sekitar 100 mahasiswa lintas Fakultas Unmas sebagai peserta.

Di hadapan para peserta, Ibu Titi, sapaan akrab Siti Fauziah, memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada rektor, wakil rector, dan para mahasiswa Unmas yang hadir dengan mengenakan busana adat Bali.

"Begitu saya masuk ke tempat acara, saya melihat semuanya serentak memakai pakaian adat budaya. Wanita-wanitanya sangat cantik dan serasi memakai kebaya khas Bali bermacam warna. Mahasiswa yang tahu cara mempertahankan dan mengekpresikan cintanya pada budaya seperti itulah yang menjadi harapan rakyat dan penerus kepemimpinan bangsa," tuturnya, seraya acungkan jempol kanan.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Fauziah mengungkapkan bahwa sebagai Rumah Rakyat Indonesia, MPR membuka pintu lebar-lebar kepada seluruh elemen bangsa, termasuk para mahasiswa untuk berkunjung dan mendapatkan semua informasi serta pengetahuan seputar lembaga MPR RI.

"Kami akan sambut hangat kedatangan kalian. Kalau tidak sempat untuk datang, jangan khawatir. MPR membuka akses online melalui aplikasi Buku Digital. Dalam aplikasi ini tersedia produk-produk MPR RI seperti jurnal, majalah, hasil kajian MPR, dan produk lainnya. Silahkan kalian search di google play store, ketemu langsung saja di download dan dapatkan semua informasi penting dan bermanfaat," pungkasnya. ❑

Launching SRIKANDI

Ma'ruf Cahyono: Memanfaatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DITANDAI pemukulan gong sebanyak empat kali, Sesjen MPR, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., secara resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Ma'ruf Cahyono meluncurkan aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Setjen MPR dalam suatu acara di Ruang Delegasi, Kompleks Gedung MPr/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 15 November 2022.

Dalam acara peluncuran itu, Ma'ruf Cahyono didampingi oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional, Dra. Desi Pratiwi MIM.; Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM.; Plt. Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Setjen MPR, Muhammad Jaya, SI.P., M.Si.; Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional, Drs. Imam Mulyantoro, MAP.; serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Setjen MPR.

Dalam kata sambutannya, Ma'ruf Cahyono menyatakan, untuk menciptakan *smart government* atau pemerintahan yang cerdas, bagus, dan berkualitas, harus didukung atau ditopang tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai eranya. Saat ini merupakan era digital sehingga kita perlu mentransformasi pemikiran untuk segera melaksanakan segala sesuatu berbasis digital. Untuk menuju ke segala sesuatu yang berbasis digital itu maka diperlukan pemberdayaan sumber daya, tidak hanya manusia namun juga infrastruktur.

Menurut Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman itu, paling penting adalah bagaimana setiap sumber daya manusia memiliki semangat perubahan, meski tidak mudah untuk menuju ke perubahan yang mentransformasi hal-hal yang biasa, konvensional, menjadi digital.

Pria kelahiran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu selanjutnya mengatakan, Setjen MPR dalam mengaplikasikan SRIKANDI akan melakukan secara bertahap atau berproses. Dengan launching aplikasi itu, sistem yang ada akan terus-menerus melakukan perubahan pola pikikr agar pengaplikasian SRIKANDI bisa memberi manfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dia berharap, dengan pemanfaatan SRIKANDI, arsip yang ada bisa tersimpan dengan bagus serta memberi akses yang mudah kepada siapapun yang ingin mendapatkan dokumen dan kerasipan. Lebih lanjut dikatakan, dengan pemanfaatan SRIKANDI, arsip yang akan berada dalam satu memori kolektif bangsa yang menjadi bukti bahwa proses sejarah berjalan karena ada dokumentasi dan kearsipan yang tersimpan dengan aman. "Bagian dari digitalisasi adalah adanya jaminan keamanan arsip", paparnya.

Program SRIKANDI, menurut dosen magister hukum di berbagai perguruan tinggi, itu merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Setiap kementerian dan lembaga selanjutnya didorong untuk segera melaksanakan SRIKANDI.

"Jadi, semua kementerian dan lembaga akan melaksanakan SRIKANDI yang disesuakan dengan karakter kementerian dan lembaga masing-masing", ungkapnya. Dengan pemanfaatan aplikasi ini oleh pemerintah pusat, dan dukung oleh kementerian serta lembaga maka tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik. ❑

Terima Delegasi SDI Al Azhar X Serang

Yandri Susanto Ungkap Lima Kiat Agar Siswa Sukses

SEKITAR 100 siswa Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Azhar X, Kota Serang, Banten, Rabu, 16 November 2022, melakukan kunjungan ke MPR di Kompleks MPR/DPR RI Senayan, Jakarta. Rombongan siswa SDI Al Azhar X Kota Serang ini diterima di Gedung Nusantara V oleh Wakil Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., didamping oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas, Setjen MPR, Budi Muliawan, SH., MH.

Yandri Susanto menyapa para tamunya, siswa SDI Al Azhar, ini dengan ucapan selamat datang di gedung MPR RI. "Biasanya belajar di Serang, sekarang belajar di tempat ini, dalam keadaan sehat," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dalam kesempatan itu, Yandri Susanto memuji keberadaan SDI Al Azhar. Sekolah ini merupakan sekolah unggulan di provinsi paling barat di Pulau Jawa itu. Guru-gurunya top, ditambah lagi didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai, misalnya terpenuhinya listrik untuk sekolah, dan guru-gurunya top.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Dulu saya sekolah di kampung, belum ada listrik," ujarnya sembari tersenyum. Untuk itu, dia berharap, siswa-siswa SDI Al Azhar bisa berprestasi lebih baik. "Kalian harus lebih baik dari saya," ujarnya memberi motivasi.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR/ MPR dari Dapil II Banten itu memberikan kiat sukses kepada para siswa. Yandri menyebut, lima kiat atau cara agar para siswa bisa sukses. Kelima kiat atau cara itu adalah: Taat pada Allah dan Rasul, hormat pada orangtua, jangan melawan guru, tak boleh minder, serta berdoa dan berusaha. "Kalau kalian minder, takut, maka akan susah maju. Untuk itu ikutlah organisasi, seperti Pramuka dan OSIS," paparnya.

Yandri pun meminta para siswa agar belajar bersungguh-sungguh, terutama siswa yang saat ini duduk di Kelas VI karena sebentar lagi akan masuk jenjang SMP. Dia juga meminta para siswa rajin belajar dan jangan malas, karena pemimpin masa depan akan diganti oleh generasi muda. "Presiden, anggota DPR, menteri, gubernur, bupati, dan yang lainnya akan berganti, siapa tahu kalian yang akan mengganti," ujarnya. "Jadi miliki cita-cita yang tinggi," tambahnya.

Alumni Universitas Bengkulu itu juga menjelaskan, saat ini para siswa berada di gedung wakil rakyat. Disebut wakil rakyat, sebab mereka yang berada di tempat ini dipilih secara langsung lewat pemilu. Di kompleks ini ada tiga lembaga negara, yakni MPR, DPR, dan DPD. "Anggota MPR merupakan gabungan antara anggota DPR dan anggota DPD," tuturnya.

Yandri melanjutkan, jumlah anggota DPR ada 575 orang. Mereka berasal dari seluruh Indonesia lewat berbagai dapil. "Saya berasal dari Dapil II Banten yang meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon," ujarnya. "Jadi saya dipilih oleh masyarakat Serang dan Cilegon. Untuk menjadi anggota DPR maka harus masuk partai politik," imbuhnya.

Sebagai Wakil Ketua MPR, Yandri juga menjelaskan tentang perbandingan tugas dan wewenang MPR sebelum dan setelah amandemen. Dikatakan, sebelum amandemen UUD, MPR merupakan lembaga tertinggi. MPR mempunyai wewenang memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan GBHN. Setelah amandemen, MPR tidak lagi mempunyai wewenang seperti itu. MPR juga bukan lagi sebagai lembaga tertinggi.

Meski demikian, lanjut Yandri, MPR masih mempunyai wewenang tertinggi, yakni menetapkan dan mengubah UUD. "Bila dulu MPR menetapkan GBHN, sekarang MPR tengah merancang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sebelum akhir masa jabatan akan kita sahkan PPHN," katanya.

Sementara itu, pendamping SDI Al Azhar, TB. Maman Suherman menjelaskan, para siswa datang ke MPR untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah, pembelajaran demokrasi. "Setelah berada di kompleks parlemen, siswa-siswa menjadi paham dan tahu tentang lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Terima kasih kami diterima dengan baik," ujarnya. ❑

Rapat Evaluasi Biro Humas MPR

Sesjen MPR Tekankan, Akuntabilitas Harus Jadi Jiwa Birokrasi MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIAT Jenderal MPR adalah instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas serta fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR. Dalam menjalankan tugas birokrasinya, Setjen MPR didukung oleh para aparatur yang bertugas sesuai tupoksinya masing-masing.

Sekretaris Jenderal MPR, Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., menyebut, karena lingkup kerja Setjen MPR berada dalam layanan publik maka yang diperlukan dalam kerja-kerja birokrasi di Setjen MPR adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik. Setelah itu, sinergitas yang baik, saling mengisi antarbagian, antarbiro bahkan antarindividu atau team work yang solid.

"Karena, perputaran organisasi harus dengan kekuatan yang seimbang. Seperti lomba lari estafet, jika satu saja yang lemah maka akan berdampak pada keseluruhan tim. Potensi kekalahan akan sangat besar. Untuk bisa menang maka semua anggota tim harus sudah siap dari awal dengan kekuatan yang seimbang, dan hasilnya akan positif," katanya, dalam gelar acara Rapat Evaluasi Layanan Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Tahun 2022 dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2023, Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, di Ruang Tirta, Hotel Aston, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2022).

Hadir dalam acara, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi yang juga Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., juga seluruh pejabat struktural dan fungsional serta staf di lingkungan Biro Humas Setjen MPR RI.

Hal-hal tersebut, lanjut Ma'ruf Cahyono, harus mendapatkan perhatian lebih bahkan menjadi bagian di Setjen MPR, termasuk Biro Humas dan Sistem Informasi yang merupakan salah satu elemen penting di organisasi Setjen MPR.

"Makanya, saya memberikan apresiasi kepada Biro Humas yang menggelar Rapat Evaluasi ini agar kita semua bisa saling memberi pemahaman dan bertukar pikiran tentang kebaikan Humas dan Setjen MPR secara keseluruhan," ujarnya.

Ma'ruf Cahyono mengungkapkan, Humas atau Public Relation (PR) adalah bentuk layanan sebuah lembaga, dalam hal ini Setjen MPR, yang menghubungkan MPR dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap unit kerja yang ada dalam Humas dan Sistem Informasi harus bisa menempatkan diri secara kelembagaan dan menjadi instrumen layanan untuk rakyat.

"Begitu pentingnya peran kehumasan agar rakyat mendapatkan akses informasi yang berkualitas seputar lembaga MPR, mutu layanan harus terus ditingkatkan secara maksimal dari hari ke hari. Jika belum maksimal maka evaluasi harus dilakukan. Evaluasi yang dilakukan menyangkut gagasan, pemikiran, dan tata kelola hubungan antarunit, tidak hanya lingkup humas tapi juga dengan biro lain," katanya.

Untuk lebih mempertegas peran layanan Humas dan Sistem Informasi buat masyarakat, Ma'ruf Cahyono menyampaikan beberapa catatan untuk diperhatikan, Pertama, apakah layanan Humas sudah berfungsi maksimal sebagai PR untuk menjembatani hubungan masyarakat dengan Setjen MPR. Kedua, apakah sistem informasi sudah menjadi bagian yang meningkatkan kualitas layanan PR, sehingga hubungan antara Humas dan Sistem Informasi itu menjadi dua hal yang berbeda, tapi saling terkait.

Catatan ketiga, tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. "Jika semua itu terpenuhi, sangat baik sekali. Artinya, humas akan mendapatkan indikator manfaat dari keberadaannya, karena masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang bagus," tambahnya.

Birokrat kelahiran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ini berharap, Rapat Evaluasi bisa menghasilkan hasil evaluasi atas layanan Kehumasan dan Sistem Informasi selama 2022 dan memperkuat kualitas pelaksanaan program Humas dan Sistem Informasi 2022-2023. "Selesai rapat, kita akan mendapatkan poin-poin penting di berbagai unit kerja, yang semuanya berintegrasi dalam satu layanan humas. Karena bicara humas, bicara public relation atau PR, tentunya hasilnya adalah kualitas layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ma'ruf Cahyono juga berharap, evaluasi dan perencanaan di tahun depan bisa lebih diperkuat dan dipertegas lagi sehingga mendapatkan hasil perubahan yang inovatif.

"Evaluasi atau monitoring adalah cara kita menyesuaikan dengan lingkungan, yang dari waktu ke waktu cepat berubah. Mudah-mudahan di masa depan, kita bisa memenuhi tiga unsur, yakni PR, Sistem Informasi, dan Perencanaan Program yang didukung oleh e-Government pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik," katanya.

Ma'ruf menegaskan, Biro Humas dan Sistem Informasi harus bisa melakukan semua itu, sebagai bagian dari upaya bersama melakukan terobosan maju dalam lingkup upaya akselerasi kualitas pelayanan kehumasan, sehingga berfungsi (sekali lagi) sebagai PR-nya lembaga dan pada akhirnya meningkatkan public trust atau kepercayaan publik. ❑

DER

Rapat Evaluasi Biro Humas

Siti Fauziah Berharap, Humas Raih Capaian Kinerja Lebih Baik

BIRO Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI gelar kegiatan Rapat Evaluasi Layanan Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Tahun 2022 dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2023, di Ruang Tirta, Hotel Aston, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2022).

Hadir sekaligus membuka secara resmi acara Rapat Evalusasi Biro Humas adalah Sekretaris Jenderal MPR RI Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi yang juga Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta staf di lingkungan Biro Humas Setjen MPR RI.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah atau akrab disapa Ibu Titi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rapat Evaluasi Layanan Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Tahun 2022 dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2023 yang digelar 26-28 November 2022 ini dihadiri Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional (perpustakaan), serta staf dari tiga bagian yang ada di Biro Humas, yakni: Bagian Sistem Informasi dan Data (BSID), Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Bagian Media Visual dan Audio Visual, serta Perpustakaan Setjen MPR.

Dalam kesempatan itu, kepada Sesjen MPR, Ibu Titi melaporkan bahwa penyerapan anggaran Biro Humas dan Sistem Informasi Tahun 2022 sudah mencapai 89,32%. Diharapkan di akhir tahun bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. "Alhamdulillah, banyak program dan kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik di Biro Humas," tambahnya.

Siti Fauziah berharap, dengan terselenggaranya Rapat Evaluasi dan Rencana Program Kerja 2023, Biro Humas dan Sistem Informasi bisa bekerja lebih baik dan mencapai target, bukan hanya pencapaian anggaran tapi juga pencapaian kinerja. "Kami juga berharap. ke depan akan tergali berbagai inovasi-inovasi baru dalam berbagai kegiatan, sehingga bisa menaikkan capaian kinerja di tahun depan," ujarnya.

Rapat Evaluasi Layanan Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Tahun 2022 dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2023

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sendiri berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan. Sejak dibuka secara resmi oleh Sesjen MPR pada 26 November 2022 siang, rapat yang dipimpin Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., terlaksana secara maraton.

Satu persatu pimpinan bagian dan unit memberikan paparan lengkap, mulai dari capaian kinerja, kendala dan hambatan yang dihadapi sampai proyeksi program ke depan. Ada satu wacana menonjol muncul dalam rapat, yakni usulan untuk memunculkan kembali Museum MPR RI. Usulan tersebut mendapatkan respon positif oleh seluruh peserta rapat dan mendapatkan dukungan Pimpinan Rapat.

"Wacana Museum MPR, menurut saya, sangat baik. Masyarakat, terutama generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa yang sering melakukan kunjungan ke MPR bisa mendapatkan informasi utuh dari mulai sejarah pembentukan MPR hingga MPR terkini. Sementara itu, untuk sekarang ini dalam rangka memaksimalkan kualitas akses informasi kepada publik harus diperkuat berbagai aplikasi, seperti Buku Digital, media sosial, pemberitaan kegiatan MPR sampai penyempurnaan perpustakaan," tandasnya. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Abdul Kholik, SH, MSi, Anggota MPR dari Kelempok DPD

Utusan Golongan Perlu Masuk dalam Keanggotaan di MPR RI

SETELAH UUD 1945 diamandemen (1999-2002), keanggotaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus dari MPR RI. Sebelum amandemen, keanggotaan MPR RI terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Setelah UUD 1945 diamandemen, keanggotaan MPR RI hanya terdiri dari anggota DPR RI sebagai representasi partai politik, dan anggota DPD RI sebagai representasi kepentingan daerah. Sedangkan Utusan Golongan dihapuskan.

Dari hasil Pemilu 2004, tidak ada lagi Utusan Golongan di MPR. Setelah hampir dua dekade reformasi, kini muncul aspirasi untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR. Aspirasi seperti ini datang dari PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Salah satu alasannya adalah MPR seharusnya bersifat terbuka dan diisi oleh elemen masyarakat yang menjadi miniatur wajah multikulturalisme di Indonesia.

Untuk membahas lebih lanjut wacana atau gagasan memasukkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR, *Majelis* mewancarai anggota MPR dari Kelompok DPD, Dr. Abdul Kholik, SH., MSi., beberapa waktu lalu. Berikut wawancara *Majelis* dengan Senator dari Jawa Tengah yang juga menginisiasi Kaukus Utusan Golongan. Petikannya.

MPR menampung aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta agar unsur Utusan Golongan kembali dipertimbangkan dalam keanggotaan MPR. Bagaimana tanggapan Bapak?

Sejak awal saya menganggap Utusan Golongan perlu dikembalikan dalam keanggotaan MPR. Kenapa? Karena, para *founding fathers* sudah mengonstruksikan pembentukan lembaga MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Karena itu, unsur dalam keanggotaan di MPR ada tiga, yaitu: perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan golongan. Jadi, kalau MPR mau disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat, maka keanggotaan MPR harus melingkupi ketiga unsur tadi.

Selama ini orang menganggap bahwa anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Padahal, berbeda dengan DPR dan DPD, keanggotaan di MPR sesungguhnya adalah individu-individu. Kami sendiri sedang menginisiasi Utusan Golongan dengan membentuk Kaukus Utusan Golongan. Anggota Utusan Golongan ini adalah anggota DPR dan anggota DPD yang punya basis golongan. Basis golongan itu di antaranya, mewakili agama, akademisi, petani, perempuan, pemuda, pengusaha.

Kami juga sedang mempersiapkan opsi-opsi apabila nanti mulai proses pengambilan keputusan, misalnya dalam bentuk konvensi ketatanegaraan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945, untuk memenuhi unsur keanggotaan MPR yang mewakili unsur perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan golongan. Jadi, sebenarnya ada ruang untuk memasukkan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR, karena pada saat ini pun sebenarnya ada perwakilan golongan di parlemen. Kami sedang mempersiapkan opsi itu agar nanti bisa membuat MPR lebih legitimate.

Tapi, di luar itu, kami yang masuk dalam Kaukus Utusan Golongan juga membuka ruang untuk menyerap aspirasi-aspirasi golongan dari masyarakat. Kami mengakui bahwa semua ini masih dalam proses

sebuah gagasan. Kami mencoba untuk memulai mengimplementasikannya dengan melihat situasi dan kondisi saat ini.

Jika mendengar Utusan Golongan seolah-olah mengingatkan MPR sebelum era reformasi. Hal ini bisa menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang menilai wacana mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR sebagai setback. Apa tanggapan Bapak?

Pertama, kembali kepada filosofi bahwa MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat, sehingga seharusnya semua terwakili di MPR, yaitu perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan golongan. Kedua, dalam proses pengambilan keputusan yang didominasi keterwakilan politik maka hasilnya politis, dan mengabaikan aspirasi-aspirasi golongan-golongan. Jadi, saya kira kalau dari sisi substansial, kita bisa sepakat bahwa Utusan Golongan diperlukan sebagai keterwakilan di parlemen.

Tetapi, yang akan menjadi dilema dan kontroversi adalah bagaimana memasukkan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR, dan bagaimana mengklasifikasi atau mengategori siapa yang disebut sebagai Utusan Golongan. Sebab, ada pandangan semua yang masuk kategori golongan harus terwakili dalam keanggotaan di MPR. Ini bisa menimbulkan kontroversi. Belum lagi bila golongan itu tidak solid atau terpecah.

Melihat sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia sekarang ini, bagaimana cara untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR?

Untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR, ada beberapa pilihan langkah yang bisa dijalankan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme mengembalikan utusan golongan dalam keanggotaan di MPR. Sebab, untuk menjadi anggota MPR saat ini sudah dikunci dengan pemilihan langsung melalui Pemilu.

Sebenarnya, peluang tetap terbuka untuk mengembalikan Utusan Golongan dalam keanggotaan di MPR meski melalui Pemilu. Peserta Pemilu adalah partai politik dan perorangan. Jadi, sebenarnya Pemilu juga diikuti calon perseorangan, yaitu calon-calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD adalah perseorangan yang terpilih melalui pemilihan langsung di Pemilu. Anggota DPD yang terpilih sebenarnya adalah pribadi-pribadi, bukan mewakili kelembagaannya. Jadi, anggota DPD yang menjadi anggota MPR adalah mewakili pribadi masing-masing. Dari sini, mereka sebenarnya ada yang mewakili golongan-golongan.

Faktanya, saat ini banyak perorangan yang menjadi anggota DPD sebenarnya masuk melalui golongan-golongan, seperti dari unsur agama Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, golongan agama lain, dari akademisi, profesi, guru, petani. Jadi, ada anggota DPD yang berasal dari golongan-golongan. Artinya, ada ruang untuk menghidupkan Utusan Golongan dengan prosedur sederhana itu. Pemilu diikuti perseorangan, dan mereka bisa masuk menjadi Utusan Golongan.

Ketika di MPR, peserta Pemilu perorangan ini bisa memilih apakah masuk sebagai Utusan Daerah (DPD) atau memilih sebagai Utusan Golongan. Termasuk, bisa saja bila dimungkinkan melalui regulasi, anggota MPR yang masuk melalui partai (anggota DPR) bisa juga memilih kelompok Utusan Golongan di MPR. Dengan demikian, keanggotaaan di MPR menjadi jelas, yaitu ada anggota DPR yang mewakili partai politik, anggota DPD yang mewakili utusan daerah, dan anggota yang mewakili golongan-golongan bisa dari anggota DPD maupun anggota DPR. Ketika berada di MPR, anggota parlemen perseorangan itu bisa memilih apakah masuk sebagai Utusan Daerah atau Utusan Golongan.

Utusan Golongan itu hanya ada di MPR. Utusan Golongan itu bisa berasal dari anggota DPR maupun anggota DPD yang merepresentasikan golongan. Karena itu, paling mungkin Utusan Golongan berasal dari Pemilu perseorangan (pemilihan anggota DPD). Sebab, kalau dari partai politik, calon legislatif itu mempunyai ikatan yang lebih kuat pada partai politik. Misalnya, golongan pengusaha. Di partai politik, banyak kader partai yang juga pengusaha. Tetapi, jika pengusaha itu masuk dalam Pemilu perseorangan, maka dia bisa menjadi wakil untuk menyalurkan aspirasi golongan pengusaha.

Apakah perlu dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Bukankah dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD?

Tidak harus melalui amandemen. Saya memandang tidak harus melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk memasukkan Utusan Golongan. Memang dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tetapi tidak disebutkan latar belakang asal anggota DPR dan anggota DPD.

Bahkan, bisa dilakukan juga terobosan, bila sudah menjadi kesepakatan dan kesepahaman semua pihak, yaitu melalui Tata Tertib MPR. Ini bisa dimungkinkan. Sebab, Tatib MPR langsung implementasi dari UU tentang MPR, DPR, dan DPRD (MD3). Atau bisa juga diatur dalam UU MD3.

Bisa disimpulkan Utusan Golongan dipilih melalui jalur Pemilu, bukan diangkat?

Sekali lagi *founding fathers* mengonstruksi MPR untuk mewakili tiga unsur, yaitu perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan golongan. Karena itu, keanggotaan di MPR perlu direvitalisasi dengan berbagai pendekatan yang memungkinkan, baik mekanisme maupun asal usul anggota, yang juga kompatibel dengan mekanisme pemilu.

Kalau Utusan Golongan diangkat langsung, tanpa melalui Pemilu, maka akan menimbulkan problem-problem seperti pada masa lalu. Kalau lewat Pemilu, maka Utusan Golongan mendapat mandat dari rakyat. Pemilu yang diikuti perseorangan seperti calon anggota DPD, bisa menjadi jalur untuk Utusan Golongan di MPR. ❑

Sedih Mendengar Daerah Kelahirannya

Diguncang Gempa

ARTIS dan politikus, **Ingrid Kansil,** sangat sedih dan haru begitu mendapat kabar daerah kelahirannya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diguncang gempa dengan magnitude 5,6 pada 21 November 2022. Sehari setelah menerima kabar terjadinya musibah yang menewaskan lebih 300 orang itu, pemilik nama asli Ingrid Maria Palupi Kansil ini, bersama suaminya, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan — yang tak lain Wakil Ketua MPR RI — langsung terjun ke lokasi gempa.

"Di sana, kami mendengarkan banyak cerita bahwa ada korban yang kehilangan rumahnya, ada juga korban yang keluarganya wafat. Mereka menceritakan, benar-benar tidak menduga bahwa kejadian tersebut akan menimpa wilayah tersebut," ujarnya.

Dan, tertunya, Ingrid bersama suaminya juga bagi-bagi sembako. ❑

DER

Ingrid Kansil

Pimpin Delegasi
Lakukan Histirocal Walk

GUBERNUR Jawa Barat, **Ridwan Kamil**, Selasa (25/10/2022), memimpin 15 delegasi negara-negara Organisasi Islam Internasional, peserta Forum MPR Dunia atau MPR International Conference, saat melakukan Historical Walk dari Hotel Savoy ke Gedung Merdeka Bandung.

Sebelum melakukan napak tilas perjalanan para pemimpin negara-negara Asia Afrika tahun 1959 itu, Kang Emil—begitu dia biasa disapa— terlebih dahulu meminta para peserta bergandengan tangan. "Supaya lebih keren dan kompak," katanya setengah berteriak.

Ketika rombongan mulai berjalan, Kang Emil tiba-tiba meminta seluruh delegasi melihat ke atas. "Look up there, say hello," teriaknya. Rupanya, di atas kepala para peserta berseliweran drone mengabadikan momen tersebut. Dan, serempak seluruh delegasi mendongak ke atas dan melambaikan tangan

"Saya berusaha membuat mereka nyaman dan happy dengan tidak menghilangkan makna historis KAA 1959," kata Kang Emil usai acara tersebut. ❑

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Radwan Kamil

Eksanti

Kagum Pimpinan MPR
Begitu Sayang Ibu

EKSANTI, model, artis film dan sinetron, perancang busana, tampak hadir dalam acara memperingati 40 hari wafatnya Ibunda Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, di Serang, Banten, Kamis malam, 30 November 2022.

Artis kelahiran Bandung yang mulai mengawali kariernya di tahun 1996 dengan membintangi sinetron 'Angin Tak Dapat Membaca' ini datang untuk ikut mendoakan almarhumah agar di terima di sisi Allah SWT.

"Saya turut berduka, semoga almarhumah diterima amal ibadahnya," ujar artis sekarang menjadi politisi PAN ini. Hadir mengenakan busana Muslimah warna biru, Eksanti terlihat khusyu' mengikuti seluruh acara peringatan tersebut. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Masjid Raya Sheikh Zayed Al-Nahyan, Solo

Replika Masjid Terbesar di Abu Dhabi

RESMI sudah masyarakat Solo Raya memiliki objek tujuan wisata religi yang sangat megah. Sebuah masjid dengan arsitektur sangat indah, laiknya tempat ibadah di Timur Tengah, telah berdiri di Kota Solo, Jawa Tengah. Masjid yang sangat indah dan mewah. Selain marmer yang menempel di lantai dan dinding, berbagai ornamen yang terdapat di bagian atas masjid membuat masjid itu semakin menakjubkan.

Bangunan masjid itu diberi nama Masjid Raya Sheikh Zayed Al-Nahyan. Berdiri di atas lahan seluas 3,6 hektare, bekas depo Pertamina, di Jalan A. Yani Nomor 128 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed berlangsung pada 6 Maret 2021.

Berdirinya Masjid Raya Sheikh Zayed adalah bukti eratnya persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Karena masjid ini adalah hadiah dari Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al-Nahyan kepada Presiden Joko Widodo. Kedua pimpinan negara ini telah meresmikan penggunaan masjid itu pada Senin, 14 November 2022.

Pembangunan Masjid Sheikh Zayed menghabiskan dana Rp 300 miliar. Dana yang dikeluarkan cukup besar memang, karena masjid ini dibangun mengunakan bahan-bahan yang berkualitas prima dengan arsitektur yang rumit. Marmer untuk lantai dan dinding, contohnya, dipesan secara khusus dari negara Italia.

Sebagai gambaran keindahan marmer itu, salah satunya terdapat di tempat salat kaum perempuan. Di sini, marmer yang menempel di lantai dan dinding menggunakan motif atau hiasan bunga-bunga, berwarna cerah. Motif marmer ini berbeda dari lantai marmer pada umumnya. Apalagi motif bunga-bunga di marmer tersebut saling keterkaitan atau

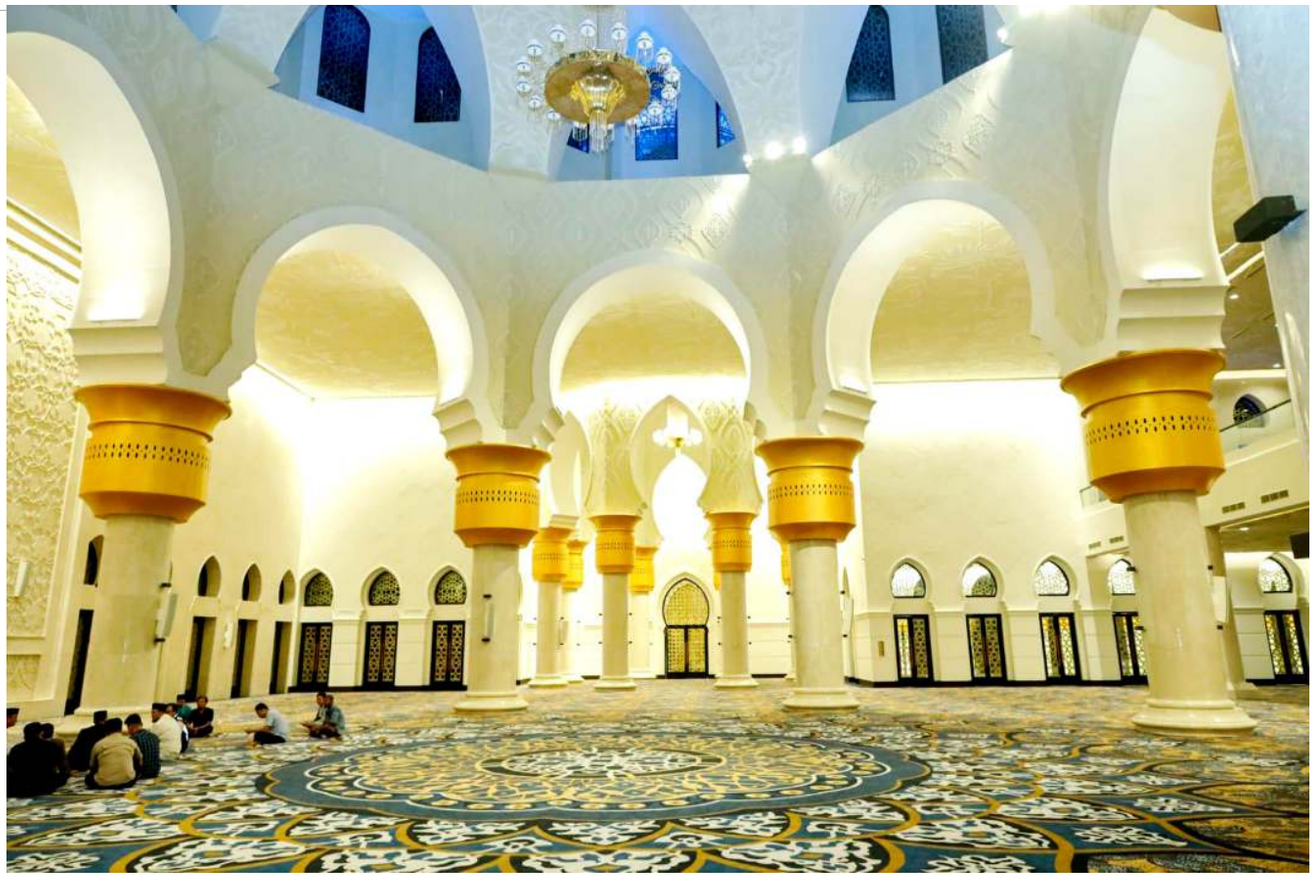

menyambung, menambah keindahannya.

Tak hanya itu, karpet yang terdapat di ruang utama Masjid Sheikh Zayed Solo membentang di seluruh lantai. Mulai dari pintu masuk hingga bagian depan imamah. Di bagian atas karpet terdapat motif batik bergambar bunga, rerumputan hijau. Warnanya terdiri dari coklat, hijau, hingga biru. Sangat indah dipandang.

Masjid Replika

Masjid Raya Sheikh Zayed adalah replika Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi UEA. Arsitektur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo memang dibuat mirip dengan masjid aslinya di Abu Dhabi, UEA. Di masjid ini terdapat 4 menara dan 1 kubah utama. Di sekelilingnya, terdapat kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan khas Timur Tengah. Bedanya, cuma kapasitas masjid. Kalau Masjid Raya Sheikh Zayed di Abu Dhabi berkapasitas 40.000 jamaah, sedangkan yang di Solo ini lebih kecil, berkapasitas 10.000 jemaah.

Masjid Sheikh Zayed Solo – sebagaimana juga di Abu Dhabi— dipengaruhi oleh arsitektural Mughal (India, Pakistan, Bangladesh) dan Moorish (Maroko). Bangunannya terdiri dari dua lantai, seluas 8.400 meter persegi.

Masjid Sheikh Zayed Solo memiliki luas area lanskap 24.600 meter persegi yang berfungsi sebagai lahan hijau. Sementara area parkir dan jalan di lingkungan masjid ini mencapai 3.500 meter persegi dapat menampung kenderaan bus, mobil biasa, dan motor.

Tak hanya tempat salat dan ruang wudhu, berbagai fasilitas lainnya juga tersedia di Masjid Raya Sheikh Zayed ini. Mulai dari perpustakaan, kamar mandi (toilet), ruang taman, ruang transit VIP, dan ruang pengelola. Masjid ini memang ini diproyeksikan untuk pusat kegiatan dakwah, sosial, dan pembinaan umat. Karena itu, di lingkungan masjid terdapat juga Islamic Center yang memiliki fasilitas pendidikan agama. Yaitu Taman Pendidikan Alquran (TPA), tempat tafsir Alquran, dan madrasah. Selain itu, ada juga tempat pengembangan ekonomi Syariah, berupa toko-toko yang menjual produk halal.

Keberadaan Masjid Raya Sheikh Zayed ini mengundang perhatian warga masyarakat seantero Solo Raya dan sekitarnya. Sejak diresmikan, warga masyarakat datang berbondong ke masjid itu untuk melaksanakan salat di sana. Mereka datang, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.

Tak jarang, kendaraan berbagai ukuran dengan plat nomer luar kota juga terlihat berhenti di sekitar masjid. Itu pertanda bahwa Masjid Raya Sheikh Zayed juga menarik perhatian masyarakat dari luar Solo Raya. Kedatangan mereka itu tak lepas karena tertarik dengan keunikan arsitektur dan kemegahan Masjid Raya Sheikh Zayed, dan menjadikannya sebagai satu obyek wisata religi di Suarakarta.

Untuk menjamin berlangsungnya peribadatan secara baik telah ditunjuk K.H. Abdul Rozaq Shofawi (pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo) menjadi Imam Besar Masjid Sheikh Zayed. Sedangkan K.H. Abdul Karim Ahmad Al Hafidz atau akrab disapa Gus Karim, pengasuh Ponpes Al-Quraniy Azzayadiy, menjadi Wakil Imam Besar. ❏

MBO

H. Santoso, SH,. MH.

Si Anak Empang di Pusaran Politik Ibu Kota

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

TEKAD pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tetap menggebu-gebu. Meski, masih ada sebagian masyarakat yang menolak rencana tersebut, tetapi suara penolakan pemindahan ibu kota itu tidak begitu jelas, dan hanya terdengar secara samar-samar. Sedangkan sebagian besar lainnya mendukung rencana pemindahan tersebut, meski dengan syarat tertenu.

Pro kontra terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara itu dirasakan benar oleh Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jakarta III, H. Santoso, SH.. MH. Dia banyak menemukan sikap pro kontra atas upaya pemindahan IKN itu di dapilnya sendiri, Jakarta Barat, Utara, serta Kepulauan Seribu.

"Masih banyak warga yang menolak, tetapi suaranya kurang terdengar. Sedangkan yang setuju pindah meminta agar sifat kekhususan Jakarta dipertahankan, tidak dicabut sebagaimana ibu kota negara," kata Santoso kepada Majalah *Majelis* yang menyambangi ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Permintaan agar sifat kekhususan Jakarta di pertahankan, menurut Santoso, di dapat saat melakukan sosialisasi terhadap UU N0. 3 tahun 2022 tentang IKN. Pada dua kali kesempatan sosialisasi, Santoso mendapat pertanyaan, mengapa rencana pemindahan IKN dilakukan begitu cepat. Lalu, bagaimana status Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota.

Intinya, sebagian tokoh Betawi yang menjadi konsituennya di dapil Jakarta III menginginkan agar status khusus itu tetap diberlakukan di Jakarta. Bukan status khusus sebagai ibu kota. Tetapi kekhasan pemerintahan sebagaimana daerah lain yang memiliki keistimewaan. Seperti, Papua yang memiliki Otsus, Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya adalah Sultan yang ditetapkan sebagai kepala daerah tanpa melalui pilkada. Atau seperti Aceh yang memiliki keistimewaan dalam pemberlakuan perda dan parpol local.

"Itulah harapan yang disampaikan para tokoh masyarakat dan organisasi massa. Mereka nyata menginginkan sifat kekhususan itu ada di Jakarta, sebagai kota yang pernah menjadi Ibu Kota Negara Indonesia," ungkap Santoso.

Kekhususan itu diminta karena sebagai warga Jakarta, masyarakat merasa sudah banyak berkorban. Mereka rela mengalah agar pembangunaan ibu kota berjalan lancar. Sikap mau mengalah itu dilakukan semata-mata karena masyarakat bangga, Kota Jakarta diakui sebagai ibu kota. Padahal, bagi masyarakat, kebanggan Jakarta menjadi ibu kota negara hampir tidak memberi manfaat apapun.

"Dengan penetapan Jakarta sebagai daerah khusus bekas ibu kota, warga Betawi sebagai suku asli di Jakarta berharap, mendapat prioritas. Apalagi, keberadaan mereka di Jakarta semakin terpinggirkan. Kalah dari pendatang dan investor yang melaksanakan pembangunan. Juga kalah berkompetisi dengan warga yang lain. Pada saat yang sama warga asli Jakarta selalu kooperatif, selalu menerima kehadiran suku-suku lain untuk bermukim di Jakarta.

Bahkan, yang dulunya punya banyak kontrakan dan tanah sekarang malah mengontrak," ungkap santoso .

Hak Inklusif

Karena itu, jika pada saatnya nanti Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, masyarakat mengharap hak-hak yang dulu terampas oleh para investor untuk dikembalikan. Masyarakat meminta kekhususan itu tetap ada. Yaitu, kekhususan seperti UU 23/2016 yang memberikan otonomi kepada Pemerintah Kota, bukan otomi di tangan pemerintah provinsi.

Selain itu, hak memilih pemimpin dikembalikan kepada rakyat, bukan diserahkan kepada gubernur. Fungsi wali kota sebagai tenaga administrasi gubernur juga harus diubah. Agar mereka juga memiliki vsisi misi untuk menyentuh rakyatnya. Bisa merencanakan dan melaksanakan pembangunan, bukan sekedar menerima distribusi dari gubernur.

Intinya, menurut Santoso, masyarakat tidak menolak jika ibu kota negara akan dipindahkan. Apalagi sudah diputuskan oleh pemerintah dan didukung undang-undang. Yang penting, masyarakat memiliki hak inklusif bila tiba saatnya nanti Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota.

"Pertanyaannya sekarang, bagaimana memulai menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi. Di negara lain memang tidak masalah, tetapi kita punya kebiasaan sosial budaya sendiri. Bukannya kita punya pepatah, ada gula ada semut. Kalau gulanya dipindah ke Paser Penajam, masyarakat pun akan mengejarnya ke sana," kata santoso lagi.

Meski 2019-2024 adalah peride pertamanya di Senayan, namun Santoso tidak pernah merasa canggung berhadapan dengan kawan maupun lawan. Itu terjadi karena ia memiliki pengalaman yang cukup. Sebelum duduk di kursi DPR RI, Santoso adalah anggota DPRD DKI dua periode. Ia juga pernah menjadi Ketua Karang Taruna Provinsi Jakarta Utara. Dan, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

Sebagai anggota DPR RI, hubungan Santoso dengan konsituennya berlangsung sangat intensif. Tidak seperti kebanyakan anggota dewan, hampir tiap hari Santoso bertemu dengan konsituennya. Maklum, dia adalah anggota DPR RI dapil Jakarta III, dan tinggal di Sunter yang juga daerah pemilihannya.

Kosekwensinya, hampir setiap saat pintu rumahnya terbuka, menerima tamu dengan berbagai urusan. Termasuk menyerahkan bantuan proposal maupun bantuan sosial. Tetapi, ia menikmati

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

suasana tersebut dan tidak mengeluh menjadikan rumahnya sebagai tempat berkeluh kesah warga. Apalagi, sejak lama, Dia sudah terbiasa menerima keluhan warga. Baik saat menjabat sebagai Ketua RT, Sekretaris RW hingga pengurus Karang Taruna.

Santoso juga tidak pernah berfikir untuk pindah, meski ia punya beberapa rumah lain di luar dapilnya. Keputusan tersebut diambil karena ia ingin bersama konsituen. Dengan cara itu Santoso juga bermaksud mendidik masyarakat agar memilih wakilnya yang siap berbaur bersama masyarakat dalam senang dan susah. Meski tidak selalu harus memilih dirinya, tetapi setidaknya ada perhatian untuk memilih anggota yang tinggal di daerah pemilihan, bisa berguna bagi masyarakat dapil.

"Saya hafal, niat orang-orang yang datang ke rumah. Tetapi semua saya layani, meski itu larut malam. Kecuali mereka teman dekat dan bisa diundur waktunya. Saya mencoba memenuhi imbauan sebuah hadis yang mengatakan, "bantulah meski mereka menunggang kuda." Padahal, para penunggang kuda diArab itu orang kaya, tapi kita tetap disuruh membantu jika mereka memerlukan," kata Santoso lagi.

Selain itu Santoso juga menyemangati dirinya sendiri dengan tagline *Peduli dan Berbuat*. Tagline itu ia pakai agar tidak pernah merasa lelah membantu orang lain. Apalagi, masyarakat yang telah mengantarnya ke DPR RI. Dengan cara itu, ia juga berharap bisa menginspirasi orang lain untuk peduli dan berbuat sesuai kemampuannya sendiri-sendiri.

Si Anak Empang

Santoso adalah sosok yang menyenangkan. Ia tetap rendah hati dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI. Sikap tersebut terasah dari perjalanan dan pengalaman hidupnya semenjak usia belia. Karena sebagian perjalanan hidup Santoso tidak berjalan mulus, bahkan mengandung risiko yang tidak kecil.

Santoso adalah anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan Solekan dan Aminah. Dalam perjalanan, pasangan suami istri itu menitipkan anak pertama mereka agar bisa mengurus anak-anak yang lain. Nahas, Santoso yang ikut bersama kakek neneknya di Cengkareng ternyata mendapatkan lingkungan sosial yang kurang baik. Di tempat itu terdapat banyak anak sebayanya yang kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka. Mereka hidup secara bebas dengan alam yang menyertainya.

Bermain di sawah dan sungai menjadi kebiasaan Santoso sehari-hari. Memancing ikan dan belut bisa dia lakukan berjam-jam lamanya. Ia bahkan sering lupa waktu sehingga tidak pulang. Santoso kecil baru tersadar jika kakeknya datang sembari bawa tongkat untuk memukulkan cucunya, karena terlalu lama bermain.

Selain sungai dan sawah, Santoso juga gemar menghabiskan waktunya bermain di empang. Padahal, dia sering digigit lintah, tetapi tidak jera dan terus bermain di empang. Karena sering bermain di empang itulah maka teman-temannya memberi panggilan kepada Santoso dengan julukan Si Anak Empang. Melihat gelagat kurang baik dari kehidapan Santoso yang selalu menghabiskan waktunya bermain, orang tuanya segera mengajak kembali. Dan, tinggal bersama mereka di Sunter.

"Sampai sekarang saya suka ketemu dengan teman-teman masa kecil. Di antara mereka ada yang jadi mantan preman. Ada juga yang meninggal karena petrus. Mengingat semua kisah itu, saya bersyukur karena diajak pindah ke Sunter. Kalau tidak, ceritanya bisa lain, karena dulu saya sering bermain bersama mereka, bahkan ikut ke manapun mereka pergi," kenang Santoso.

Melihat jejak kehidupannya yang terjal itulah Santoso sangat mensyukuri kehidupannya yang sekarang. Bagaimana tidak, selain terlepas dari pengaruh buruk teman-temannya, Santoso juga sempat keluar dari sekolah. Ia juga nyaris ingin benar-benar berhenti dari pendidikannya di jenjang SLTA. Tetapi nasib memang berkehendak lain.

Karena itu, sebagai anggota Komisi III DPR RI, Santoso bertekad akan selalu bekerja dengan baik. Melaksanakan amanat konstiuen dan memperjuangkan aspirasinya di ranah legislative. Khususnya menyangkut bidang tugas komisi III, yaitu HAM dan Keamanan.

Menyangkut wacana restrukturisasi Kepolisian Republik Indonesia, paska kasus-kasus yang terjadi belakangan, Santoso berpendapat, itu merupakan persoalan yang bersifat personal. Artinya, petinggi Polri yang bermasalah harus dievaluasi. Belum perlu dilakukan secara struktural atau kelembagaan. Masyarakat berfokus pada bagaimana oknum yang melanggar, seperti Ferdy Sambo atau pelaku kejahantan lainnya dicopot dari keanggotaannya di Polri.

"Wacana itu sebenarnya sudah lama ada. Seperti juga ada BNN, tapi penyalahgunaaan narkoba makin sering terjadi. Pada saat yang sama ada juga Dir Narkoba di Polri saling berbenturan dan tidak singkron, sehingga harus dibenahi," ungkapnya.

Tanjung Priok

Di Partai Demokrat, Santoso adalah salah satu kader yang pilih tanding. Namanya, mulai terdengar di pusaran politik sejak 1998, saat masih menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanjung Priok. Setahun berikutnya, ia ditarik menjadi Panwascam. Tahun 2002, ia mendengar bahwa Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan partai. Dan, pada 2003, Santoso pun ikut merintis berdirinya Partai Demokrat Jakarta Utara.

Di awal keterlibatannya dengan Partai Demokrat, Santoso juga terantuk masalah internal terkait saling klaim sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, begitu persoalan itu reda, arah politiknya terhadap Partai Berlambang Mercy semakin jelas.

Tidak lama setelah mantap dengan Partai Demokrat, Santoso ikut kontestasi pemilu pertamanya tahun 2004. Saat itu ia mendapat suara terbanyak ketiga, namun kalah bersaing dengan nomer urut di atasnya, dan gagal duduk di kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, pada percobaan keduanya menjadi anggota DPRD, atau Pemilu 2009, ia meraih sukses. Demikian juga pada Pemilu tahun 20014.

"Tahun 2019 saya memberanikan diri untuk naik kelas di DPR RI, sekaligus mencoba mesin politik. Ini pilihan sulit, tapi kalau bertahan

di DPRD, berarti karir saya mandeg. Keputusan saya ternyata tepat, karena saya berhasil ke Senayan," ujar Santoso.

Kalau ada kesempatan, Santoso tidak menolak untuk mencoba ranah eksekutif. Tetapi, ia tidak tertarik menjadi gubernur, apalagi bupati dan walikota. Yang penting, baginya adalah bekerja dengan baik dan tidak memaksakan diri. ❑

MBO

Biodata

Nama : **H. Santoso, SH., MH.**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 17 Februari 1969
Alamat Rumah : Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Perjalanan Politik:
2017 – 2022 : Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta
2006 – 2011 : Ketua DPP Partai Demokrat DKI Jakarta
2003 – 2006 : Wakil Ketua Partai Demokrat Jakarta Utara
2001 – 2006 : Ketua Karang Taruna Jakarta Utara

Riwayat Pendidikan:
- SD Sunter 08, 1978 - 1984
- SMP Negeri 23, 1984 - 1987
- SMA Bhinneka Karya, 1988 - 1991
- S1 Hukum, Attahiriyah, 2014

Film Menjadi Bagian Budaya dan Sejarah

FILM tentunya bukan sesuatu yang asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana media ini menjadi hiburan sekaligus seni dalam masyarakat. Film berasal dari luar negeri sebagai sarana hiburan, namun demikian, saat ini sudah menjadi bagian dari budaya dan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi kekayaan bangsa Indonesia, walaupun tidak ada literatur yang menunjukkan kapan pastinya pertama kali film masuk ke Indonesia.

Dalam sejarah, Indonesia untuk pertama kalinya membuat film, yaitu pada tahun 1926 dengan judul: *Loetoeng Kasarung*, yang diproduksi oleh dua orang Belanda, L. Heuveldorp dan G. Kruger, dan merupakan film yang diangkat dari legenda Sunda. Produksi film di Indonesia kemudian berlanjut dengan dibuatnya film *Eulis Atjih* yang menceritakan kisah seorang istri yang disia-siakan suaminya dan tayang di tahun berikutnya, yaitu 1927.

Sejak saat itu, perfilman di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat dan pasang surut kemajuan hingga saat ini. Pasang surut tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik, tokoh-tokoh perfilman, regulasi, serta film-film asing yang masuk ke Indonesia.

Kadar demokrasi suatu negara, antara lain bisa dilihat dari pilihan film yang tersedia bagi masyarakatnya. Logikanya, semakin beragam film yang beredar di publik, semakin terbuka pula masyarakatnya terhadap segala bentuk perbedaan dan kebaruan. Tentunya dalam kerangka ini kita tidak saja berbicara film sebagai hasil karya dari berbagai lini produksi, tapi juga sebagai medium pertukaran gagasan, nilai, dan pengalaman.

Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998 ialah diadakannya reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan, antara lain dalam bidang perfilman, sehingga perlu adanya paradigma baru. Paradigma baru yang telah dibangun negara tentang perfilman adalah dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 telah menegaskan paradigma baru dalam perfilman di Indonesia. Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai sarana

hiburan, tetapi bisa sekaligus media komunikasi massa sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional dan alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

Oleh:
H. Yandri Susanto, S.Pt
Wakil Ketua MPR RI

Film sebagai karya seni budaya tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan berbangsa, perfilman senantiasa harus berpedoman pada implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan.

Dengan paradigma baru perfilman, sesuai asas dan tujuan kegiatan perfilman sebagaimana diatur dalam undang-undang, ada kewajiban negara untuk memajukan perfilman dan perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh penyelenggara negara dengan para pelaku perfilman dalam hal menjadikan film untuk memberikan pendidikan dan penyampaian pesan tentang pentingnya penerapan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-jari.

Melalui film, negara dapat bersinergi membangun perfilman yang berkualitas dan mencerminkan identitas luhur bangsa yang telah diwariskan oleh para pendiri negara.

Film ada yang dibuat di dalam negeri dan ditayangkan di dalam maupun di ekspor ke luar negeri. Namun demikian, tidak sedikit juga film yang diimpor dari luar negeri. Dalam keadaan demikian, maka kepedulian penyelenggara negara dan masyarakat terhadap materi film sangat diperlukan untuk mencegah beredarnya film-film yang bertentangan dengan budaya Indonesia atau membawa pengaruh negatif antara lain melalui kegiatan sensor film.

Sensor sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, seperti dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografi, penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing.

Masyarakat sudah memperjuangkan tumbuh-kembang budaya sinema nusantara dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Sekarang giliran pemerintah untuk menghargainya dengan keberpihakan politik yang tegas pada masyarakat. Hanya dengan sinergi yang sistematis dan inklusif itulah, pemerintah bisa mengakomodir keragaman masyarakatnya lewat kegiatan perfilman.

Dengan demikian, apabila ada sinergi dari pemerintah, masyarakat, dan para pelaku perfilman serta komitmen untuk menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam setiap film, perfilman di Indonesia akan menjadi sarana penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang cerdas dan berwawasan serta berakhlak mulia.

Kepedulian masyarakat terhadap tontonan akan menjadi sebuah modal berharga untuk mengetahui berbagai persoalan dan pemecahannya dalam rangka pengembangan kualitas perfilman di Indonesia. Dengan meningkatnya pemahaman tentang perfilman akan mendorong lahirnya rekomendasi terkait dengan peningkatan kualitas kebijakan dan program pemajuan perfilman dan budaya sensor mandiri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang perfilman sehingga muncul kepedulian dan kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan secara mandiri sesuai dengan klasifikasi usianya, agar masyarakat terlindungi dan mendapatkan haknya menikmati film dan iklan yang bermutu. ❑

Mimpi Yang Terwujud

Perjalanan hidup Fadel Muhammad yang saat ini menjadi Wakil Ketua MPR sangat panjang. Bisa jadi sepanjang Ternate - Bandung. Setelah lulus SMA di Ternate dirinya melanjutkan kuliah di ITB Bandung. Dari Bandung, Bukaka, dan Golkar mengantarkan hidupnya seperti saat ini. Semua kisah hidupnya terungkap dalam buku yang dia ditulis.

NAMA Fadel Muhammad di kalangan pengusaha dan politisi, terutama Partai Golkar, tidak asing lagi. Pria kelahiran Ternate, Maluku Utara, itu sudah malang melintang dalam dua dunia yang kerap saling bersentuhan dan saling memengaruhi semenjak dirinya lulus dari ITB tahun 1978.

Untuk menapaki tangga-tangga kehidupan hingga saat ini menjadi Wakil Ketua MPR tentu bukan langkah yang mudah. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pria yang pernah menjabat Gubernur Gorontalo dua kali periode itu? Masyarakat dapat membaca kisah hidupnya dalam buku yang berjudul *Fadel Muhammad, Building A Legacy, Menimba Ilmu, Mengajar, Mengepakkan Bisnis & Berbakti Pada Bangsa.*

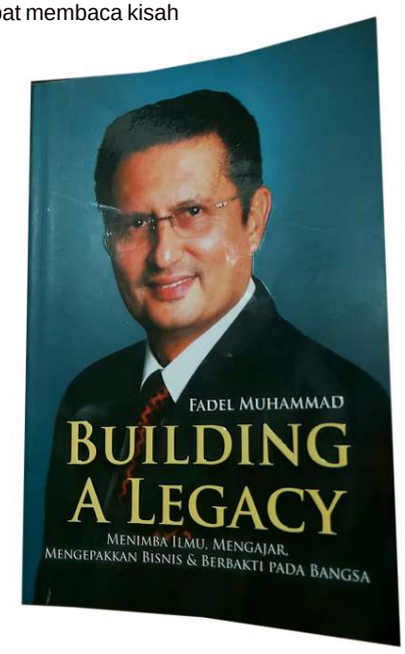

Buku yang diterbitkan oleh Rayyana Komunikasindo ini dicetak kali pertama pada Mei 2022. Buku setebal lebih dari 320 halaman itu terbagi dalam 20 bagian. Dari bagian-bagian yang ada, isi buku ditulis secara runut dari awal, mulai dari awal kehidupan dirinya hingga saat ini. Lihat saja pada bagian pertama yang berjudul, *Putra Gorontalo yang Lahir di Ternate* hingga bagian akhirnya yang berjudul *Mewakili Rakyat di DPR, DPD, hingga MPR*.

Meski sekarang hidup serba kecukupan, dalam buku itu, Fadel menuliskan kisah sambil memberi inspirasi bahwa masa sulit di waktu anak-anak dan remaja bukan siksaan hidup, melainkan tempaan penting untuk membangun karakter dan cita-cita yang hasilnya bisa diraih di masa dewasa. Ia menuliskan demikian, sebab dalam kisahnya saat di bangku SMP, dirinya sebelum berangkat sekolah membantu ibu menjual roti di Pasar Gamalama di Ternate.

Jarak dari Ternate ke Bandung pada masa itu terbilang sangat jauh. Transportasi yang ada belum seperti saat ini. Naik kapal ke Jawa butuh waktu berhari-hari. Kalaupun tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ia harus melanjutkan perjalanan naik bus atau kereta. Jarak yang demikian tidak menghalangi Fadel untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan prestius. Dirinya berangkat ke Bandung dan di Paris Van Java diterima di ITB. “Setahu saya, lulus dari ITB saat itu (juga hingga saat ini) menjadi impian banyak anak Indonesia dan saya beruntung bisa menjadi salah satu di antaranya. Di ITB inilah kepribadian saya terbentuk”, ujarnya dalam buku itu di halaman 5.

Lompatan kedua Fadel dalam hidupnya yang membuat ia sukses menuju ke tangga yang lebih tinggi ada pada halaman 85. Di halaman itu tertulis judul *Bersama Teman Mendirikan Bukaka*. Perusahaan inilah yang membuat namanya masuk dalam jajaran pengusaha besar di Indonesia. Ia bersama dengan Achmad Kalla, Erwin Kurniadi, Imron Zubandi, dan Muhammad Ashari mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan karoseri dan jasa servis teknik.

Perusahan itu berdiri pada 25 Oktober 1978. Nama Bukaka diambil dari nama salah satu desa yang ada di Bone, Sulawesi Selatan. Desa itu merupakan tempat tinggal Haji Kalla. Haji Kalla merupakan salah satu pengusaha besar yang memiliki perusahaan bernama NV. Haji Kalla.

Dari Bukaka itulah yang membuat Fadel mempunya ‘modal’ untuk berpolitik. Pada masa Orde Baru, Golkar merupakan partai politik yang tidak hanya besar, namun juga sangat berpengaruh. Di antara partai-partai yang ada, rupanya Golkar menjadi pilihan dirinya. Ia masuk dalam politik sambil membantah bahwa apa yang dilakukan untuk merebut jabatan atau konsensi bisnis.

Lalu kenapa memilih Golkar? Di halaman 176 terjawab. Dikatakan pada masa Orde Baru, Golkar merupakan partai politik terbesar. Untuk itu bila ia masuk ke dalamnya, dirinya dapat berkiprah lebih baik dan leluasa untuk merefleksikan diri secara utuh di masyarakat. “Saya bisa berbuat lebih banyak lagi dengan jangkauan masyarakat lebih luas”, ujarnya.

Pilihan Fadel tidak salah. Dari Golkar-lah karier politiknya terus berkembang. Setelah menjadi gubernur, selanjutnya menjadi menteri dari utusan partai berlambang pohon beringin itu. Dari sini pula namanya semakin popular hingga dirinya saat ini menjadi Wakil Ketua MPR. ❑

AWG

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI